

**STRATEGI PEMERINTAH KALURAHAN PAGERHARJO DALAM
MENDORONG PEMBANGUNAN**

TESIS



disusun oleh :

ABDUL HERI

23610005

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD”**

YOGYAKARTA

2025

**STRATEGI PEMERINTAH KALURAHAN PAGERHARJO DALAM
MENDORONG PEMBANGUNAN**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat
Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan**



diajukan oleh :

ABDUL HERI

23610005

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD”**

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PELAKSANAAN UJIAN

STRATEGI PEMERINTAH KALURAHAN PAGERHARJO DALAM
MENDORONG PEMBANGUNAN

Disusun Oleh

ABDUL HERI
23610005

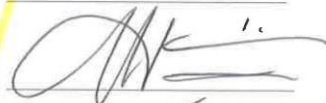
Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"
Pada tanggal, 18 Juni 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat lulus

PANITIA PENGUJI TESIS

Nama

1. Dr. Supardal, S.Sos., M.Si
Ketua/Pembimbing
2. Dr. Widodo Triputro, M.M., M.Si
Penguji Samping I
3. Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A
Penguji Samping II

Tanda Tangan



Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan



Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.P.A
NIDN: 0507106801

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

STRATEGI PEMERINTAH KALURAHAN PAGERHARJO DALAM
MENDORONG PEMBANGUNAN

Disusun oleh:

Abdul Heri

23610005

Disahkan oleh Tim Penguji

Pada tanggal: 28 Juli 2025

Susunan Tim Penguji

Nama

1. Dr. Supardal, S.Sos., M.Si

Ketua/Pembimbing

2. Dr. Widodo Triputro, M.M., M.Si

Penguji Samping I

3. Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A

Penguji Samping II

Tanda Tangan



Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan



Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.P.A

NIDN: 0507106801

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : ABDUL HERI

NIM : 23610005

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul STRATEGI PEMERINTAH KALURAHAN PAGERHARJO DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN, adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Ijazah dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Yogyakarta, 08 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



ABDUL HERI
23610005

HALAMAN MOTTO

“Aku gembira atas janji-Mu, seperti orang yang mendapat banyak jarahan”

(Mazmur 119:162)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan kebanggaan, penulis mempersembahkan tesis ini kepada:

1. Orang tua tercinta, Bapak Ngombang & Belasisus Yohanaes Ibu Ermina Wartina & Anna Marganingsih yang selalu memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang yang tak ternilai harganya. Terima kasih atas segala pengorbanan dan dorongan yang tak pernah berhenti.
2. Keluarga besar dan sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi di setiap langkah perjalanan penulis.
3. Dosen pembimbing, Dr. Supardal, S.Sos, M.Si yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan ilmu yang berharga selama proses penyusunan tesis ini. Terima kasih atas kesabaran dan dedikasinya.
4. Dosen penguji Dr. Widodo Triputro, M.M., M.Si yang telah memberikan arahan, dan ilmu yang berharga. Terima kasih atas kesabaran dan dedikasinya.
5. Dosen Penguji Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A yang telah memberikan arahan, dan ilmu yang berharga. Terima kasih atas kesabaran dan dedikasinya.
6. Seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pemerintahan.

Abdul Heri

Yogyakarta, 28 Juli 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis dengan judul **STRATEGI PEMERINTAH KALURAHAN PAGERHARJO DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN**, ini dengan baik. Tesis ini merupakan bagian dari perjalanan akademik saya di program Magister Ilmu Pemerintahan dan disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Ilmu Pemerintahan.

Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penyusunan tesis ini. Secara khusus, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” yang telah memberikan izin untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.P.A selaku Direktur Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan inspirasi juga ilmu selama menempuh kuliah di kampus tercinta ini.
3. Dr. Supardal, S.Sos., M.Si sebagai dosen pembimbing utama, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi yang berharga. Kesabaran, pengetahuan, dan dukungan Bapak sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
4. Dosen penguji, Dr. Widodo Triputro, M.M., M.Si dan Dr. Gregorius Sahdan, S.I.P., M.A yang telah memberikan masukan, saran, serta arahan yang sangat berarti dalam penyusunan dan penyempurnaan tugas akhir ini.

5. Para Dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” terimakasih atas didikasi serta ilmu yang diberikan kepada saya selama menempuh pendidikan di kampus ini.
6. Admisi Prodi Magister Ilmu Pemerintahan yang selalu senantiasa membantu melengkapi administrasi pendidikan peneliti.
7. Bapak/Ibu Dosen penguji, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran konstruktif yang sangat berguna untuk penyempurnaan tesis ini.
8. Orang tua tercinta, terimakasih atas doa, dukungan, dan cinta yang tiada henti. Terima kasih atas segala pengorbanan dan dorongan yang telah diberikan sepanjang perjalanan akademik ini.
9. Keluarga besar JOLAI BERSATU yang selalu mensupport saya selama menjalani pendidikan, baik secara materil maupun lewat doa-doa yang selalu menyertai setiap langkah saya.
10. Teman-teman seperjuangan Angkatan 31, yang selalu memberikan semangat, dukungan moral, dan motivasi. Kalian adalah sumber inspirasi dan kekuatan saya. Terimakasih atas setiap detik yang pernah kita lalui, suka-duka, canda tawa, semoga kelak kita semua menjadi orang yang bisa memberikan kepada banyak orang.
11. Kepala Lurah berserta jajarannya yang telah mengijinkan saya untuk melakukan penelitian di Kalurahan Pagerharjo.
12. Seluruh pihak dan informan, yang telah berpartisipasi dan memberikan data serta informasi yang sangat berharga untuk penelitian ini. Secara khusus Kalurahan Pagerharjo. Tanpa kontribusi kalian, penelitian ini tidak akan terlaksana.

Tesis ini disusun dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pemerintahan serta sebagai referensi bagi penelitian dan kajian selanjutnya. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih

jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan.

Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi bagi pembaca dan para peneliti kedepannya.

Abdul Heri

Yogyakarta, 28 Juli 2025

DAFTAR ISI

STRATEGI PEMERINTAH KALURAHAN PAGERHARJO DALAM	
MENDORONG PEMBANGUNAN.....	i
HALAMAN PELAKSANAAN UJIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
INTISARI.....	xviii
ABSTRACT.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Kajian Literatur	10
C. Fokus Penelitian	18
D. Rumusan Masalah	19
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	19
F. Kerangka Konseptual	21
1. Pemerintah	21
2. Pembangunan.....	26
3. Strategi	33
BAB II METODOLOGI PENELITIAN.....	38

A. Jenis Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	38
C. Sumber Data	38
1. Data Primer	39
2. Data Sekunder	39
D. Teknik Pengumpulan Data	39
1. Observasi	40
2. Wawancara.....	41
3. Dokumentasi	42
E. Teknik Pemilihan Informan.....	43
F. Teknik Validasi Data	44
1. Kredibilitas (Credibility).....	45
2. Keteralihan (Transferability)	48
3. Ketergantungan (Dependability).....	48
4. Kepastian (Confirmability).....	49
G. Teknik analisis data	49
BAB III PEMBANGUNAN DI PAGERHARJO.....	53
A. Pembangunan di Kalurahan Pagerharjo	53
1. Visi Dan Misi Kalurahan Pagerharjo.....	55
2. Struktur Organisasi Kalurahan Pagerharjo	56
3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	63
4. Kondisi Geografis	74
5. Kondisi Demografis.....	78
6. Kondisi Ekonomi	82
B. Gambaran Program Inklusif Desa	92
1. Program Pembangunan Desa	92
2. Gambaran Umum Strategi Pembangunan Desa.....	102

BAB IV STRATEGI PEMERINTAH KALURAHAN	
PAGERHARJO DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN	110
A. Analisis Strategi Pemerintah Kalurahan dalam Mendorong Pembangunan.	110
1. Perumusan tujuan pembangunan Kalurahan.....	110
2. Perumusan pemahaman pemerintah Kalurahan terhadap lingkungan	132
3. Perumusan visi dan arah strategis	136
4. Perumusan tindakan strategi pemerintah Kalurahan	146
5. Perumusan pembelajaran strategis pemerintah Kalurahan	163
B. Pembahasan	171
D. Kebaruan.....	173
BAB V PENUTUP	174
A. Kesimpulan.....	174
B. Saran	175
C. Keterbatasan Penelitian	176
DAFTAR PUSTAKA	177
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	181
1. Surat Ijin Penelitian	181
2. Surat Keterangan telah melakukan penelitian	182
3. Panduan Wawancara.....	183
4. Daftar Dokumen	194
5. Daftar Observasi	194
6. Foto Wawancara Bersama Informan	195
7. Publikasi Jurnal.....	202
8. TOEFL	203

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Observasi Lapangan.....	40
Tabel 2.2 Daftar Informan.....	44
Tabel 3.2 Struktur organisasi pemerintah Kalurahan	58
Tabel 3.3 Nama pedukuhan Kalurahan Pagerharjo.....	60
Tabel 3.4 Jumlah penduduk	78
Tabel 3.5 Jumlah penduduk berdasarkan usia.....	79
Tabel 3.6 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan	80
Tabel 3.7 Mata Pencanharian penduduk	82
Tabel 3.8 Pendidikan formal	85
Tabel 3.9 Pendidikan formal keagamaan	86
Tabel 3.10 Sarana ibadah	87
Tabel 3.11 Sarana prasarana kesehatan.....	88
Tabel 3.12 Sarana olahraga	89
Tabel 3.13 Prasana wisata	90
Tabel 3.14 Lembaga ekonomi	91
Tabel 4.1 Data observasi	115
Tabel 4.2 Data observasi	121
Tabel 4.3 Data observasi	128
Tabel 4.4 Data observasi	135
Tabel 4.5 Data observasi	144
Tabel 4.6 Data observasi	150
Tabel 4.7 Data observasi	164

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Struktur organisasi pemerintah Kalurahan Pagerharjo	57
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Analisi Milles dan Huberman.....	55
Gambar 2.1 Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif (Miles dan Huberman 2009).....	51
Gambar 3.1 Peta Kalurahan Pagerharjo	76
Gambar 4.1 Cengkeh, kokoa, teh, vanili,dan kopi	112
Gambar 4.2 Gapoktan dan Ternak Kambing	113
Gambar 4.3 Pasar sempulur	114
Gambar 4.4 Rumah Pajang.....	115
Gambar 4.5 Puskesmas, postu dan sosialisasi kesehatan	117
Gambar 4.6 Gedung olahraga dan paud	119
Gambar 4.7 Prasarana	120
Gambar 4.8 Sosialisasi Bhabinkamtibnas	123
Gambar 4.9 Rapat pedukuhan	125
Gambar 4.10 Musrenbangdes.....	126
Gambar 4.11 Penyuluhan sistem pertanian tradisional	130
Gambar 4.12 Sawah	133
Gambar 4.13 Pak lurah turun tangan kerja bakti.....	138
Gambar 4.14 Kerja bakti jalan pedukuhan.....	139
Gambar 4.15 Budidaya dan produksi UMKM	140
Gambar 4.16 Anggaran infrastruktur pembangunan jalan	142
Gambar 4.17 Sosialisasi program pembangunan	144
Gambar 4.18 Mesin produksi dan edukasi petani kopi	147
Gambar 4.19 Musyawarah penyusunan RKP	152
Gambar 4.20 Rapat evaluasi kegiatan	154
Gambar 4.21 Pertemuan menggali aspirasi masyarakat.....	158
Gambar 4.22 Rencana pembangunan jalan	160

Gambar 4.23 Pembangunan jalan pertanian.....	165
Gambar 4.24 Pembangunan jalan usaha tani	168

INTISARI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam menyusun dan melaksanakan pembangunan, seperti keterbatasan sumber daya, kompleksitas permasalahan di tingkat desa, serta perlunya strategi yang tepat guna mencapai hasil pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kalurahan Pagerharjo dalam mendorong pembangunan desa secara menyeluruh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memahami strategi yang digunakan oleh Pemerintah Kalurahan Pagerharjo dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, serta verifikasi melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan lima aspek utama dalam strategi pembangunan yang diterapkan oleh Pemerintah Kalurahan Pagerharjo: (1) Tujuan pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas hidup, kemajuan ekonomi lokal, dan keadilan sosial. Tujuan ini dijabarkan ke dalam kebijakan dan program kerja yang terukur, dengan sasaran yang jelas sesuai dengan kondisi dan potensi Kalurahan; (2) Perubahan lingkungan pemerintah Kalurahan mengintegrasikan potensi sumber daya alam dan manusia ke dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan. Pendekatan ini dilaksanakan melalui pemanfaatan sumber daya lokal, pelatihan berkelanjutan, serta evaluasi berkala agar pembangunan yang dilakukan bersifat optimal dan berkelanjutan; (3) dalam melakukan pengarahannya pemerintah Kalurahan melakukan koordinasi lintas sektor, pemberian motivasi kepada pelaksana kegiatan, komunikasi yang terbuka, serta penyampaian kebijakan yang jelas agar seluruh elemen pelaksana pembangunan dapat bekerja secara sinergis dan efisien sesuai dengan visi-misi; (4) tindakan yang diambil Pemerintah Kalurahan Pagerharjo dalam melaksanakan kegiatan strategis seperti pembangunan infrastruktur dasar, penyuluhan sektor ekonomi seperti pertanian dan UMKM, serta penguatan tata kelola Kalurahan melalui komunikasi yang transparan dan pengambilan keputusan berbasis data dan kebutuhan nyata; (5) pembelajaran yang dimaksud adalah pemerintah Kalurahan secara aktif

melakukan evaluasi dan pembelajaran terhadap pelaksanaan program pembangunan. Strategi ini dilakukan melalui studi perbandingan, identifikasi masalah, dan penyesuaian kebijakan agar pelaksanaan pembangunan selalu relevan dengan dinamika lokal serta lebih akuntabel.

Kata kunci: Strategi, pembangunan, Kalurahan Pagerharjo

ABSTRACT

This study is motivated by the challenges faced by village governments in planning and implementing development, such as limited resources, the complexity of issues at the village level, and the need for appropriate strategies to achieve effective and sustainable development outcomes. Therefore, the researcher is interested in examining the strategies applied by the Pagerharjo Village Government in promoting comprehensive village development.

The objective of this study is to analyze and understand the strategies employed by the Pagerharjo Village Government in carrying out development within its jurisdiction. This research utilizes a qualitative descriptive approach. Data collection was conducted through observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis involved data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification through triangulation. The results of the study reveal five main aspects of the development strategy implemented by the Pagerharjo Village Government: (1) Development goals are directed towards improving quality of life, advancing the local economy, and achieving social justice. These goals are elaborated into measurable policies and work programs with clear targets aligned with the conditions and potentials of Pagerharjo Village; (2) In adapting to environmental changes, the village government integrates natural and human resource potentials into the planning and implementation of development policies. This approach is carried out through the utilization of local resources, continuous training, and periodic evaluation to ensure that development is optimal and sustainable; (3) In providing direction, the village government coordinates cross-sectorally, motivates activity implementers, maintains open communication, and delivers clear policies so that all elements involved in development work synergistically and efficiently in accordance with the vision and mission; (4) The actions taken by the Pagerharjo Village Government in implementing strategic activities include basic infrastructure development, economic sector extension such as agriculture and micro, small, and medium enterprises (MSMEs), and strengthening village governance through transparent communication and data-driven, needs-based decision-making; (5) Learning is actively conducted by the village government through

evaluation and reflective practices on program implementation. This strategy involves comparative studies, problem identification, and policy adjustments to ensure development implementation remains relevant to local dynamics and more accountable.

Keywords: Strategy, Development, Pagerharjo Village

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan Desa adalah suatu sistem yang dipimpin oleh kepala desa, didukung oleh perangkat desa, untuk menjalankan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa, juga dikenal dengan sebutan Kalurahan, didukung oleh perangkat Kalurahan sebagai elemen pelaksana Pemerintahan Kalurahan. Pemerintah Kalurahan merupakan bagian dari pemerintahan yang keberadaannya dibawah langsung oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kalurahan melayani dan menjadi pelopor dalam menggerak partisipasi masyarakat.

Penyelenggara pemerintahan Kalurahan perlu memiliki sikap keterbukaan dan tanggung jawab yang jelas terkait tugas dan fungsi mereka, yang menjadi ukuran bagi kemajuan Kalurahan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur prinsip-prinsip pelaksanaan pemerintahan desa pada pasal 24, yaitu: 1. kepastian hukum, 2. keteraturan dalam menjalankan pemerintahan, 3. keteraturan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, 4. keterbukaan, 5. proporsionalitas, 6. profesionalisme, 7. tanggung jawab, 8. efektivitas dan efisiensi, 9. kearifan lokal, 10. keragaman, dan 11. partisipasi. Maka dari itu, diperlukan manajemen pemerintahan yang baik untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemerintahan desa, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas layanan publik, dan daya saing di tingkat nasional. Agar tercapai tujuan tersebut tentu memerlukan kesadaran dari lini

pemerintah Kalurahan dan partisipasi dari masyarakat untuk lebih aktif dalam keikutsertaan dalam membangun Kalurahan.

Masyarakat adalah kumpulan orang yang saling berhubungan. Sebagai makhluk sosial, masyarakat memiliki kebiasaan, aturan, dan hukum yang sama, serta memiliki tujuan untuk hidup bersama. Masyarakat merupakan gabungan individu-individu yang bersatu dalam kehidupan bergotong-royong sebagai interaksi karena adanya kebutuhan dan juga dipengaruhi oleh keyakinan, pemikiran, dan kemauan yang sama. Selalu ada usaha dan upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier guna aktualisasi diri dan kelompok. Kebutuhan bersifat berkelanjutan dan bertahap, hal ini sering disebutkan sebagai kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah hal-hal yang sangat mendasar untuk hidup, seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Setelah kebutuhan-kebutuhan ini dipenuhi, seseorang bisa memenuhi kebutuhan yang lebih lanjut, yaitu kebutuhan sekunder dan tersier. (Wardani, 2023:11).

Tercapai kebutuhan yang menjadi prioritas atau tujuan utama dalam usaha masyarakat akan menjadi dasar semangat baru yang mendorong masyarakat untuk memenuhi kebutuhan prioritas berikutnya. Sehingga usaha untuk mencapai kebutuhan tidak akan pernah habis. Hal tersebut disebabkan karena kebutuhan dalam kehidupan bersifat dinamis menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Sehingga muncul keinginan masyarakat untuk selalu mengikuti perkembangannya.

Kalurahan memiliki kewenangan dalam menata dan mengelola semua kebijakan yang ada di Kalurahan, baik dari segi pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan. Peran pemerintah Kalurahan sangat diperlukan dalam mewujudkan perubahan dan pembangunan dalam

masyarakat Kalurahan. Kalurahan menjadi bagian yang teramat penting dalam mensukseskan program pemerintah pusat. Hal ini karena Kalurahan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga pola atau perilaku masyarakat yang menjadi kebiasaan bisa dipahami oleh pemerintah Kalurahan.

Lurah adalah pejabat pemerintah yang memiliki otoritas untuk mengelola kepentingan Kalurahan. Ia berperan sebagai pemimpin tertinggi dalam pemerintahan Kalurahan. Lurah yang dimaksud adalah Bapak Widayat, S.IP selaku kepala desa Pegerharjo Samigaluh Kabupaten Kulon Progo. Pegerharjo adalah sebuah kalurahan yang berada di Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta yang memiliki status istimewa. Pegerharjo adalah Kalurahan yang memiliki RT 87, RW, Pedukuhan 20 dengan jumlah Kepala Keluarga 1556 KK, jumlah laki-laki 2556 jiwa dan perempuan 2487 jiwa dengan total penduduk sebanyak 5043 jiwa.

Pembangunan adalah pencapaian penting dalam bentuk fisik yang menjadi program di suatu Kalurahan. Keberhasilan dalam pembangunan memang tidak dapat dipisahkan dari peran pemerintah Kalurahan dalam mendistribusikan anggaran serta kontribusi masyarakat dalam memberikan ide dan pemikiran. Hal ini membuat ada kesesuaian antara program dan kebutuhan warga. Dalam konteks ini, peran aktif masyarakat sangat diperlukan dalam berbagai aspek pembangunan di Kalurahan. Keterlibatan langsung warga dalam proses atau tahap pembangunan Kalurahan adalah ciri utama yang ideal dalam membangun Kalurahan.

Pembangunan adalah proses perubahan yang dilakukan dengan kesadaran serta perencanaan yang matang. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Undang-Undang No. 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa, dinyatakan bahwa pembangunan desa

harus melibatkan partisipasi dari masyarakat. Ini adalah cara pengelolaan pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat dalam diskusi, kesepakatan, dan kerja sama, yang merupakan nilai-nilai yang telah menjadi bagian budaya masyarakat Indonesia. Pasal 5 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Undang-Undang Tahun 2007 menjelaskan bahwa pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat memiliki ciri-ciri seperti perencanaan yang mencakup pemberdayaan dan keterlibatan warga. Pemberdayaan bertujuan meningkatkan kemampuan dan kemandirian individu dalam kehidupan sosial, sedangkan partisipatif merujuk pada peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa desa atau Kalurahan adalah sebuah komunitas hukum dengan batasan wilayah yang jelas, serta memiliki hak untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebiasaan yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi pembangunan Kalurahan merupakan proses peningkatan secara kapasitas dan mengayomi masyarakat terlibat untuk ikut ambil bagian dalam pembangunan. Ada usaha dan upaya yang selalu pemerintah Kalurahan lakukan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam ikut berkontribusi untuk mendorong pembangunan masih sangat minim, yang disebabkan oleh berbagai faktor yang sudah mulai melekat di dalam diri masyarakat. Dari mulai pemikiran partisipasi, dukungan dana, hingga pelaksanaan kegiatan. Dari sisi pemikiran, masyarakat tentunya memiliki keinginan untuk mengubah sistem pembangunan menjadi lebih baik. Namun, ada beberapa individu dari pemerintah Kalurahan dan pedukuhan yang kadang melakukan

penyimpangan, sehingga orang-orang yang berpikir kritis ini menjadi kehilangan fokus atau bahkan enggan untuk terlibat. Dalam hal keuangan, masyarakat yang sudah terbiasa menerima bantuan dari pemerintah menjadi merasa bahwa setiap ada kegiatan atau pembangunan yang memerlukan dukungan dari mereka, pasti sudah ada anggaran yang disiapkan sebelumnya. Dari sudut pelaksanaan, kepesertaan dan kerjasama yang mulai hilang disebabkan oleh waktu yang terbatas, pekerjaan yang tidak menentu, dan tidak kalah penting adalah bantuan dari pemerintah yang terus mengalir.

Peran pemerintah Kalurahan tentu sangat terbatas dalam menampung dari setiap aspirasi yang disarankan oleh masyarakat. Hal ini menjadi perhatian penting pemerintah Kalurahan dalam menyerap informasi yang diterima dari masyarakat. Sehingga perlu adanya strategi yang dibentuk oleh pemerintah Kalurahan untuk bisa mengakomodasi keperluan yang urgensi dimasyarakat. Paling tidak dari komunitas-komunitas yang kemudian menjadi parameter dalam menyerap aspirasi masyarakat terakomodasi. Agar pemerintah Kalurahan tidak salah tindak dalam mengambil kebijakan, Kalurahan Pagerharjo tentu harus mampu menginisiasi strategi-strategi yang tepat sasaran untuk memaksimalkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya guna.

Strategi pembangunan Kalurahan sebenarnya menjadi point utama pemerintah Kalurahan dalam mensejahterakan masyarakat. Pembangunan Kalurahan ditujukan untuk seluruh warga Kalurahan, dengan tujuan memanfaatkan potensi dan sumber daya alam yang tersedia. Hal ini tentunya melibatkan kerjasama antara semua penduduk, termasuk pemerintah Kalurahan dan masyarakat setempat.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan dalam masyarakat yang telah dibuat rencananya, meliputi banyak aspek untuk mencapai kemajuan di sektor ekonomi, modernisasi, pembangunan negara, kepedulian terhadap lingkungan, serta peningkatan kualitas hidup manusia. Secara keseluruhan, kita dapat menggambarkan pembangunan sebagai suatu langkah yang direncanakan dan dilakukan oleh birokrat perencana pembangunan untuk menciptakan perubahan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini melibatkan konsep perbaikan berkelanjutan dalam masyarakat dengan tujuan mencapai kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera. (Kartono, 2016: 3). Tujuan ini tentu menjadi cita-cita dari setiap penyelenggara pemerintahan. Tetapi pada kenyataannya masih banyak penyelenggara pemerintah yang belum mampu mewujudkannya dengan maksimal atau masih terdapat ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di wilayah Indonesia. Pemerintah daerah yang juga diberikan otonomi atau hak untuk melaksanakan pembangunan di daerahpun masih belum bisa dinikmati oleh masyarakat secara merata, secara khusus di pedesaan. Hal tersebut disebabkan belum tepat sasaran dalam pengalokasian pembangunan. Terkait hal tersebut perlu adanya strategi sebagai media pendukung dalam mengatasi permasalahan pembangunan di Kalurahan.

Pembangunan Kalurahan merupakan aspek yang sangat krusial dalam konteks wilayah Kalurahan. Lantaran pembangunan menjadi objek utama dalam mengukur tingkat kesejahteraan Kalurahan. Semakin bagus pembangunan di Kalurahan maka sudah bisa dipastikan bahwa Kalurahan tersebut dikategorikan sebagai Kalurahan makmur dan sejahtera. Sadar atau tidaknya masyarakat Kalurahan akan terdorong oleh keinginan untuk mengubah pola lama dengan kata lain ‘tertinggal’ menjadi Kalurahan maju. Akan tetapi pada kenyataannya Kalurahan masih memegang profil lama yang

menyandang status tertinggal dan miskin. Kendati demikian Kalurahan menjadi aktor utama dalam mendorong lajunya pertumbuhan ekonomi perkotaan. Maka sudah semestinya dalam startegi pembangunan pemerintah, Kalurahan memprioritaskan pada pembangunan Kalurahan dengan melibatkan pastisipasi masyarakat didalam berbagai kesepakatan bersama di Kalurahan Pagerharjo. Pembangunan akan menjadi lebih efisien apabila keterlibatan antara pemerintah dan masyarakat saling mengisi keterbatasan satu sama lain. Diawali dengan kajian masalah, solusi, perencanaan, penganggaran hingga eksekusi secara bersama-sama.

Tantangan masa kini yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat adalah regulasi yang begitu cepat. Terlebih dalam pembangunan. Masyarakat harus mampu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada. Pemerintah yang menjadi tolak ukur masyarakat juga mampu meyakinkan masyarakat dengan mengikuti perubahan, sehingga tetap eksis dalam menghadapi tantangan zaman sehingga pemerintah mampu mempermudah masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan pembangunan masyarakat.

Kemakmuran dan kesejahteraan adalah tugas yang penting bagi pemerintah Kalurahan yang harus dilakukan. Kesejahteraan menjadi tugas bersama antara pemerintah Kalurahan dan masyarakat. Untuk mensejahterakan masyarakat, pemerintah harus mampu menghadirkan pembangunan dari berbagai aspek yang memadai. Dalam proses pembangunan baiknya ada komunikasi yang baik dengan masyarakat, sehingga apa yang pemerintah kerjakan adalah jawaban dari kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya pembangunan akan membuahkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Proses pembangunan dalam pemerintah Kalurahan tidak bisa berjalan sendiri, memerlukan bantuan dari berbagai pihak, baik itu pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. Pihak ini kemudian saling bekerjasama dalam menyusun rencana pembangunan hingga merealisasikan secara bersama. Salah satunya di Kalurahan Pagerharjo adalah keterlibatan masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan Kalurahan. Keterlibatan ini adalah wujud nyata dari masyarakat atas kepedulian terhadap pembangunan yang akan dikerjakan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Tidak hanya ambil bagian dalam perencanaan, masyarakat juga ikut dalam mengevaluasi hasil kinerja dalam pembangunan. Untuk memastikan tingkat kegunaan pembangunan yang ada.

Kalurahan Pagerharjo dalam perencanaan pembangunan adalah hasil dari aspirasi masyarakat. Dalam perumusannya pemerintah Kalurahan bersama pedukuhan dan rt/rw Pagerharjo memberikan ruang dan waktu kepada masyarakat melalui musdal dan musdal untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Sehingga program pedukuhan tersampaikan ke tingkat Kalurahan dan koneksi antara masyarakat, pedukuhan dan Kalurahan saling berjalan dengan baik. Aspirasi ini kemudian menjadi program pokok Kalurahan dan apresiasi terhadap masyarakat membuahkan partisipan yang baik terhadap pembangunan. Masyarakat yang merasa diberikan tanggungjawab bersama Kalurahan akan dengan mudah bagi pemerintah dalam mendorong tingakat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Kalurahan Pagerharjo dalam memberikan ruang publik kepada masyarakat dengan tidak ikut campur dalam musyawarah pedukuhan atau rapat warga. Sehingga hasil dari musyawarah pedukuhan benar-benar kesepakatan masyarakat tanpa ada campur tangan oleh pemerintah

Kalurahan. Hasil dari kesepakatan bersama tidak lain adalah kepentingan dari masyarakat itu sendiri. Sehingga pembangunan bisa tersebar merata sesuai kebutuhan masyarakat.

Peneliti mencoba mengkaji tentang strategi pemerintah Kalurahan dalam mendorong pembangunan di Pagerharjo dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan potensi alam yang ada di Kalurahan tersebut. Kalurahan Pagerharjo adalah Kalurahan yang berbatas langsung dengan provinsi Jawa Tengah. Selain memiliki lokasi yang strategis, Kalurahan Pagerharjo juga memiliki potensi luar biasa untuk dimanfaatkan dalam sektor pertanian dan perkebunan. Di samping itu, Kalurahan Pagerharjo juga dikenal sebagai destinasi wisata populer dengan keindahan alam yang masih terjaga. Beberapa objek wisata yang masih terkenal hingga kini antara lain Kebun Teh Nglinggo, Puncak Suroloyo, Grojogan Watu Jonggol, Gunung Jaran Nglinggo, dan Bukit Ngisis. Potensi ini seharusnya menjadi pendapatan asli daerah untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan trobosan strategi dalam partisipasi masyarakat tentu akan lebih meningkatkan wawasan masyarakat dan keikutsertaan masyarakat dalam mengelola potensi yang ada sehingga bisa meningkatkan penghasilan daerah. Penghasilan daerah yang tinggi tentu sangat membantu dalam pembangunan.

Berdasarkan paparan masalah yang disampaikan dalam latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih dengan berfokus pada strategi pemerintah Kalurahan dalam mendorong pembangunan di Pagerharjo, kapenewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut maka peneliti ini akan mengarah pada salah satu 5G Mahzab Timoho Ilmu Pemerintahan yaitu perspektif *Government*, yang dilihat dari perbuatan pemerintah dalam merancang strategi dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. *Government* ialah organisasi yang memiliki kewewenangan dalam merumuskan dan melaksanakan hukum serta peraturan di suatu wilayah tertentu. Selain itu, pemerintah juga berfungsi sebagai penyedia layanan yang memastikan lembaga-lembaga pemerintahan berjalan dengan baik dan unit-unit pemerintahan, baik internal maupun eksternal, beroperasi dengan efektif demi kepentingan warganya.

B. Kajian Literatur

Penelitian ini bukan satu-satu penelitian tentang Strategi Pemerintah Kalurahan Pagerharjo Dalam Mendorong Pembangunan. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik berkaitan dengan strategi pemerintah desa dalam mendorong pembangunan, diantaranya:

Kasmira, K., Alyas, A., & Sudarmi, S. (2020). *Strategi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Gowa*. Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP), 1(3), 818-833. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara yang digunakan oleh pemerintah dalam membangun jalan di Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan cara mengumpulkan data yang dipakai meliputi pengamatan, wawancara, dan pengumpulan dokumen. Dalam penelitian ini, terdapat lima orang yang memberikan informasi, yaitu Kepala Bidang Bina Marga, Kepala Seksi Pembangunan atau Peningkatan Jalan, Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, serta dua perwakilan dari masyarakat atau pengguna jalan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan

teknik analisis data yang mencakup pengurangan data, penyajian data, dan verifikasi. Penekanan data yang digunakan termasuk triangulasi sumber, triangulasi cara, serta triangulasi waktu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa usaha pemerintah dalam membangun infrastruktur jalan di Kabupaten Gowa telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari kualitas sumber daya manusia, efektivitas, dan pencapaian tujuan yang optimal, tanpa pemborosan, serta mampu menjalankan tugas dengan tepat dan akurat. [.https://ojs3.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/3737](https://ojs3.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/3737). Diakses tanggal 21 Juli 2025.

Adiwidjaja, I. tahun 2019, dengan judul “*Strategi Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Torongrejo Kota Batu*” dari Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang. Pembangunan desa menjadi perhatian utama dalam program pemerintah daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah di tingkat desa aktif memberikan dorongan serta gagasan-gagasan baru untuk meningkatkan rasa percaya diri warga agar ikut serta langsung dalam proses pembangunan di desa. Keberhasilan dalam pembangunan adalah sasaran utama pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan cara pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di sektor pembangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan informasi melalui wawancara, pengamatan, dan dokumen. Data dianalisis menggunakan triangulasi data, dan keabsahan informasi diuji melalui teknik triangulasi. Pelaksanaan strategi sudah berjalan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan pembangunan terus meningkat setiap tahunnya, sehingga masyarakat dapat merasakan perubahan yang efektif dan efisien. Pencapaian tujuan dan

keberhasilan dalam pembangunan desa memberi dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Penelitian ini menjelaskan secara garis besar tentang upaya pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat dengan tidak secara detail, dalam faktor penghambat hanya disebutkan atau dipengaruhi oleh SDM saja, sementara masih banyak indikator lain yang mempengaruhinya.

<https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1722/1257>. Diakses tanggal 25 juni 2025.

Gustiman, Y. tahun 2021, dengan judul *“Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”* dari Universitas Islam Kuantan Singing Riau. Penelitian ini berasal dari masalah rendahnya keterlibatan warga dalam pembangunan Desa Jaya Kopah, yang berada di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi. Pemerintah desa telah berusaha melalui pembuatan rencana untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali dan menjelaskan berbagai rencana yang diterapkan oleh pihak pemerintah desa guna meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Jaya Kopah. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data mencakup pengamatan, wawancara, dan pengumpulan dokumen, yang terdiri dari data primer dan sekunder. Jenis penelitian ini adalah survei dengan pendekatan deskriptif dan analisis kualitatif. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan sudah berjalan dengan cukup baik. Berdasarkan temuan tersebut, penulis merekomendasikan agar hak dan kewajiban pemerintah Desa Jaya Kopah dapat ditingkatkan secara maksimal di masa mendatang. Penelitian ini tidak menjelaskan hambatan

atau kendala dalam merancang dan melaksanakan strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa.

<https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/1765> Diakses tanggal 25 Juni 2025

Kodrianingsih, W. L., Rispawati, R., & Alqadri, B tahun 2023 "*Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan di Desa Aikmel*", dari Universitas Mataram Indonesia. Penelitian ini membahas tentang strategi pemerintah Desa Aikmel dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan strategi tersebut. Fokus penelitian mencakup: (1) strategi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, (2) tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dan (3) faktor-faktor yang menghambat dan mendukung keberhasilan strategi pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah desa untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat telah dilaksanakan dengan baik. Beberapa strategi untuk mengatasi hambatan termasuk mengundang masyarakat secara langsung agar mereka terlibat dan memberikan masukan tentang potensi yang dimiliki dalam musyawarah. Selain itu, sosialisasi dilakukan untuk memotivasi dan menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pendekatan dan pembinaan juga ditingkatkan agar masyarakat mau secara sukarela menyumbangkan tenaga, alat, atau dana. Penelitian ini tidak menjelaskan kendala yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan strategi.

<http://www.jiip.stkipyapisdompnu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/2459>
Diakses tanggal 25 Juni 2025

Djawa, A. M. B., Hardianto, W. T., & Firdausi, F tahun 2022, dengan judul “*Strategi Pemerintah Desa Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Mewujudkan Pembangunan Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang*” dari Universitas Tribhuwana Tungga Dewi Malang. Karakteristik utama dari penelitian ini bersifat deskriptif, dengan informan utama yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pembangunan, dan warga desa. Data primer diperoleh dari mereka, sedangkan data sekunder mencakup dokumen hukum seperti peraturan, buku-buku, dan penelitian lain yang relevan. Peneliti menggunakan metode triangulasi dan kualitatif dalam menganalisis penelitian ini, berdasarkan prinsip kecukupan dan kesesuaian. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat sangat bersemangat, dengan budaya gotong-royong yang kuat, terutama dalam kegiatan seperti musyawarah desa. Saat ini, keterlibatan publik dalam pembangunan desa berjalan dengan baik, dengan kolaborasi yang erat antara warga, pemerintah desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. Masyarakat aktif terlibat dalam kegiatan pembangunan dan terjun langsung dalam proses yang dilakukan oleh pemerintah desa.

<https://rinjani.unitri.ac.id/handle/071061/2308> Diakses tanggal 25 Juni 2025

Mono, A., & Samaloisa, R. (2022), dengan judul “*Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman*”, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Penelitian ini membahas partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kalurahan Condongcatur, yang bertujuan untuk mendorong warga agar terlibat dalam pengembangan desa mereka secara aktif. Peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai partisipasi masyarakat di wilayah tersebut, yang terletak di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk menguraikan fenomena ini, studi ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara dan pengamatan, serta pemilihan narasumber sesuai dengan tujuan dari penelitian. Secara keseluruhan, pemerintah Kalurahan Condongcatur telah menyadari akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan setiap tahun. Meskipun partisipasi masyarakat cukup aktif, mereka masih belum bisa menyediakan data dan informasi yang lengkap. Selain itu, pemerintah Kalurahan juga menghadapi kendala, seperti keterbatasan anggaran dan kurangnya kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan.

<http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/259>Diakses tanggal 25 Juni 2025.

Se, H., Mea, M. H. C. D., & Sedi, M. E. (2021), dengan judul *“Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Sobo Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada”*, dari Universitas Flores. "Strategi Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Warga dalam Pembangunan di Desa Sobo, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada," dari Universitas Flores. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui cara yang diterapkan oleh pemerintah Desa Sobo dalam mendorong partisipasi warga dalam proses pembangunan desa, yang akan diteliti menggunakan metode SWOT. Metode yang dipakai adalah deskriptif kualitatif, dengan cara mengumpulkan data melalui pengamatan, wawancara, dan pengumpulan dokumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi yang harus diambil untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah strategi SO, di mana pemerintah desa harus memberikan kesempatan kepada warga dalam forum musyawarah desa dan dusun. Ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi

yang baik antara pemerintah dan masyarakat, mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pembangunan desa, serta menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan bersama yang berkaitan dengan proses pembangunan.

<https://arsip-journal.uin-alaudidin.ac.id/index.php/assets/article/view/21408>

Diakses tanggal 25 Juni 2025.

Handayani, S. (2022), dengan judul *“Strategi Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan dan Partisipasi Masyarakat Desa”*, dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kedungjaran, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, karena desa tersebut telah mencapai berbagai prestasi di tingkat kecamatan, kabupaten, dan bahkan provinsi, yang sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala desa. Penelitian ini untuk memahami serta menggambarkan strategi kepemimpinan yang digunakan oleh kepala desa dalam meningkatkan pembangunan dan keterlibatan masyarakat. Metode yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif, dengan cara pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dokumentasi, serta observasi. Informan dipilih melalui purposive sampling, dengan kepala desa sebagai informan utama, didampingi oleh perangkat desa, masyarakat, dan kelompok tani lokal. Analisis data dilaksanakan dengan cara yang interaktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi kepemimpinan kepala desa dalam proses pembangunan mencakup pembentukan musyawarah desa yang efektif, peka terhadap kebutuhan masyarakat, serta memberikan dorongan dan inspirasi kepada staf dan warga. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa warga Desa Kedungjaran perlu tetap mandiri dan terus melanjutkan pembangunan dengan menjalankan program-program yang baik yang telah diinisiasi oleh kepala desa. Kepala Desa dan Pemerintah

Desa Kedungjuran dianjurkan untuk terus menerapkan gaya kepemimpinan yang baik dan sejalan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat, sembari memberikan perhatian khusus pada sektor pertanian.

<https://scholar.archive.org/work/z2hhwujt55b77ee5ddy4edjgni/access/wayback/http://jurnal.unpad.ac.id/sawala/article/download/26221/pdf> Diakses tanggal 25 Juni 2025.

Kiyato, P. L. (2024). Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Program Pembangunan (Studi Kasus di Desa Tepisari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo). Tujuan dari studi ini adalah untuk memahami cara yang digunakan oleh Pemerintah Desa Tepisari dalam meningkatkan partisipasi warga dalam program pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Desa Tepisari. Proses analisis data dilakukan dalam tiga tahap: pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori tentang strategi pemerintah yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan diterapkan dalam analisis penelitian ini. Penelitian ini memanfaatkan wawancara dan analisis dokumen untuk mengumpulkan data. Proses pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Metode triangulasi sumber digunakan untuk memeriksa keabsahan data. Pemerintah Desa Tepisari menerapkan lima cara untuk meningkatkan partisipasi warga dalam program pembangunan desa. Pertama, pemerintah desa bersikap terbuka kepada masyarakat. Kedua, cara komunikasi yang digunakan oleh pemerintah desa. Ketiga, pengembangan keterampilan dan kapasitas manusia. Keempat, terjalinnya hubungan yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat. Kelima, melibatkan harapan masyarakat dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, dan penilaian proses pembangunan desa. Dalam pelaksanaannya, ada tantangan yang dihadapi seperti keterbatasan anggaran

dan kurangnya partisipasi orang-orang yang bekerja di luar daerah sehingga mereka tidak bisa berkontribusi dengan aktif dalam pengajuan usulan, kegiatan, dan pengambilan keputusan. Cara yang digunakan oleh Pemerintah Desa Tepisari sejalan dengan pemikiran Geoff Mulgan tentang strategi pemerintahan yang menekankan pentingnya inovasi, partisipasi masyarakat, keterbukaan, akuntabilitas, serta pemberdayaan lokal sebagai elemen penting untuk meningkatkan kinerja dan dampak positif pemerintahan dalam melayani masyarakat.

<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/113057/> Diakses tanggal 25 Juni 2025

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini memiliki cakupan yang cukup luas dalam kajian kebijakan publik dan pembangunan daerah, khususnya pada tingkat pemerintahan Kalurahan. Oleh karena itu, untuk menjaga kedalaman dan ketajaman analisis, fokus penelitian ini diarahkan pada strategi yang dijalankan oleh Pemerintah Kalurahan Pagerharjo dalam mendorong pembangunan yang berada di Kapenewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini secara khusus akan mengeksplorasi dan menganalisis:

1. Perumusan tujuan pembangunan Kalurahan, analisis strategi yang digunakan oleh pemerintah Kalurahan dalam mendorong pembangunan, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip kebaikan bersama.
2. Perumusan pemahaman pemerintah Kalurahan terhadap kondisi lingkungan internal dan eksternal serta pengaruhnya terhadap strategi pembangunan.

3. Perumusan Visi dan Arah Strategis, menganalisis keberadaan visi jangka panjang serta konsistensinya dalam dokumen perencanaan Kalurahan dan instruksi pemerintah Kalurahan dalam eksekusi pembangunan.
4. Perumusan tindakan strategis pemerintah Kalurahan Pagerharjo dalam mendorong pembangunan melalui program, kebijakan, dan inisiatif nyata.
5. Perumusan pembelajaran strategis pemerintah Kalurahan Pagerharjo dalam melakukan refleksi, evaluasi, dan penyesuaian terhadap strategi pembangunan yang diterapkan.

Dengan fokus ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana strategi pemerintah Kalurahan berkontribusi dalam proses pembangunan lokal, serta mengidentifikasi praktik-praktik baik (*best practices*) yang dapat direkomendasikan untuk diterapkan di wilayah lain dengan karakteristik serupa.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu;

1. Bagaimana Strategi Pemerintah Kalurahan dalam Mendorong Pembangunan di Kalurahan Pagerharjo Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Kalurahan Pagerharjo dalam mendorong pembangunan lokal, dengan menggunakan pendekatan strategi sektor publik yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan (2009). Menurut Mulgan, strategi publik yang efektif tidak hanya berfokus pada penyusunan rencana, tetapi harus

dilandaskan pada pemahaman menyeluruh terhadap tujuan bersama, konteks lingkungan, arah kebijakan yang jelas, tindakan konkret, serta pembelajaran berkelanjutan.

Tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

a) Untuk mendeskripsikan strategi Pemerintah Kalurahan Pagerharjo dalam mendorong pembangunan, ditinjau melalui lima dimensi strategis menurut Mulgan:

- 1) Tujuan (*Purpose*): Mengkaji sejauh mana tujuan pembangunan yang dirumuskan pemerintah Kalurahan mencerminkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada kebaikan bersama.
- 2) Lingkungan (*Environment*): Menganalisis bagaimana pemerintah Kalurahan memahami dan merespons kondisi lingkungan strategis, baik internal (kekuatan dan kelemahan desa) maupun eksternal (kebijakan pemerintah daerah, tantangan geografis, dan sosial).
- 3) Arah (*Direction*): Menelusuri kejelasan arah atau visi jangka panjang yang ditetapkan sebagai panduan pembangunan desa.
- 4) Tindakan (*Action*): Mengidentifikasi program, kebijakan, dan inisiatif nyata yang diambil sebagai wujud dari strategi pembangunan.
- 5) Pembelajaran (*Learning*): Menggali sejauh mana pemerintah desa melakukan refleksi, evaluasi, dan penyesuaian terhadap strategi yang diterapkan.

Melalui analisis berbasis teori Geoff Mulgan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan aplikatif tentang bagaimana strategi Kalurahan dapat dirancang dan

dijalankan secara berkelanjutan, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Akademis

- 1) Menerapkan Ilmu Pemerintahan yang telah ditempuh selama Pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan kajian ilmiah khususnya di bidang pemerintahan yang berkaitan dengan strategi pemerintah dalam mendorong pembangunan Kalurahan.

b) Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dapat diberikan melalui penelitian ini yaitu; memberikan manfaat bagi pemerintah Kalurahan dan masyarakat dalam upaya peningkatan pembangunan di Kalurahan Pagerharjo Kapenewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo dengan strategi yang tepat sasaran dan berdaya guna maksimal serta dapat menjadi acuan dalam mendorong pembangunan di tingkat Kalurahan.

F. Kerangka Konseptual

1. Pemerintah

Secara konseptual, penyelenggaraan pemerintahan memiliki dua peran utama, yakni fungsi regulatif dan fungsi pelayanan publik. Dalam konteks implementasi kedua fungsi tersebut, tidak ada satu pun negara yang terlepas dari bentuk dan luas wilayahnya mampu melaksanakan pemerintahan secara terpusat secara berkelanjutan. Menurut Supardal

(2021), desentralisasi adalah proses pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom agar daerah tersebut dapat mengatur dan mengelola urusannya sendiri. Diatur berarti daerah harus membuat aturan (peraturan daerah). Mengelola, berarti wilayah otonom wajib menjalankan pemerintahan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Dengan demikian, penyerahan beberapa kekuasaan dan tanggung jawab pemerintah kepada daerah merupakan akibat yang wajar sekaligus langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemerintahan secara keseluruhan.

Pemerintah tidak dibentuk untuk memenuhi kepentingan pribadinya, melainkan untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Pernyataan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 yang berkaitan dengan Administrasi Pemerintahan pada Pasal 1 ayat (2). Di sana dijelaskan bahwa tugas pemerintah meliputi pengaturan, pelayanan, pengembangan, pemberdayaan, dan perlindungan.

Definisi pemerintahan desa dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (2), yang menyebutkan bahwa pemerintahan desa adalah pelaksanaan tugas pemerintahan dan layanan untuk kepentingan masyarakat setempat dalam konteks sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kasmira (2020) berpendapat bahwa pemerintah merupakan suatu entitas yang terdiri dari sekelompok individu yang memiliki peran strategis dalam suatu negara, dengan kewenangan sah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kekuasaan itu diterapkan melalui proses pengambilan pilihan dan langkah konkret untuk menjaga dan memperbaiki taraf hidup komunitas.

Penyelenggara desa yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa memiliki empat bidang dan hak dalam pengelolaan; pemerintahan desa, pembangunan desa, pengelolaan masyarakat desa, dan peningkatan kapasitas masyarakat desa. Pandangan ini menegaskan bahwa desa, sebagai suatu organisasi masyarakat hukum, diatur serta dikelola oleh lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menjalankan urusan pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

Pemerintah desa bertanggung jawab melaksanakan otonomi pedesaan. Karena kedekatannya dengan arena, masyarakat pedesaan biasanya dapat berhubungan langsung dan terlibat dalam proses pemerintahan dan pembangunan ditingkat desa. Pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa menitikberatkan pada pendekatan yang mengedepankan pengakuan, fasilitasi, dan pemberdayaan guna menjamin efektivitas kinerjanya. Pemerintah desa berperan dalam menjamin keberadaan institusi, keterlibatan masyarakat, serta proses pemberdayaan yang telah berkembang di lingkungan desa.

Sesuai dengan UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, dalam menjalankan pemerintahan desa, pemerintah desa wajib mengikuti asas-asas yang diatur dalam Pasal 24 UU tersebut:

a) Asas Kepastian Hukum

Prinsip Kepastian Hukum adalah asas dalam negara yang mengutamakan landasan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta menekankan pentingnya kesesuaian dan keadilan dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemerintahan desa.

b) Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan

Asas tertib penyelenggaraan pemerintah merupakan prinsip yang menjadi dasar bagi keteraturan, keselarasan, serta keseimbangan dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa.

c) Asas Tertib Kepentingan Umum

Asas Kepentingan Umum mengacu pada prinsip yang memberikan prioritas kepada kesejahteraan masyarakat secara inklusif, fleksibel, dan berdasarkan penilaian.

d) Asas keterbukaan

Pemerintah desa harus siap menerima hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan adil mengenai kegiatan pemerintahan desa. Dalam menerapkan prinsip ini, ketaatan terhadap peraturan hukum yang berlaku menjadi hal yang sangat penting.

e) Asas Proporsionalitas

Asas Proporsionalitas mengacu pada prinsip yang menitikberatkan pada keadilan antara hak dan tugas pemerintah. Asas Profesionalitas adalah prinsip yang menekankan pentingnya keahlian yang didasarkan pada etika dan peraturan yang berlaku oleh penyelenggaraan pemerintahan desa.

f) Asas Profesionalitas

Asas Profesionalitas adalah prinsip yang memberikan prioritas pada kemampuan khusus serta prinsip etika dan hukum yang berlaku yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.

g) Asas Akuntabilitas

Prinsip ini menegaskan bahwa semua kegiatan dan hasil akhir dari pelaksanaan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada penduduk desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

h) Asas Efektivitas dan Efisiensi

Asas efektivitas adalah prinsip yang menekankan bahwa setiap tindakan yang diambil harus mampu mewujudkan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat desa.

i) Asas Efisiensi

Asas efisiensi adalah prinsip yang mengatur bahwa setiap tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan masyarakat.

j) Asas Kearifan Lokal

Asas kearifan lokal merujuk pada pentingnya mengedepankan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dalam upaya melestarikan serta mengelola lingkungan hidup di wilayah desa.

k) Asas Keberagaman

Prinsip keberagaman mencakup pengakuan dan penghormatan terhadap berbagai sistem nilai yang terdapat dalam masyarakat desa, sambil tetap mengedepankan nilai-nilai bersama yang menjadi landasan kehidupan sebagai bangsa dan negara.

l) Asas Partisipatif

Asas partisipatif menitikberatkan bahwa setiap individu dalam masyarakat diberi dorongan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung ataupun tidak langsung oleh penyelenggara pemerintah desa.

Pemerintah desa dilihat sebagai bagian pemerintahan yang paling kecil, paling rendah, paling dekat, dan paling berkaitan langsung dengan masyarakat, dari perspektif pemerintah. Kecil di sini berarti bahwa area dan tanggung jawab yang dipegang oleh desa memiliki luas atau ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan organisasi pemerintahan kabupaten atau kota, provinsi, atau pemerintah pusat. Desa berada di tingkat terbawah dalam struktur hierarki pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, meskipun berada di tingkat paling rendah, desa tidak berperan sebagai bagian bawahan dari kabupaten atau kota, dan kepala desa tidak berada di bawah bupati atau walikota. Desa memiliki posisi yang berbeda dari sistem pemerintahan daerah kabupaten atau kota, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 200 UU No. 32 Tahun 2004. Ini juga diperkuat dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa desa berada dalam daerah kabupaten atau kota. Ini sejajar dengan kehadiran kabupaten atau kota yang berada dalam lingkup provinsi.

2. Pembangunan

Pembangunan adalah serangkaian proses perubahan yang bertujuan untuk menciptakan situasi yang lebih baik dalam banyak aspek kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya, untuk meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup manusia. Selain itu, pembangunan merupakan proses perubahan yang dilakukan secara terencana dan terstruktur melalui berbagai usaha yang telah diprogram. (Adiwidjaja, I., 2019).

Menurut Kartono (2016), pembangunan diartikan sebagai suatu proses perencanaan sosial yang dilakukan oleh para birokrat perencanaan pembangunan demi menciptakan perubahan yang bertujuan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konseptualisasi pembangunan dapat dipahami sebagai proses perbaikan yang berlangsung secara terus-menerus dalam masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera.

Menurut Simamora (2006:67), pembangunan diartikan sebagai sebuah proses yang mengarah pada transformasi cara hidup masyarakat yang memungkinkan pencapaian nilai-nilai kemanusiaan dengan lebih baik, memberikan masyarakat kekuatan lebih dalam mengatur lingkungan mereka dan tujuan politiknya, serta memungkinkan individu untuk memiliki kendali yang lebih terhadap diri mereka sendiri. Menurut Sahroni (2004:59), pembangunan adalah sebuah proses terorganisir yang setidaknya memiliki tiga komponen. Pertama, ada input yang merupakan bahan yang akan diolah; Kedua, ada proses pengolahan yang berfungsi sebagai cara untuk mengolah bahan yang diterima; Ketiga, terdapat output yang merupakan hasil dari proses pengolahan tersebut. Proses terorganisir dalam suatu sistem akan berinteraksi dengan bagian kecil dan sistem lain, termasuk juga dengan lingkungan global.

Pembangunan merupakan proses yang bersifat kompleks dan mencakup berbagai aspek, seperti perubahan dalam struktur sosial, pergeseran sikap masyarakat, penguatan lembaga-lembaga nasional, serta peningkatan aktivitas ekonomi. Tujuannya mencakup pengurangan ketimpangan sosial dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, pembangunan dimaknai sebagai sebuah proses yang berjalan tanpa henti, dilakukan dengan langkah-langkah kecil dan direncanakan dengan baik, dengan maksud untuk menghadirkan perubahan yang baik dari

kondisi sebelumnya, yang meliputi semua aspek kehidupan, baik yang bersifat fisik maupun yang nonfisik (mental).

Menurut Kartono, D. T., & Nurcholis, H. (2016), Pokok pemikiran dalam pembangunan berfokus pada cita-cita keadilan sosial. Untuk itu, pembangunan membutuhkan proses yang teratur dan langkah-langkah yang jelas agar hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan efisien. Langkah-langkah tersebut harus dapat menjangkau berbagai bidang, baik dari segi ekonomi sebagai indikator kekayaan fisik, kesejahteraan sosial, maupun keadilan sosial. Pembangunan pada dasarnya mencakup dua unsur utama: pertama, aspek material yang ingin dihasilkan dan didistribusikan, dan kedua, aspek manusia sebagai penggerak utama yang bertindak sebagai pelaku pembangunan. Pada akhirnya, fokus utama pembangunan haruslah tertuju pada pengembangan kualitas manusia itu sendiri, yakni manusia yang kreatif. Untuk mencapai kreativitas tersebut, seseorang perlu merasakan kebahagiaan, rasa aman, serta terbebas dari ketakutan. Pembangunan tidak hanya berkaitan dengan produksi dan penyebaran barang-barang fisik; pembangunan harus menciptakan suasana di mana manusia dapat mengembangkan kreativitasnya (Budiman, 1995: 13-14).

Menurut Ariadi (2019), pembangunan desa adalah metode dan pendekatan pembangunan yang dirancang oleh negara, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki guna membangun kehidupan masyarakat pedesaan. Pembangunan desa merupakan tanggung jawab dan kewajiban politik negara dalam rangka mengatasi persoalan sosial dan ekonomi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta

menciptakan lingkungan yang mendorong lahirnya inisiatif dan partisipasi swadaya dari masyarakat desa.

Pembangunan desa memegang peranan strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional secara menyeluruh. Keberhasilannya sangat menentukan tercapainya tujuan pembangunan secara luas. Sesuai dengan Pasal 78 ayat 1, 2, dan 3 dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tujuan dari pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa dan kualitas hidup manusia, sekaligus mengurangi kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar, membangun infrastruktur, mengembangkan potensi ekonomi lokal, dan mengelola sumber daya alam serta lingkungan secara berkelanjutan. Proses pembangunan desa terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, dengan penekanan pada nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kerja sama untuk mencapai perdamaian dan keadilan sosial.

Definisi pembangunan desa yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pembangunan Desa, diuraikan sebagai suatu usaha untuk memperbaiki kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa dengan tujuan mencapai kesejahteraan yang optimal. Peraturan Menteri dalam Negeri Pasal 6 Ayat (1) dinyatakan bahwa “Rancangan RPJM Desa mencakup visi dan misi Kepala Desa, kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Rencana kegiatan untuk pembangunan desa terbagi menjadi beberapa bagian penting, yaitu manajemen pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,

peningkatan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dari keempat aspek ini, pemerintah desa berhak untuk melaksanakan dan menjalankan sesuai dengan peraturan yang ada. Keempat aspek tersebut telah tercantum dalam Peraturan Menteri dalam Negeri pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 sebagai berikut;

- 1) Bidang penyelenggaraan pemerintah desa, antara lain;
 - a) Menentukan dan menegaskan batas wilayah desa
 - b) Mengumpulkan data tentang desa
 - c) Merancang tata ruang untuk desa
 - d) Mengadakan musyawarah di tingkat desa
 - e) Mengelola informasi yang berkaitan dengan desa
 - f) Mengatur perencanaan untuk desa
 - g) Melaksanakan evaluasi mengenai kemajuan perkembangan pemerintahan
 - h) Menjalankan kerjasama antar desa
 - i) Membangun sarana dan prasarana untuk kantor desa
 - j) Kegiatan lain yang disesuaikan dengan kondisi desa.
- 2) Bidang pelaksanaan pembangunan desa, antara lain;
 - a) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan;
 - a. Pengikatan kapal
 - b. Jalur desa
 - c. Pembangkit listrik dari sistem mikrohidro
 - d. Area tempat tinggal warga desa
 - e. Fasilitas desa lainnya sesuai keadaan desa
 - b) Pembangunan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
 - a. Air yang bersih untuk kebutuhan desa

- b. Kebersihan lingkungan
- c. Layanan kesehatan di desa seperti pusat kesehatan masyarakat
- c) Pengembangan, penggunaan, dan perawatan fasilitas pendidikan dan kebudayaan;
 - a. Perpustakaan komunitas
 - b. Sekolah untuk anak usia dini
 - c. Pusat pelatihan/aktivitas belajar masyarakat
 - d. Peningkatan dan pengelolaan tempat berkesenian
- d) Peningkatan kegiatan usaha yang menghasilkan serta pembangunan, penggunaan, dan perawatan fasilitas dan infrastruktur ekonomi;
 - a. Pasar komunitas
 - b. Pendirian dan peningkatan BUMDes
 - c. Peningkatan modal untuk BUMDes.
 - d. Penanaman bibit tanaman pangan
 - e. Proses penggilingan padi.
 - f. Gudang desa
 - g. Pembangunan lahan untuk kegiatan pertanian
 - h. Fasilitas dan infrastruktur yang sesuai dengan keadaan desa.
- e) Perlindungan lingkungan hidup
 - a. Penanaman pohon
 - b. Pelaksanaan pembuatan terasering
 - c. Perawatan hutan bakau
 - d. Penjagaan sumber air
 - e. Pembersihan area sungai
 - f. Melindungi terumbu karang

- g. Kegiatan lain yang disesuaikan dengan keadaan desa.
- 3) Sektor pengembangan kemasyarakatan, antara lain:
- a) Pengembangan organisasi masyarakat
 - b) Pengelolaan keamanan dan keteraturan.
 - c) Pengembangan hubungan harmonis antar pemeluk agama
 - d) Penyediaan fasilitas dan infrastruktur untuk kegiatan olahraga
 - e) Pengembangan lembaga adat
 - f) Pengembangan seni serta aspek sosial dan budaya dalam masyarakat.
 - g) Aktivitas lain yang sesuai dengan keadaan desa.
- 4) Sektor peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain;
- a) Sebuah program pelatihan di sektor ekonomi, pertanian, perikanan, dan dagang.
 - b) Pelatihan tentang penerapan teknologi yang tepat dan efisien.
 - c) Pendidikan, pelatihan, dan pendampingan bagi Kepala Desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa.
 - d) Peningkatan kemampuan masyarakat;
 - a. Tenaga penggerak pemberdayaan masyarakat pedesaan
 - b. Kelompok yang fokus pada kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk atau jasa.
 - c. Komunitas perempuan
 - d. Kumpulan petani
 - e. Komunitas para nelayan
 - f. Kumpulan para pengrajin
 - g. Kumpulan pengawas dan pelindung anak
 - h. Kelompok anak muda

Pasal 78 bagian 1 dan 2 dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa menyatakan bahwa tujuan dari pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk desa dan kualitas hidup mereka, serta mengurangi angka kemiskinan. Hal ini dilaksanakan dengan memenuhi kebutuhan dasar, membangun sarana desa, dan menggunakan sumber daya alam serta ekologi dengan cara yang berkelanjutan..

3. Strategi

Tjiptono (2006:3) memberikan pemahaman tentang strategi yaitu berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategia* yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Secara umum, kata strategi awalnya dikenal dalam sisi militer, yaitu sebagai cara untuk mencapai sukses dalam perang dengan menggunakan kekuatan militer sebaik mungkin. Dalam perkembangannya, banyak ahli dari berbagai bidang memberikan pandangan yang beragam mengenai makna strategi. Meskipun berbeda dalam sudut pandang, pada dasarnya seluruh definisi tersebut mengarah pada esensi yang sama, yaitu sebagai upaya untuk mencapai tujuan dengan cara yang efektif dan efisien.

Menurut David (2011:18-19), strategi merupakan sarana yang digunakan bersama dengan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. Selanjutnya, Bintoro (1982) berpendapat bahwa strategi adalah kumpulan langkah-langkah (kebijakan) yang direncanakan dengan tepat untuk mencapai tujuan dalam mengatasi masalah, di mana dalam strategi tersebut terdapat metode dan teknik. Wheelen dan Hunger (2012) menyatakan bahwa strategi adalah kumpulan keputusan manajerial dan mencerminkan tindakan pengambilan keputusan jangka panjang dalam suatu perusahaan. Ini meliputi pemeriksaan kondisi di

luar dan di dalam, penyusunan rencana, pelaksanaan rencana, evaluasi, serta pengawasan.

Menurut Rangkuti (2013:183) berpendapat bahwa strategi adalah perencanaan induk yang komprehensif, yang menjelaskan bagaimana perusahaan akan mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Suryono (2004) menjelaskan bahwa arti dari strategi pada dasarnya selalu berhubungan dengan tiga hal penting, yaitu, tujuan, sasaran, dan metode. Jadi, ketiga hal tersebut harus ada dalam pelaksanaan strategi yang ingin diterapkan.

Menurut Nippi, A. T. (2019), strategi merupakan pengetahuan dan keterampilan dalam menentukan rencana kebijakan atau aktivitas yang akan dilakukan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya dalam waktu dan ukuran tertentu untuk mencapai sasaran spesifik. Berbeda dengan pendapat Siagian (2006) yang menyatakan bahwa strategi adalah suatu rangkaian dari keputusan atau tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh para jajaran agar sesuatu organisasi dapat mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Sementara menurut Riani, N. K. (2021) menyatakan bahwa strategi merupakan langkah-langkah yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan, dengan melakukan kegiatan secara berkelanjutan berdasarkan kesepakatan bersama.

Menurut Lahagu, O. (2018), mendefinisikan strategi adalah suatu proses pembuatan rencana oleh manajemen puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi dan menetapkan ukuran atau tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurutnya ada tiga elemen utama

dalam sebuah strategi, yaitu; faktor luar, sumber daya, dan kemampuan yang ada di dalam serta sasaran yang ingin diraih.

Setiap lembaga tentu mempunyai rencana untuk meraih sasaran yang telah ditentukan. Jenis rencana yang diterapkan dalam suatu lembaga berbeda-beda. Terdapat beberapa rencana yang diadopsi dalam sebuah lembaga untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Jack Kooten (1991:81), tipe - tipe strategi meliputi:

- 1) Strategi Perusahaan (*Corporate Strategy*) Strategi ini berkaitan dengan penentuan visi, sasaran, nilai-nilai, dan langkah-langkah baru dalam strategi. Diperlukan batasan mengenai apa yang akan dilakukan dan siapa yang menjadi targetnya,
- 2) Program Strategi (*Program Strategy*) Strategi ini lebih fokus pada akibat dari strategi yang berkaitan dengan program tertentu. Apa yang akan terjadi jika sebuah program tertentu dijalankan atau diperkenalkan (apa yang akan terjadi bagi tujuan organisasi),
- 3) Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Support Strategy*) Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi.
- 4) Strategi Kelembagaan (*Institutional Strategy*) Tujuan dari strategi kelembagaan adalah untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menjalankan berbagai inisiatif strategi.

Menurut Goldworthy dan Ashley dalam Lahagu, strategi adalah sebuah keadaan di mana suatu organisasi melakukan metode-metode untuk meraih target yang diinginkan. Tujuh aturan dasar perumusan strategi, yaitu:

- 1). Menggambarkan dan mendefinisikan masa depan dan masa kini.
- 2). Manajemen strategis harus mendikte perencanaan, bukan perencanaan.
- 3). Strategi harus fokus pada keunggulan kompetitif, bukan hanya pertimbangan finansial.
- 4). Urutkan dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas.
- 5). Strategi memiliki makna eksternal.
- 6). Kesederhanaan itu penting.
- 7). Strategi harus fokus pada hasil jangka panjang.

Berdasarkan pendapat Quinn dalam (Aktavia, Nur Avani 2022) Strategi adalah susunan yang menggabungkan tujuan utama, aturan, dan berbagai langkah dalam sebuah organisasi untuk menciptakan kesatuan yang solid. Penyusunan strategi yang baik bertujuan untuk membantu pengorganisasian dan alokasi sumber daya perusahaan agar menjadi unik dan berkelanjutan. Strategi yang sukses dibuat dengan memperhatikan kekuatan dalam organisasi, kekurangan yang ada, serta perkiraan perubahan di sekitar kita.

Menurut Geoff Mulgan (2009:19), strategi publik dimaknai sebagai pemanfaatan yang terorganisir dari sumber daya serta kekuatan publik oleh institusi pemerintah untuk mencapai kepentingan masyarakat. Dari pemahaman itu, Geoff Mulgan mengkategorikan strategi menjadi 5 (lima) indikator, yaitu;

- 1). Tujuan (*Purpose*)
- 2). Lingkungan (*Environments*)
- 3). Arah (*Directinons*)
- 4). Tindakan (*Actions*)
- 5). Pembelajaran (*Learnings*).

Strategi berfungsi sebagai sarana bagi pemerintah atau organisasi untuk meraih sasaran yang diharapkan. Strategi yang efektif akan membantu dalam mencapai tujuan pemerintah atau organisasi saat melaksanakan misi. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah cara atau pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Strategi mencakup penyesuaian untuk menghadapi kondisi lingkungan tertentu yang dianggap penting. Tindakan penyesuaian ini dilakukan dengan pertimbangan yang matang, memperhitungkan kekuatan dan kelemahan yang ada, agar pelaksanaannya menjadi lebih efektif.

Strategi pemerintah merujuk pada langkah-langkah yang diambil oleh lembaga atau organisasi, dalam hal ini Pemerintah Kalurahan, untuk mencapai tujuan yang diinginkan demi kemajuan Kalurahan dan terciptanya masyarakat yang sejahtera. Menurut pemikiran Geoff Mulgan yang telah diulas, pihak pemerintah mempunyai sasaran tertentu yang ingin diwujudkan serta menilai capaian dari program-program yang telah disusun sebelumnya. Pemerintah Kalurahan Pagerharjo Kapanewon Samigaluh juga memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mensejahterakan masyarakat Kalurahan melalui strategi-strategi dalam mendorong pembangunan Kalurahan.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam dan menyeluruh mengenai strategi yang diterapkan oleh pemerintah Kalurahan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Metode deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk merumuskan dan menyajikan data yang diperoleh dari lapangan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, sehingga dapat menarik kesimpulan yang bermakna dan kontekstual.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kalurahan Pagerharjo dengan memfokuskan pada Strategi Pemerintah Kalurahan dalam Mendorong Pembangunan di Kalurahan Pagerharjo Kapenewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Sumber Data

Sumber informasi dalam penelitian mengacu pada individu atau objek yang dijadikan tempat untuk mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), data didefinisikan sebagai fakta atau kenyataan yang dipakai sebagai fondasi untuk membangun suatu pendapat, mendapatkan informasi yang dapat dipercaya, serta berfungsi sebagai bahan dalam proses berpikir dan penelitian ilmiah.

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti di lokasi penelitian. Sumber data primer berasal dari observasi dan wawancara. Data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti berasal dari sumber yang sama. Data primer juga disebut sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat kebaruan. (Kaharuddin, K.,2021).

Sumber data primer terdiri dari responden dan informan. Dalam konteks ini, responden dan informan meliputi Lurah, perangkat Kalurahan, serta masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang didapat dari sumber lain yang bukan berasal dari narasumber utama (Mukthar, 2013). Data ini berfungsi sebagai pelengkap dan bersumber dari dokumen seperti buku, laporan, jurnal, atau hasil penelitian sebelumnya (Kaharuddin, 2021). Peneliti memilih data ini secara selektif untuk mendukung dan memperkuat temuan dalam penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data adalah langkah awal yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang sesuai. Fadli (2021) menekankan bahwa mutu penelitian sangat ditentukan oleh kualitas dan kelengkapan data yang berhasil diperoleh. Dalam studi ini, peneliti menerapkan metode pengumpulan data lapangan, yaitu pendekatan yang dilakukan secara terstruktur dengan mencari informasi langsung dari keadaan nyata di tempat penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan melalui dua kategori sumber data, yaitu data utama, yang didapat dari wawancara dengan informan yang relevan, dan data pendukung, yang dikumpulkan melalui pengamatan

langsung serta dokumentasi berbagai sumber tulisan atau visual yang berhubungan dengan objek penelitian.

1. Observasi

Observasi merujuk pada tindakan melihat dengan seksama atau mengumpulkan data penting sebelum memulai suatu penelitian dengan melakukan pengamatan sebagai sarana untuk memudahkan dalam mengidentifikasi subjek, objek, dan variabel yang akan diteliti. Peneliti menyusun laporan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan selama proses observasi. Observasi dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu fenomena.

Peneliti dalam observasi menggunakan teknik observasi partisipatif. Observasi partisipatif merupakan sebuah metode dimana seorang peneliti terlibat secara aktif dalam kegiatan sehari-hari individu yang menjadi objek penelitian atau menjadi sumber data penelitian. Dengan melakukan pengamatan terhadap partisipan ini, maka hasil data yang didapatkan akan menjadi lebih jelas dan memahami makna dari setiap perilaku yang terlihat.

Tabel 2.1 Observasi Lapangan

No	Tanggal	Tempat/Kegiatan	Aspek yang diamati	Hasil Observasi	Keterangan
1	16-02-2024	Rumah Pak Dukuh	Musyawarah perencanaan pelaksanaan gotong-royong bangun jalan	Kegiatan dihadiri oleh Lurah, dukuh, rt dan warga setempat	Keterlibatan warga cukup tinggi
2	19-02-2024	Jalan antar Pedukuhan	Keterlibatan warga dalam kegiatan gotong royong	Kegiatan dilaksanakan dari pagi hingga siang. Warga, pamong Kalurahan dan	Keterlibat warga sangat tinggi

				dukuk ikut terlibat dalam kegiatan tersebut	
3	02-03- 2024	Kantor Kalurahan	Musyawahar Perencanaan Pembangunan	Kegiatan Muskal dihadiri oleh lurah, Bamuskal, tokoh masyarakat, kelompok tani	
4	15-03- 2024	Pancer Menoreh, sosialisasi pariwisata	Peningkatan kompetensi SDM pariwisata	15 peserta (termasuk lurah & BUMDes) ikuti sosialisasi pengembangan paket wisata seperti kopi, gula aren, Wedang Lengger	Fokus pada pelatihan promosi dan paket wisata desa
5	16-02- 2024	Depan kantor Kalurahan	Transparansi dan Informasi Anggaran	Terdapat banner besar berisi rincian APBKal, prioritas dana desa tahun 2024	Transparansi cukup baik
6	12-03- 2024	Balai Kaluruhan	Pelibatan Masyarakat	Sosialisasi program pelatihan peternakan dilakukan secara terbuka kepada warga.	Antusiasme masyarakat cukup tinggi

Sumber: Dokumen pribadi peneliti tahun 2024

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi secara lisan melalui interaksi tanya jawab langsung dengan informan mengenai keterangan-keterangan detail yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik wawancara dilaksanakan karena dianggap penting untuk mengumpulkan informasi. Model ini dilaksanakan melalui wawancara

langsung dengan sumber informasi untuk memahami strategi pemerintah Kalurahan dalam mendorong pembangunan.

Wawancara merupakan metode komunikasi antara pewawancara (*interviewer*) dan pihak yang diwawancarai (*interviewee*). Seorang pewawancara idealnya memenuhi beberapa kriteria, antara lain bersikap responsif, objektif, mampu menyesuaikan diri dengan karakter responden, serta menjaga agar percakapan tetap terarah. Selain itu, terdapat sejumlah prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan wawancara, seperti menghindari kesan negatif, menjaga kelangsungan alur pembicaraan, tidak terlalu sering menggali pengalaman masa lalu responden, memberikan pemahaman mengenai pentingnya informasi yang disampaikan, serta menghindari pertanyaan yang mengandung terlalu banyak topik dalam satu waktu. Dalam studi ini, peneliti telah menyusun serangkaian pertanyaan yang akan diajukan kepada responden, dan semua hasil wawancara telah didokumentasikan secara menyeluruh. Untuk memperoleh data yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, proses wawancara juga direkam menggunakan alat perekam suara (Hanphone).

Peneliti mewawancarai Pamong Kalurahan Pagerharjo, serta tokoh masyarakat yang peneliti anggap mampu memberikan informasi berkaitan dengan strategi pemerintah Kalurahan dalam mendorong pembangunan.

3. Dokumentasi

Teknik Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri, menyalin, atau mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis maupun visual seperti catatan, buku, laporan, arsip, serta foto yang telah tersedia. Peneliti mengakses

berbagai dokumen resmi yang dimiliki oleh Kalurahan Pagerharjo guna memperkuat dan melengkapi data terkait strategi pemerintah dalam mendorong pembangunan. Data yang dikumpulkan melalui dokumentasi meliputi:

1. Dokumen RPJMKal tahun 2024
2. Profil Kalurahan Pagerharjo
3. Dokumentasi visual berupa foto dan video kegiatan pembangunan selama masa penelitian.

E. Teknik Pemilihan Informan

Teknik Peneliti dalam penelitian kualitatif harus mengetahui cara untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Untuk mengumpulkan data, peneliti perlu memilih informan dengan cermat. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik *purposive*. Teknik ini dianggap memiliki relevansi antara peneliti dan informan untuk mendapatkan data.

Menurut Kaharuddin, K., (2021: 4), teknik *purposive* merupakan metode seleksi informan yang disengaja oleh peneliti sendiri dengan mempertimbangkan berbagai kriteria. Kriteria yang dimaksud mencakup beberapa hal, yaitu pengetahuan mengenai objek yang akan dijadikan fokus penelitian, para informan yang dipilih dari komunitas yang menjadi subjek penelitian, pejabat yang memegang peranan penting dalam lokasi penelitian, serta tokoh agama, masyarakat, dan sejenisnya yang terkait dengan topik penelitian. Sehingga peneliti memilih beberapa informan yang relevan dengan penelitian, yaitu;

Tabel 2.2 Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Usia	Jabatan/pekerjaan	Pendidikan
1	Widayat	57	Lurah (Kepala Desa)	S1
2	Wakcid Cahyono, S.Pd	49	Ulu-ulu	S1
3	H. Tri Sarmudji	56	BPKal (Badan Permusyawaratan Kalurahan)	SMA
4	Martono	47	LPMKal (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan)	SMA
5	Supanto	42	Kamituwa	SMA
6	Hendi Masaleh	46	Dukuh	SMA
7	Paulus Prio Sabtano	48	Dukuh	SMA
8	Heri Yuliati	49	Kasi Pelayanan	DIII
9	Subardi	57	Ketua Lembaga Budaya	SMA
10	Mujiarjo	67	Ketua RT 21 RW 11 Plono Timur	SD
11	Agustinus Sosilo	41	Kelompok Tani	S1
12	Budiyono	47	Kelompok Ternak	S1
13	Yohana Suyati	64	PKK (Ketua Pokja)	SMA
14	Nisa Multi	27	Ketua PKK	S1
15	Mariati	48	UMKM	Diploma
16	Yatino	50	Masyarakat	SD
17	Aji	28	Masyarakat	S1
18	Subarkah	33	Masyarakat	SMA

F. Teknik Validasi Data

Validasi data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan kredibilitas dan keabsahan data terkait strategi Kalurahan dalam mendorong pembangunan di Kalurahan Pagerharjo. Menurut Sugiyono (2017:125), teknik triangulasi merupakan metode pengumpulan data yang mengombinasikan berbagai teknik dan sumber data yang ada. Triangulasi data memungkinkan proses verifikasi data dalam penelitian ini

berlangsung lebih cepat. Triangulasi merupakan metode pengecekan data melalui berbagai sumber dan teknik untuk memperoleh gambaran yang utuh dan obyektif.

Peneliti menggunakan dua jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik:

1. Triangulasi Sumber

Teknik ini dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari berbagai pihak yang relevan, yaitu dari pemerintah Kalurahan dan masyarakat Pagerharjo. Tujuannya adalah untuk melihat konsistensi informasi mengenai strategi pembangunan yang diterapkan dan bagaimana masyarakat merespons serta terlibat dalam proses tersebut.

2. Triangulasi Teknik

Validasi dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data terhadap sumber yang sama. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari wawancara dengan aparatur Kalurahan dan masyarakat dikonfirmasi kembali melalui observasi langsung di lapangan serta dokumentasi seperti berita acara musyawarah desa, laporan pembangunan, atau dokumen perencanaan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menilai sejauh mana strategi pembangunan yang dijalankan benar-benar terealisasi di lapangan dan didukung oleh masyarakat.

1. Kredibilitas (*Credibility*)

Kredibilitas dalam penelitian merujuk pada tingkat kepercayaan yang diberikan kepada hasil penelitian dari sudut pandang informan. Dalam konteks ini, tujuan pokok dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan atau memahami kejadian berdasarkan pandangan yang

dimiliki oleh para narasumber. Informan merupakan pihak tunggal yang mampu menilai sejauh mana hasil penelitian dapat dianggap valid dan dapat diandalkan. Untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian, Moleong (2018) menyarankan beberapa strategi yang dapat diterapkan, yaitu:

a) Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan waktu pengamatan akan dilakukan jika data yang didapatkan dianggap tidak cukup lengkap, sehingga menyulitkan dalam menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kunjungan ke lokasi di Kalurahan Pagerharjo beberapa kali untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dan memastikan bahwa data yang telah ada sebelumnya akurat. Peneliti melakukan diskusi antara satu informan dengan informan yang lain untuk memperluas pemahaman tentang topik yang sedang diteliti. Selama proses ini, peneliti juga menyusun rangkuman dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Setelah itu, rangkuman tersebut dikonfirmasi kembali kepada informan untuk memastikan keakuratannya.

Ketika melakukan konfirmasi, jika tidak ditemukan adanya perbedaan dalam data yang disampaikan oleh para informan, peneliti merasa yakin bahwa informasi tersebut sudah valid. Proses ini penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian mencerminkan perspektif yang konsisten dan dapat dipercaya dari berbagai informan, serta untuk menambah keandalan data yang diperoleh. Dengan cara ini, peneliti dapat memperkuat argumen dan kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian..

b) Peningkatan ketekunan

Teknik peningkatan ketekunan dilaksanakan melalui pengamatan yang teliti, detail, dan mendalam secara berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang berkaitan dengan kepentingan penelitian tersebut. Dalam kajian ini, peneliti menggunakan sumber yang relevan dengan strategi pemerintah Kalurahan untuk mendorong pembangunan sebagai referensi guna meningkatkan ketekunan. Dengan membaca berbagai literatur dan referensi, peneliti dapat memperluas dan memperdalam wawasan mengenai topik yang diteliti.

Pengetahuan yang lebih luas ini memungkinkan peneliti untuk lebih kritis dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan. Selain itu, pemahaman yang mendalam tentang konteks dan strategi yang ada dapat membantu peneliti dalam mengevaluasi keakuratan dan relevansi data, sehingga dapat menentukan apakah informasi yang diperoleh sudah benar atau perlu ditinjau kembali. Proses ini tidak hanya meningkatkan keakuratan data, tetapi juga memperkuat keseluruhan hasil penelitian dengan memberikan perspektif yang lebih kaya dan beragam.

c) Triangulasi

Teknik triangulasi digunakan untuk memastikan tingkat kepercayaan data atau informasi yang telah diperoleh. Pendekatan ini menggunakan sumber lain di luar data tersebut untuk melakukan pemeriksaan atau sebagai referensi. Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan adalah triangulasi teknik, di mana sumbernya tetap sama tetapi dengan teknik pengumpulan data yang berbeda, melalui informan yang sama. Melalui metode ini, peneliti dapat

mengumpulkan informasi dari berbagai teknik, seperti wawancara mendalam, observasi, atau fokus grup, yang semuanya melibatkan informan yang sama. Dengan cara ini, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh konsisten dan valid.

Proses triangulasi ini penting karena membantu peneliti dalam mengidentifikasi potensi bias atau kesalahan dalam data yang dikumpulkan. Jika informasi yang diperoleh melalui teknik yang berbeda menunjukkan keselarasan, hal ini memberikan bukti yang lebih kuat tentang keandalan data. Sebaliknya, jika terdapat perbedaan, peneliti dapat menelusuri penyebabnya untuk memastikan bahwa interpretasi dan analisis yang dilakukan benar-benar akurat. Dengan demikian, triangulasi bukan sekedar alat verifikasi, tetapi juga sebagai cara peneliti untuk meningkatkan kualitas keseluruhan penelitian.

2. Keteralihan (*Transferability*)

Kriteria transferabilitas berkaitan dengan kemampuan hasil penelitian kualitatif untuk diterapkan atau digeneralisasikan dalam konteks atau setting yang berbeda. Untuk mencapai ini, peneliti perlu menyajikan hasil penelitiannya dalam bentuk tesis yang menyertakan deskripsi yang jelas dan terperinci. Dengan demikian, pembaca dapat memahami konteks di mana penelitian tersebut dilaksanakan dengan lebih baik.

3. Ketergantungan (*Dependability*)

Kebergantungan yang dimaksud dalam konteks ini merujuk pada keyakinan bahwa penelitian dianggap dapat diandalkan apabila pihak lain, seperti rekan peneliti atau pihak yang berkepentingan, mampu mengulangi dan merefleksikan proses penelitian tersebut

dengan hasil yang serupa. Untuk mencapai hal ini, peneliti berupaya secara aktif untuk meyakinkan pihak-pihak seperti dosen pembimbing dan penguji tentang validitas dan keakuratan penelitian yang telah dilakukan. Peneliti melakukannya dengan menyajikan bukti-bukti yang cukup, yang menunjukkan bahwa penelitian telah dilakukan.

4. Kepastian (*Confirmability*)

Kepastian atau *confirmability* adalah aspek penting dalam menilai objektivitas penelitian, yang mengacu pada upaya peneliti untuk memastikan bahwa hasil penelitian tersebut bebas dari bias pribadi dan dapat diterima secara luas oleh berbagai pihak. Sebuah penelitian dapat dianggap objektif jika hasilnya disetujui dan diakui oleh banyak orang sebagai hasil yang valid dan dapat dipercaya.

Konteks penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan konfirmasi terhadap hasil-hasil penelitian yang diperoleh kepada para informan yang telah berperan sebagai responden. Proses ini melibatkan pemeriksaan dan validasi hasil penelitian dengan para informan tersebut untuk memastikan bahwa interpretasi dan kesimpulan yang diambil mencerminkan perspektif dan pengalaman mereka secara akurat. Dengan demikian, konfirmasi ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas penelitian dan memastikan bahwa hasilnya tidak terpengaruh oleh bias atau subjektivitas peneliti.

G. Teknik analisis data

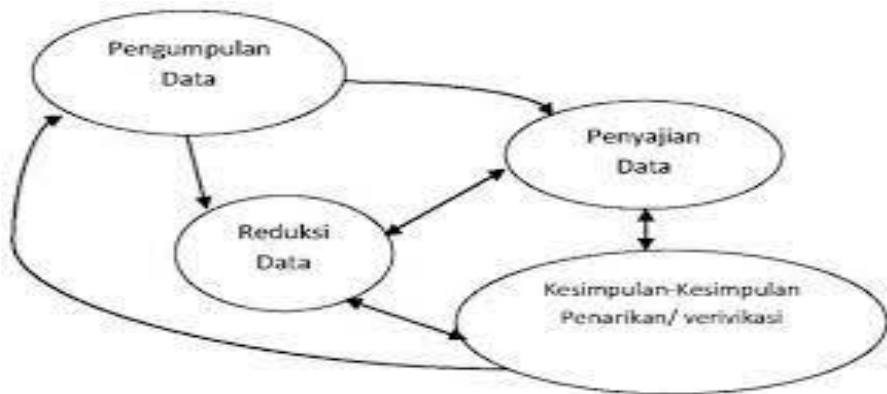
Menurut Mouw (2022: 64), analisis data mencakup proses pengumpulan dan pengaturan transkrip, catatan lapangan, serta materi lainnya yang diperoleh oleh peneliti agar dapat secara sistematis

menemukan hasil penelitian. Analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan baik selama pengumpulan data maupun setelah pengumpulan data selesai.

Moleong dalam Rijali, A. (2018), dalam memperoleh data di lapangan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data, sumber dan jenis data, sumber dalam penelitian kualitatif terdiri dari; kata-kata serta tindakan, selanjutnya adalah data tambahan seperti dokumen atau sumber tertulis, foto, dan statistik. Sumber data utama terdiri dari kata-kata dan perilaku orang-orang yang menjadi subjek pengamatan atau yang diwawancarai. Informasi utama dikumpulkan melalui catatan tertulis, perekaman video atau rekaman audio, pengambilan foto, serta film. Data tambahan yang diambil dari sumber tertulis dapat dibagi menjadi beberapa kategori, seperti buku dan jurnal ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.

Peneliti dalam penelitian di lapangan sudah melakukan analisis pada mewawancarai narasumber. Peneliti dengan cermat mendengarkan/mencatat jawaban yang diberikan oleh narasumber. Apabila penyampaian atas jawaban narasumber belum kredibel, maka peneliti terus menggali jawaban dan bertanya kepada narasumber sampai datanya jenuh.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi tahapan sebagai berikut;



Gambar 2.1 Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif (Miles dan Huberman 2009).

a) Reduksi Data (Pengumpulan Data)

Reduksi data melibatkan pemilihan serta fokus pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang telah dicatat secara tertulis di lokasi pengamatan. Proses ini terus berjalan sepanjang durasi penelitian, dari permulaan hingga akhir penelitian. Selanjutnya peneliti mulai memilah data-data yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam penulisan tesis. Apabila terdapat data yang tidak diperlukan, maka data tersebut dapat dibuang. Hal tersebut guna untuk mempermudah dalam penarikan kesimpulan.

b) Penyajian Data (*Data Display*)

Penyusunan data merupakan proses mengatur sekelompok informasi agar dapat dianalisis dan digunakan untuk membuat kesimpulan serta mengambil tindakan. Ada berbagai metode untuk menyajikan data kualitatif, termasuk melalui teks naratif seperti catatan lapangan, serta dengan memanfaatkan matriks, grafik, jaringan, dan diagram. Bentuk-bentuk ini menyatukan informasi dalam satu kesatuan yang teratur dan

jelas, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis sesuai dengan tujuan tesis.

c) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

Peneliti selalu berusaha untuk mendapatkan kesimpulan saat melakukan penelitian di lapangan. Di tahap pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti dari objek yang mereka amati. Mereka akan memberikan komentar tentang pola-pola yang ditemukan dalam catatan teori, memberikan penjelasan, menggambarkan kemungkinan konfigurasi, menjelaskan hubungan sebab akibat, dan menunjukkan usulan. Setelah peneliti menyederhanakan data sesuai dengan tujuan penulisan, menganalisis data, maka selanjutnya peneliti menarik kesimpulan yang bertujuan untuk mencari makna dari data yang ditemukan dalam penelitian.

BAB III

PEMBANGUNAN DI PAGERHARJO

A. Pembangunan di Kalurahan Pagerharjo

Kalurahan Pagerharjo merupakan salah satu wilayah administratif di Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terletak di kawasan perbukitan Menoreh. Dengan karakteristik geografis yang didominasi oleh lahan pertanian, kehutanan, dan potensi wisata alam, pembangunan di Kalurahan Pagerharjo mengarahkan pada optimalisasi potensi lokal serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam pembangunan Kalurahan Pagerharjo menunjukkan dinamika yang sangat aktif dalam mengimplementasikan program-program pembangunan baik yang bersumber dari dana desa, bantuan keuangan pemerintah daerah, maupun partisipasi masyarakat.

Secara umum, pembangunan di Kalurahan Pagerharjo dapat dikategorikan ke dalam beberapa bidang utama, yakni: (1) pembangunan fisik (infrastruktur), (2) pembangunan ekonomi, (3) pembangunan sosial dan kelembagaan, dan (4) pelestarian lingkungan. Pembangunan fisik dilakukan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar diantaranya: jalan, jembatan, saluran irigasi, dan fasilitas umum lainnya yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Upaya pembangunan tersebut tidak hanya meningkatkan aksesibilitas antarwilayah, tetapi juga mempercepat arus distribusi hasil pertanian dan mempermudah mobilitas masyarakat Kalurahan Pagerharjo.

Dalam bidang ekonomi, pemerintah kalurahan bersama masyarakat berupaya mengembangkan sektor pertanian dan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi lokal. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pelatihan, bantuan sarana produksi pertanian, serta penguatan kelembagaan petani, pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas lokal. Selain itu, keberadaan sejumlah destinasi wisata dan sentra kegiatan ekonomi lokal seperti Kebun Teh Nglinggo, Rumah Belajar Vanili Mbajing, Agroeduwisata Kopi Trajumas, Rumah Produksi Susu, Plono Camp Ground, Rumah Pajang, serta Pasar Sempulur menjadi faktor pendukung yang signifikan dalam pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan masyarakat. Destinasi dan sentra tersebut tidak hanya menarik kunjungan wisatawan, tetapi juga menciptakan peluang usaha mikro dan kecil berbasis potensi lokal.

Bidang sosial, pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan seperti Karang Taruna, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) turut dilibatkan secara aktif dalam berbagai proses pembangunan, sehingga tercipta sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Keterlibatan kelompok rentan, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas, juga menjadi bagian dari pendekatan pembangunan yang inklusif dan partisipatif.

Pembangunan di Kalurahan Pagerharjo juga tidak terlepas dari perhatian terhadap aspek lingkungan hidup. Mengingat wilayah ini memiliki kerentanan terhadap bencana alam seperti tanah longsor, berbagai inisiatif mitigasi bencana telah dikembangkan, termasuk penguatan sistem

peringatan dini, pelatihan masyarakat tanggap bencana, serta pelestarian vegetasi di daerah rawan longsor. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kalurahan Pagerharjo tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga memperhatikan prinsip keberlanjutan dan ketahanan wilayah.

Secara keseluruhan, pembangunan di Kalurahan Pagerharjo menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, baik dari segi fisik maupun sosial-ekonomi. Pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh unsur masyarakat dan didasarkan pada perencanaan berbasis kebutuhan lokal. Hal ini selaras dengan arah kebijakan pembangunan desa nasional yang menekankan pada kemandirian Kalurahan, partisipasi warga, dan keberlanjutan pembangunan.

1. Visi Dan Misi Kalurahan Pagerharjo

Visi adalah sekumpulan kalimat yang menjelaskan harapan, sasaran, nilai, serta masa depan suatu organisasi, baik itu institusi maupun perusahaan. Visi juga merupakan target yang ingin diraih oleh organisasi saat melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Visi dibentuk dari pemikiran para pendiri mengenai gambaran masa depan organisasi. Visi berperan dalam menetapkan arah masa depan, memberikan inspirasi kepada anggota, serta memotivasi mereka untuk memberikan kontribusi yang optimal.

Dengan kata lain, visi merupakan aspirasi atau tujuan perusahaan untuk masa depan. Sementara itu, misi adalah cara sebuah perusahaan dapat mencapai tujuan untuk di masa yang akan datang. Selain itu, misi ini juga bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan, seperti posisi perusahaan saat ini, langkah-langkah yang diambil untuk meraih kesuksesan, serta metode untuk mengevaluasi kemajuan suatu proses.

Visi dan Misi Pemerintah Kalurahan Pagerharjo sebagai berikut:

VISI:

Terwujudnya Kalurahan yang Jujur, Tanggap, dan Berbudaya guna Mewujudkan Pelayanan Warga yang Berkualitas dan Kesejahteraan Warga Pagerharjo.

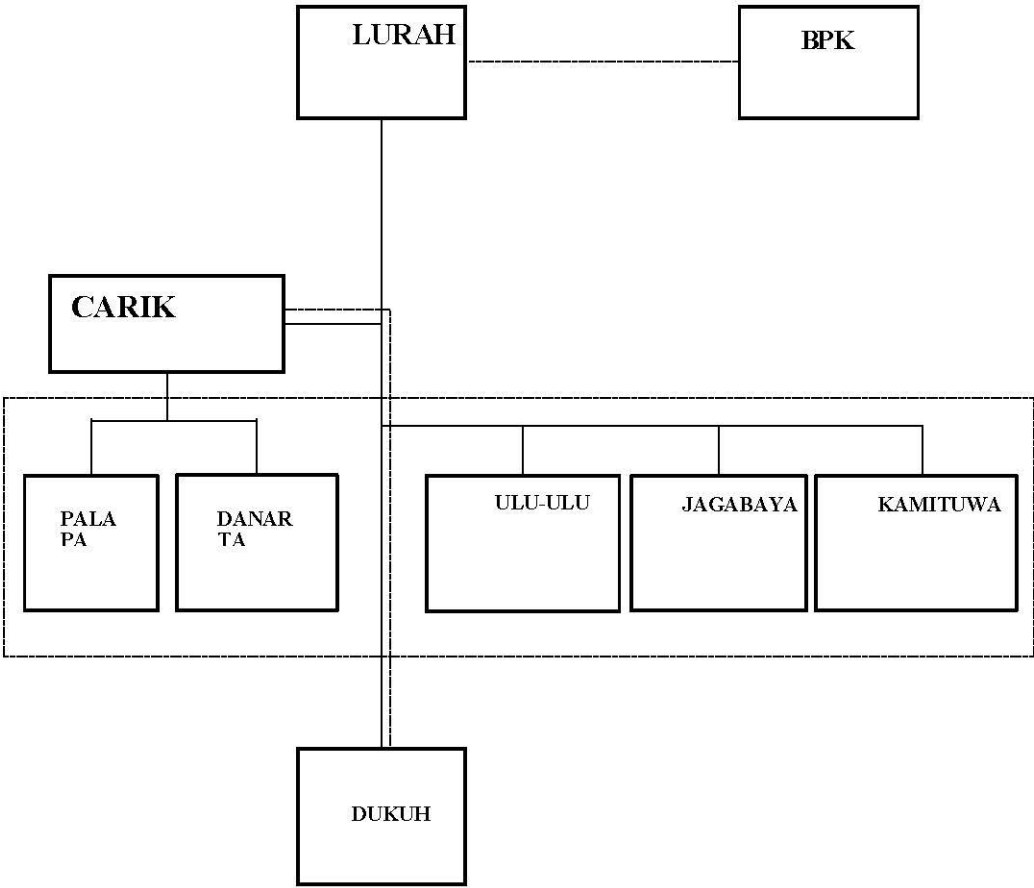
MISI:

1. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan berbasis kedaulatan rakyat dengan mewujudkan aspirasi warga menjadi kebijakan Kalurahan Pagerharjo.
 2. Meningkatkan kesejahteraan warga Pagerharjo melalui optimalisasi potensi, peluang dan tantangan yang dimilikinya.
 3. Meningkatkan keterampilan maupun kualitas sumberdaya manusia di Kalurahan Pagerharjo dengan memberdayakan organisasi kelembagan masyarakat yang ada di Kalurahan Pagerharjo.
 4. Melaksanakan jejaring dengan multipihak baik swasta, pemerintah, perguruan Tinggi guna mendorong sinergitas dan kemampuan menghubungkan (menghubungkan) antara Pemerintah dan Warga Pagerharjo.
 5. Pelaksanakan pelayanan (*decision government*) berpihak kaum lemah (tak berdaya).
2. Struktur Organisasi Kalurahan Pagerharjo

Sesuai dengan penjelasan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, terdapat tiga jenis lembaga desa yang memiliki peran dalam pengelolaan desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan di

tingkat desa (Pemerintahan Desa) dilakukan oleh Pemerintah Desa serta Badan Permusyawaratan Desa.

**Bagan 3.1 Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan
Pagerharjo Tahun 2024**



———— = **Garis Komando**

----- = **Garis Kordinasi**

**Tabel 3.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Lurah
dan Pamong Kalurahan Tahun 2024**

NO	NAMA	JABATAN	NOMOR DAN TANGGAL	PENDIDIKAN
			KEPUTUSAN PENGANGKATAN	TERAKHIR
1	WIDAYAT, S.IP	Lurah	494/A/2021 18/11/2021	S I
2	SETIYOKO, S.Pd.	Carik	28 TAHUN 2016 27/12/2016	S I
3	Heri Yulianti, A.Md.	Panata Laksana Sarta Pangripta	09 TAHUN 2006 17/04/2006	D3
4	KATRI MAHARSIWI, S.E.	Danarta	19 TAHUN 2015 30/12/2015	S I
5	BAMBANG UNTORO, S.Si.	Jagabaya	10 TAHUN 2010 10/08/2010	S I
6	WACKID CAHYONO, S.Pd.	Ulu-Ulu	20 TAHUN 2015 30/12/2015	S I
7	SUPANTO	Kamituwa	11 TAHUN 2010 10/08/2010	SLTA
8	WASITO	Staf	03 TAHUN 2003 29/01/2003	SLTA
9	TAUHID	Staf	07 TAHUN 2006 17/04/2006	SLTP
10	Yekti Endah Pambudi	Dukuh Separang	29 TAHUN 2016 17/12/2016	SLTA
11	CATUR YULIANTO, S.Pd.	Dukuh Sarigono	17 TAHUN 2016 31/03/2016	S I
12	SUKIRNO	Dukuh Ngemplak	05 TAHUN 2003 29/01/2003	SLTA
13	RESTU HERMAWAN,S.Sn.	Dukuh Plono Barat	36 TAHUN 2021 30/07/2021	S I
14	Paulus Prio Sabtono	Dukuh Plono Timur	30 TAHUN 2016 17/12/2016	SLTA
15	TEGUH KUMORO	Dukuh	05 TAHUN 2003	SLTA

NO	NAMA	JABATAN	NOMOR DAN TANGGAL	PENDIDIKAN
			KEPUTUSAN PENGANGKATAN	TERAKHIR
		Nglinggo Barat	29/01/2003	
16	HENDI MENSALEH	Dukuh Nglinggo Timur	31 TAHUN 2016 17/12/2016	SLTA
17	HERU NUGROHO	Dukuh Jobolawang	29 TAHUN 2018 31/10/2018	SLTA
18	UTOMO	Dukuh Ngaglik	06 TAHUN 2006 25/12/2006	SLTA
19	SETYA BASUKI	Dukuh Gegerbajang	05 TAHUN 2003 29/01/2003	SLTA
20	PURWANTO	Dukuh Kemesu	05 TAHUN 2003 29/01/2003	SLTA
21	AG. TOTO SUWARTO	Dukuh Ngentak	16 TAHUN 2016 31/03/2016	SLTA
22	TUKIJAN	Dukuh Sinogo	08 TAHUN 2006 25/02/2006	SLTA
23	SLAMET	Dukuh Kalirejo Utara	11 TAHUN 2013 03/06/2013	SLTA
24	WINARDI	Dukuh Kalirejo Selatan	03/KPTS/Pem/1993 24/05/1993	SLTA
25	Andar Kusnanto	Dukuh Kalinongko	32 TAHUN 2016 17/12/2016	SLTA
26	PONIJO	Dukuh Jetis	10 TAHUN 2006 17/04/2006	SLTA
27	Y. PRIYATA	Dukuh Beteng	18 TAHUN 2006 27/11/2006	SLTA
28	TOTOK WINARDI	Dukuh Suren	22 TAHUN 2013 25/11/2013	SLTA
29	SIRAN	Dukuh Mendolo	05 TAHUN 2003 29/01/2003	SLTA

Sumber: Data Sekunder RPJMKal Pagerharjo Tahun 2022-2027

Dari tabel di atas memberikan informasi tentang jabatan, nomor keputusan pengangkatan, tanggal keputusan, dan latar belakang pendidikan masing-masing pegawai di desa atau Kalurahan tersebut. Kebanyakan pegawai memiliki pendidikan SLTA, sementara beberapa memiliki gelar Sarjana (S1) atau Diploma (D3). Secara keseluruhan, tabel ini memberikan gambaran tentang struktur organisasi desa atau Kalurahan, menunjukkan peran masing-masing pegawai serta latar belakang pendidikan mereka. Ini membantu memahami distribusi tanggung jawab dan kualifikasi di dalam organisasi desa tersebut.

Tabel 3.3 Nama Pedukuhan Kalurahan Pagerharjo

No	Pedukuhan	RW	RT
1	DUKUH SEPARANG	001	001 002
		002	003 004
2	DUKUH SARIGONO	003	005 006
		004	007 008
3	DUKUH NGEMPLAK	005	009 010
		006	011 012
4	DUKUH PLONO BARAT	007	013 014
		008	015 016
5	DUKUH PLONO TIMUR	009 010	017 018 019 020
		011	021 022
6	DUKUH NGLINGGO BARAT	012	023 024

No	Pedukuhan	RW	RT
		013	025 026
7	DUKUH NGLINGGO TIMUR	014	027 028
		015	029 030
8	DUKUH JOBOLAWANG	016	031 032
		017	033 034
9	DUKUH NGAGLIK	018	035 036
		019	037 038
10	DUKUH GEGERBAJING	020	039 040
		021	041 042
11	DUKUH KEMESU	022	043 044 045
		023	046 047
12	DUKUH NGENTAK	024	048 049
		025	050 051
13	DUKUH SINOGO	026	052 053
		027	054 055
14	DUKUH KALIREJO UTARA	028	056 057
		029	058 059
15	DUKUH KALIREJO SELATAN	030	060 061
		031	062 063

No	Pedukuhan	RW	RT
16	DUKUH KALINONGKO	032	064 065
		034	068 069
17	DUKUH JETIS	035	070 071
		036	072 073
18	DUKUH BETENG	037	074 075
		038	076 077
19	DUKUH SUREN	039	078 079
		040	080 081
20	DUKUH MENDOLO	041	082 083
		042	084 085

Sumber: Data Sekunder RPJMKal Tahun 2022-2027

Dari tabel diatas menunjukkan pembagian administratif di Kalurahan Pagerharjo dengan detail yang mencakup Pedukuhan (unit utama), RW (unit administratif yang lebih besar), dan RT (unit administratif yang lebih kecil). Setiap Pedukuhan terdiri dari beberapa RW, dan setiap RW terdiri dari beberapa RT. Beberapa RW memiliki lebih dari satu RT, dan beberapa Pedukuhan memiliki beberapa RW yang mengelompokkan RT. Tabel ini membantu dalam memahami struktur administratif dan organisasi di Kalurahan Pagerharjo, serta bagaimana setiap unit dibagi dan dikelompokkan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan peran pemerintah Kalurahan diatur dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 mengenai posisi, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta cara kerja kelurahan sebagai berikut;

1. Lurah

Lurah adalah pemimpin pemerintahan Kalurahan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kalurahan. Tugas Lurah mencakup pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan urusan keistimewaan

1) Lurah mempunyai tugas:

- a) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan serta tugas pendukung dalam bidang administrasi pemerintahan.
- b) Pelayanan kepada masyarakat.
- c) penguatan kapasitas masyarakat; serta
- d) Penugasan beberapa urusan keistimewaan di daerah Kalurahan

2) Untuk melaksanakan tugas Lurah mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Desa;
- b) Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang bersifat umum
- c) Pengaturan untuk pemberdayaan masyarakat;
- d) Pengaturan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- e) Koordinasi dalam pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas layanan publik;
- f) Koordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh perangkat Kalurahan;

- g) Pelaksanaan penugasan sebagian tanggung jawab khusus dalam bidang kebudayaan, perencanaan wilayah, penguasaan lahan, dan organisasi;
- h) Pelaksanaan administrasi di tingkat Desa.
- i) Implementasi penilaian dan pembuatan laporan tentang tugas Sekretariat dan seksi serta,
- j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan tanggung jawab dan peran yang diemban.

2. Carik

Carik berperan sebagai unsur yang mendukung lurah serta sebagai elemen pemimpin Sekretariat Kalurahan. Carik mempunyai tanggung jawab untuk membantu lurah dalam hal administrasi pemerintahan serta menjalankan pengelolaan yang berkaitan dengan aktivitas urusan keistimewaan.

- 1) Carik mempunyai tugas membantu Lurah melaksanakan:
 - a) urusan umum
 - b) kepegawaian
 - c) keuangan
 - d) perencanaan
 - e) evaluasi
 - f) administrasi data; dan
 - g) pelaporan
- 2) Untuk melaksanakan tugas carik mempunyai fungsi:
 - a) penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Kalurahan
 - b) pengelolaan administrasi perkantoran

- c) penyelenggaraan kepegawaian Kalurahan
- d) pengelolaan keuangan Kalurahan
- e) penyelenggaraan ketatalaksanaan Kalurahan
- f) pengelolaan aset sarana dan prasarana
- g) pengelolaan data dan sistem informasi
- h) koordinasi pelaksanaan pelayanan umum
- i) pemantauan, evaluasi program dan penyusunan laporan tugas Kalurahan
- j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya

3. Panata Laksana sarta Pangripta

Panata Laksana dan Pangripta adalah unsur krusial dalam organisasi pemerintahan di tingkat desa. Sebagai bagian pendukung Lurah dan staf sekretariat, mereka memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin bahwa berbagai urusan administratif dan ketatausahaan dapat berjalan dengan baik. Tanggung jawab mereka meliputi memberikan bantuan dalam pengelolaan informasi, penyusunan dokumen, serta perencanaan yang efisien untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan program yang ditetapkan oleh pemerintah. Panata Laksana dan Pangripta memiliki tanggung jawab sebagai berikut;

- 1) Rencana, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian pelaksanaan tugas-tugas administrasi, umum, dan perencanaan meliputi:
- 2) Tugas-tugas administrasi meliputi:
- 3) Pengaturan dokumen resmi;
- 4) Pengelolaan surat, penyimpanan arsip, dan proses

pengiriman.

- 5) Hal-hal yang bersifat umum mencakup:
- 6) Pengaturan administrasi Pamong Kalurahan;
- 7) Pengadaan fasilitas untuk Pamong Kalurahan dan kantor;
- 8) Penataan untuk pertemuan;
- 9) Pengelolaan serta pencatatan aset;
- 10) Administrasi perjalanan untuk keperluan dinas.
- 11) Pengelolaan rumah tangga; dan
- 12) Menyediakan dukungan untuk koordinasi layanan publik.
- 13) Urusan yang berkaitan dengan perencanaan mencakup:
- 14) Penyusunan perencanaan anggaran pendapatan dan pengeluaran Kalurahan.
- 15) Pengumpulan data untuk pembangunan; dan
- 16) Pengawasan dan penilaian program serta penyusunan laporan.
- 17) Urusan administrasi, umum, dan perencanaan yang berhubungan dengan kegiatan terkait Keistimewaan.
- 18) Pelaksanaan kegiatan anggaran meliputi:
- 19) Melaksanakan langkah-langkah yang menyebabkan pengeluaran dari anggaran belanja sesuai dengan area tanggung jawab.
- 20) Pelaksanaan anggaran kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.
- 21) Pengelolaan aktivitas sesuai dengan tanggung jawabnya;
- 22) Penyusunan DPA, DPPA, dan DPAL sesuai dengan tanggung jawab yang diemban.
- 23) Melaksanakan penandatanganan kontrak kerja sama dengan

penyedia untuk pengadaan barang atau jasa yang sesuai dengan bidang tugasnya; dan

- 24) Penyusunan laporan realisasi kegiatan untuk pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan.
- 25) Mencari, mengumpulkan, mengorganisir, mengolah, dan menyajikan data serta informasi yang berkaitan dengan tanggung jawabnya;
- 26) Menyusun laporan mengenai pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas yang diemban.
- 27) Mengemukakan rekomendasi dan pandangan kepada Lurah mengenai kebijakan serta langkah yang akan diambil; dan
- 28) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Lurah.

4. Danarta

Danarta berperan sebagai asisten Lurah dan bagian dari staf sekretariat. Tugasnya adalah membantu Carik dalam hal pelayanan administrasi yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, khususnya dalam urusan keuangan dan menjalankan fungsi kebendaharaan. Untuk menjalankan tugas tersebut, Danarta memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- 1) Mengatur, melaksanakan, mengawasi, dan menilai pelaksanaan urusan keuangan.
- 2) Elemen-elemen terkait masalah keuangan
- 3) Manajemen administrasi keuangan
- 4) Penyusunan rencana anggaran untuk Kalurahan.
- 5) Pengelolaan yang berkaitan dengan sumber pendapatan dan pengeluaran, serta administrasi penghasilan Lurah, Pamong

Kalurahan, lembaga permusyawaratan Kalurahan, dan lembaga pemerintahan lainnya di Kalurahan.

- 6) Urusan keuangan yang terkait dengan kegiatan Keistimewaan.
- 7) Menyusun administrasi keuangan, yang mencakup menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, serta mempertanggungjawabkan semua penerimaan dan pengeluaran Kalurahan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan.
- 8) Menyusun laporan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan.
- 9) Mencari, mengumpulkan, dan mengolah data serta informasi yang berkaitan dengan tugasnya.
- 10) Menyusun laporan tentang pelaksanaan seluruh aktivitas sesuai dengan area tanggung jawabnya.
- 11) Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Lurah mengenai kebijakan dan langkah yang akan dilaksanakan; dan
- 12) Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

5. Jagabaya

Jagabaya berfungsi sebagai pendukung teknis Lurah dalam aspek pemerintahan dan keamanan. Tugasnya adalah membantu Lurah dalam pelaksanaan operasional di kedua bidang itu serta mengelola permasalahan Keistimewaan di sektor pertanahan. Dalam melaksanakan tugas ini, Jagabaya memiliki sejumlah fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian

aktivitas pemerintahan serta keamanan.

- 2) Pengelolaan administrasi pemerintahan
- 3) Penyusunan draft peraturan Kalurahan
- 4) Pelatihan mengenai isu-isu pertanahan
- 5) Pembangunan ketenangan dan keteraturan dalam masyarakat.
- 6) Pelaksanaan tindakan untuk menjaga masyarakat
- 7) Pengawasan terhadap aktivitas sosial politik di area Kalurahan
- 8) Pengelolaan data penduduk
- 9) Koordinasi dalam menangani bencana.
- 10) Penyusunan dan pengelolaan area administratif
- 11) Aktivitas yang berhubungan dengan Keistimewaan dalam sektor pertanahan, seperti
- 12) Penampilan data
- 13) Pengelolaan tanah Kalurahan serta pembuatan peraturan Kalurahan yang berhubungan dengan tanah itu.
- 14) Pelaksanaan kegiatan anggaran yang mencakup
- 15) Kegiatan yang menyebabkan biaya terjadi dalam anggaran pengeluaran sesuai dengan tanggung jawab yang diemban.
- 16) Pelaksanaan anggaran kegiatan sesuai dengan area tanggung jawab.
- 17) Pengawasan kegiatan sesuai dengan area tanggung jawab.
- 18) Penyusunan DPA, DPPA, dan DPAL sesuai dengan tanggung jawab masing-masing bidang.
- 19) Penandatanganan kesepakatan kerja sama dengan penyedia barang atau jasa untuk kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

20) Menyusun laporan tentang pelaksanaan semua kegiatan sesuai dengan area tanggung jawab.

21) Memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Lurah mengenai kebijakan dan langkah yang akan diambil.

6. Ulu-ulu

Ulu-Ulu memiliki peran sebagai elemen pelaksana teknis yang membantu Lurah dalam aspek pembangunan dan kesejahteraan. Tugas Ulu-Ulu ialah mendukung Lurah dalam pelaksanaan operasional yang berhubungan dengan pembangunan dan kesejahteraan, serta mengelola urusan Keistimewaan di bidang pengaturan ruang. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Ulu-Ulu memiliki berbagai fungsi, antara lain:

- 1) Perancangan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian kegiatan pembangunan dan kesejahteraan.
- 2) Pembangunan sarana dan prasarana di kawasan pedesaan.
- 3) Pengenalan, dorongan, dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam aspek ekonomi dan lingkungan.
- 4) Pengumpulan serta pengelolaan Profil Kalurahan.
- 5) Aktivitas yang berhubungan dengan Keistimewaan dalam pengaturan ruang.
- 6) Penyebarluasan informasi mengenai rencana penggunaan ruang di kawasan strategis.
- 7) Menyediakan dukungan dalam pengawasan penggunaan ruang sesuai dengan izin di lokasi-lokasi yang strategis.
- 8) Menyampaikan laporan mengenai ketidaksesuaian dalam penggunaan ruang dan pengelolaan ruang di lokasi-lokasi yang strategis.

- 9) Pelaksanaan kegiatan anggaran.
 - 10) Melaksanakan langkah-langkah yang mengakibatkan pengeluaran anggaran sesuai dengan tanggung jawab yang diemban.
 - 11) Pelaksanaan anggaran kegiatan harus sesuai dengan area tanggung jawab.
 - 12) Pengaturan aktivitas yang berkaitan
 - 13) Penyusunan DPA, DPPA, dan DPAL sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.
 - 14) Melakukan penandatanganan kesepakatan kerja sama dengan penyedia barang dan jasa untuk kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugas.
 - 15) Penyusunan laporan tentang pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk tanggung jawab atas anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan.
 - 16) Pelayanan yang sesuai dengan tanggung jawab yang diemban.
 - 17) Mencari, mengumpulkan, memproses, dan menyajikan data serta informasi yang berkaitan dengan area pekerjaan.
 - 18) Menyusun laporan tentang pelaksanaan semua kegiatan yang sesuai dengan tanggung jawab yang diemban.
 - 19) Memberikan rekomendasi dan pendapat kepada Lurah mengenai kebijakan dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan.
7. Kamituwo

Kamituwa berperan sebagai unsur pendukung Lurah dalam bidang kemasyarakatan. Tugasnya adalah membantu

Lurah dalam melaksanakan operasional di sektor sosial kemasyarakatan serta mengelola urusan Keistimewaan di bidang kebudayaan. Untuk menjalankan tugas tersebut, Kamituwa memiliki beberapa fungsi, antara lain:

- 1) Menyusun rencana, melaksanakan, mengawasi, dan menilai kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat.
- 2) Memberikan pendidikan dan dorongan mengenai hak serta kewajiban masyarakat.
- 3) Mendorong keterlibatan masyarakat
- 4) Mempertahankan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat.
- 5) Menyediakan informasi dan dorongan di berbagai sektor, seperti agama, pekerjaan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, perencanaan keluarga, pendidikan, kesehatan, pemuda, olahraga, organisasi pemuda, dan penanganan kemiskinan;
- 6) Mengatur hal-hal yang berkaitan dengan Keistimewaan di sektor kebudayaan.
- 7) Melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan kebudayaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 8) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan kebudayaan.
- 9) Mengumpulkan informasi mengenai kemungkinan budaya Kalurahan; dan
- 10) Menyelenggarakan dan mengatur Kalurahan budaya dan/atau area budaya.
- 11) Melaksanakan pelaksanaan anggaran

- 12) Melaksanakan langkah-langkah yang menyebabkan pengeluaran dalam anggaran belanja sesuai dengan tanggung jawab yang diembannya.
- 13) Menjalankan anggaran kegiatan sesuai dengan area tanggung jawabnya.
- 14) Mengatur aktivitas yang sesuai dengan tanggung jawab yang dimilikinya.
- 15) Menyiapkan DPA, DPPA, dan DPAL sesuai dengan tanggung jawabnya.
- 16) Menandatangani kontrak kerja sama dengan penyedia barang atau jasa untuk kegiatan yang sesuai dengan tugasnya.
- 17) Menyusun laporan mengenai pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan.
- 18) Menyediakan layanan sesuai dengan tanggung jawab yang diembannya.

8. Pedukuhan

Pelaksana Kewilayahan ialah seorang Dukuh yang berperan sebagai asisten Lurah dalam menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan wilayah, yang dikenal dengan sebutan Padukuhan. Tugas Dukuh meliputi bantuan kepada Lurah dalam melaksanakan fungsi di wilayah Padukuhannya serta mendukung urusan istimewa di bidang kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Dalam menjalankan tugas tersebut, Dukuh memiliki sejumlah fungsi sebagai berikut:

- 1) Mendukung Lurah dalam melaksanakan tanggung jawab di area Padukuhan.

- 2) Pengembangan keamanan dan ketertiban, pelaksanaan perlindungan terhadap masyarakat, pengaturan pergerakan penduduk, serta penataan dan pengelolaan kawasan administratif.
- 3) Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan pembangunan di daerah tersebut.
- 4) Pengembangan masyarakat guna meningkatkan keterampilan dan kesadaran dalam melestarikan lingkungan.
- 5) Melaksanakan usaha pemberdayaan masyarakat guna mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
- 6) Mendukung Lurah dalam
- 7) Mengawasi pemakaian dan pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan/atau tanah Kalurahan.
- 8) Mengawasi penggunaan tata ruang dari Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan/atau tanah Kalurahan.
- 9) Mempertahankan warisan budaya di daerah tersebut.
- 10) Menyediakan bantuan dalam pelayanan publik di kantor Kalurahan.
- 11) Menyusun laporan terkait pelaksanaan seluruh kegiatan di area tanggung jawabnya.

4. Kondisi Geografis

Kalurahan Pagerharjo terletak di Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, yang berada dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan koordinat 07°40'18" LS dan 110°07'52" BT. Luas wilayah ini mencapai 1. 069,5115 hektar, yang meliputi sekitar 16,46% dari total luas Kapanewon Samigaluh. Kebanyakan wilayah Pagerharjo terdiri dari

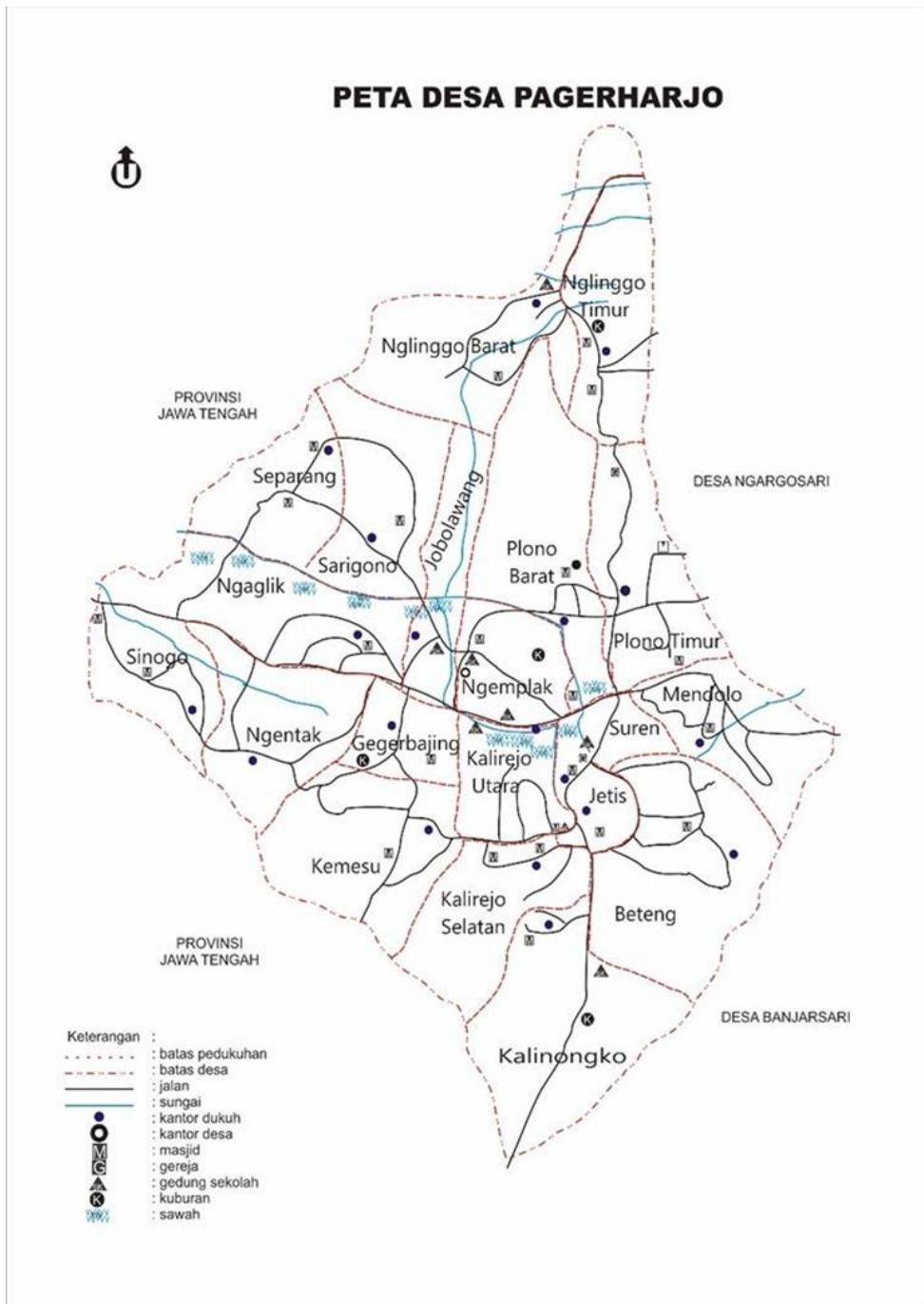
pegunungan, dengan luas area pegunungan sekitar 1. 037 hektar, sementara bagian yang lain adalah dataran yang lebih rendah. Kalurahan ini berada pada ketinggian antara 600 hingga 700 meter di atas permukaan laut.

Luas wilayah Kalurahan Pagerharjo terdiri dari alokasi sebagai berikut: 108,4500 hektar diperuntukkan bagi lahan pertanian, 351,2335 hektar untuk kawasan permukiman, 123,7200 hektar bagi hutan rakyat atau perkebunan, 0,5000 hektar untuk fasilitas perkantoran, 3,2060 hektar untuk area pemakaman, dan 482,0000 hektar untuk kategori lain yang mencakup sungai.

Secara administrasi, Kalurahan Pagerharjo terdiri dari 1. Terdapat 550 Kepala Keluarga (KK), 87 Rukun Tetangga (RT), 43 Rukun Warga (RW), serta 20 Padukuhan. Padukuhan yang dimaksud meliputi Padukuhan Separang, Sarigono, Jobolawang, Sinogo, Ngaglik, Ngentak, Ngemplak, Plono Barat, Plono Timur, Nglinggo Timur, Nglinggo Barat, Gegerbajing, Kemesu, Kalirejo Utara, Kalirejo Selatan, Kalinongko, Jetis, Beteng, Suren, serta Mendolo.

a) Batas Wilayah

Kalurahan Pagerharjo merupakan satu diantara Kalurahan yang terletak di Kapanewon Samiggaluh, Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batasan-batasan wilayah dilihat dari peta sebagai berikut:



Gambar 3.1 Peta Wilayah Kalurahan Pagerharjo

Sumber: Data Sekunder profil Kalurahan Pagerharjo Tahun 2024

b) Luas Wilayah Menurut Penggunaan

Luas pemukiman di daerah tersebut mencapai 351,23 ha, sementara area persawahan seluas 108,45 ha dan perkebunan mencakup 123,72 ha. Terdapat juga lahan untuk makam atau kuburan seluas 3,21 ha, serta area perkantoran yang berukuran 0,50 ha. Selain itu, prasarana umum lainnya menempati luas 482,00 ha. Secara keseluruhan, total luas wilayah ini mencapai 1.069,52 ha.

1. Sawah

Luas area irigasi setengah teknis di wilayah ini mencapai 58,20 ha, sedangkan lahan yang bergantung pada tadah hujan seluas 50,25 ha. Dengan demikian, total luas area pertanian di daerah ini adalah 108,45 ha.

2. Tanah Kering

Luas area tegal atau ladang di daerah ini mencapai 123,72 ha, sementara pemukiman mencakup luas 351,23 ha.

3. Tanah Fasilitas Umum

Luas tanah kas desa di wilayah ini mencapai 338,05 ha, diikuti oleh lapangan olahraga seluas 0,91 ha. Area perkantoran mencakup 0,50 ha, sedangkan bangunan sekolah memiliki luas 1,90 ha. Pertokoan di daerah ini seluas 2,72 ha, dan pasar desa menempati 9,17 ha. Selain itu, terdapat jalan yang meluas hingga 6,61 ha dan kolam seluas 2,80 ha.

c) Jarak Ke Pusat Pemerintahan

Jarak Kalurahan Pagerharjo ke pusat pemerintahan bervariasi; untuk mencapai Kecamatan, diperlukan waktu sekitar 30 menit dengan jarak 6 km. Sementara itu, untuk menuju Kabupaten, jaraknya adalah 40 km yang dapat ditempuh dalam waktu 60 menit.

Untuk Provinsi, jaraknya mencapai 45 km dengan waktu tempuh yang sama, yaitu 60 menit. Sedangkan jarak ke Ibukota Negara adalah 500 km.

5. Kondisi Demografis

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	2.556	50,7%
2	Perempuan	2.487	49,3%
Jumlah		5.043	100%

Sumber: Data Sekunder RPJMKal Kalurahan Pagerharjo Tahun 2022-2027

Dari tabel di atas menunjukkan jumlah Laki-laki: 50,7% dari total penduduk dan Perempuan: 49,3% dari total penduduk. Rasio gender di Pagerharjo hampir seimbang dengan sedikit kelebihan jumlah laki-laki dibandingkan perempuan. Perbedaan ini tidak signifikan, tetapi dapat menunjukkan kecenderungan umum dalam distribusi penduduk. Dengan selisih 69 orang antara laki-laki dan perempuan, komposisi gender di Pagerharjo cukup seimbang. Ini menunjukkan bahwa Kalurahan ini tidak mengalami ketidakseimbangan gender yang besar.

Keseimbangan gender yang relatif sama penting untuk perencanaan kebijakan sosial dan pembangunan. Pemerintah desa dapat menggunakan data ini untuk merencanakan program-program yang relevan dengan kebutuhan penduduk berdasarkan jenis kelamin, seperti program kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Secara umum, data demografis dari Kalurahan Pagerharjo menunjukkan distribusi populasi yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Dengan jumlah penduduk yang

cukup signifikan, hal ini memerlukan perhatian dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan sosial.

Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase%
1	Balita	170	128	298	5,91 %
2	Anak-anak	366	314	680	13,49%
3	Remaja	395	350	745	14,78%
4	Usia produktif	815	808	1623	32,19%
5	Usia non produktif	265	592	857	17,00%
6	Usia lanjut	245	295	540	10,71%
Jumlah		2.256	2.487	5.043	100%

Sumber: Data Sekunder RPJMKal Kalurahan Pagerharjo Tahun 2022-2027

Dari data di atas menunjukkan gambaran menyeluruh tentang struktur usia penduduk di Pagerharjo, yang berguna untuk perencanaan sosial, ekonomi, dan pengembangan komunitas. Kelompok balita dan anak-anak dengan 1 978 orang (298 balita + 680 anak-anak), menandakan adanya populasi muda yang memerlukan perhatian dalam hal pendidikan dan kesehatan. Remaja dan Usia Produktif dengan total 2368 orang (745 remaja + 1623 usia produktif), menunjukkan kelompok usia yang aktif secara ekonomi dan sosial. Usia Non Produktif dan Usia Lanjut dengan total 1397 orang (857 usia non-produktif + 540 usia lanjut).

Populasi usia produktif (25-64 tahun) adalah yang terbesar, menunjukkan bahwa Kalurahan Pagerharjo memiliki tenaga kerja yang signifikan. Ada kecenderungan jumlah perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki dalam kategori usia non-produktif dan usia lanjut, yang sering terjadi karena perbedaan harapan hidup antara laki-laki dan perempuan. Kesehatan dan Pendidikan dengan fokus pada balita, anak-anak, dan remaja untuk memastikan mereka mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang memadai serta Kesejahteraan dan Dukungan Lansia dengan penyediaan layanan untuk lansia dan usia non-produktif, termasuk perawatan kesehatan dan dukungan sosial, menjadi penting.

Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Persentase%
1	Usia 3-6 th. yang belum masuk TK	377	333	14,08%
2	Usia 3-6 th. yang sedang TK/PAUD			
3	Usia 7-18 th. Tidak pernah sekolah	179	168	6,88%
4	Usia 7-18 th. Sedang sekolah			
5	Usia 18-56 th. Tidak pernah sekolah			
6	Usia 18-56 th. Tidak tamat SD			
7	Sd/sederajat	775	796	31,16%
8	SMP/sederajat	456	456	18,09%

No	Tingkat pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Persentase%
9	SMA/ sederajat	685	615	25,78%
10	D1/ sederajat	7	13	0,40%
11	D2/ sederajat	14	29	0,85%
12	D3/ sederajat	61	76	2,72%
13	S1/ sederajat			
14	S2/ sederajat	2	1	0,06%
Jumlah		2.556	2.487	100%

Sumber: Data Sekunder RPJMKal Kalurahan Pagerharjo Tahun 2022-2027

Tabel di atas menunjukkan distribusi pendidikan di Kalurahan Pagerharjo dengan ada sejumlah anak usia 3-6 tahun yang belum memasuki TK atau PAUD, yang menunjukkan potensi kebutuhan untuk lebih banyak fasilitas pendidikan dini. Beberapa anak berusia 7-18 tahun yang tidak pernah bersekolah menunjukkan adanya hambatan dalam akses atau partisipasi dalam pendidikan di kelompok usia tersebut. Sebagian besar penduduk telah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dengan jumlah lulusan SD dan SMP yang signifikan. Pendidikan SMA juga menunjukkan prevalensi yang cukup baik.

Pendidikan tinggi masih terbatas dengan sedikit jumlah lulusan dari program D1, D2, D3, dan sangat sedikit yang mencapai S2. Ini bisa menunjukkan adanya kebutuhan untuk peningkatan akses dan dukungan untuk pendidikan tinggi. Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran tentang distribusi tingkat pendidikan di Pagerharjo,

menyoroti kebutuhan untuk memperbaiki akses pendidikan dini dan tinggi, serta memperhatikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah menunjukkan pencapaian yang baik.

6. Kondisi Ekonomi

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Kalurahan Pagerharjo aspek ekonomi dan mata pencaharian sangat bervariasi yang didominasi oleh pekerjaan sebagai petani.

1) Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian di Kalurahan Pagerharjo sangat beragam dan bervariasi, diantaranya:

Tabel 3.7 Mata Pencaharian Penduduk

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Persentase%
1	Petani	2210	2278	89,00%
2	PNS	28	10	0,75%
3	Pedagang	10	15	0,50%
4	Perawat swasta	-	4	0,08%
5	TNI	3	-	0,06%
6	POLRI	12	-	0,24%
7	Pengusaha kecil dan menengah	40	14	1,07%
8	Dukun kampung terlatih	-	3	0,06%
9	Jasa pengobatan alternatif	2	-	0,04%
10	Dosen swasta	1	-	0,02%

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Persentase%
11	Pengusaha besar	5	-	0,10%
12	Seniman	1	-	0,02%
13	Kary. Perusahaan swasta	185	108	5,81%
14	Kary. Perusahaan pemerintah	58	55	2,24%
15	TKI	1	-	0,02%
Jumlah		2556	2487	100%

Sumber: Data Sekunder RPJMKal Kalurahan Pagerharjo Tahun 2022-2027

Data di atas menunjukkan bahwa Kalurahan Pagerharjo memiliki berbagai jenis pekerjaan, dengan distribusi yang mengindikasikan adanya variasi dalam sektor ekonomi. Pekerjaan petani adalah yang paling umum di Pagerharjo, dengan total laki-laki sebanyak 2210 dan perempuan sebanyak 2278 yang terlibat dalam profesi ini. Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan aktivitas utama dan penting dalam ekonomi setempat. Di Kalurahan Pagerharjo, terdapat sejumlah terbatas pegawai negeri sipil, terdiri dari 28 laki-laki dan 10 perempuan. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan di sektor publik tergolong sedikit jika dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Jumlah pedagang pria (10) dan wanita (15) menunjukkan adanya aktivitas perdagangan, meskipun jumlahnya relatif kecil jika dibandingkan dengan sektor pertanian.

Terdapat sejumlah kecil perawat swasta perempuan (4) di wilayah ini, yang menunjukkan adanya layanan kesehatan di sektor non-pemerintah. TNI dan POLRI, yang terdiri dari 3 anggota laki-laki TNI

dan 12 anggota laki-laki POLRI, menunjukkan partisipasi dalam sektor keamanan; namun, tidak terdapat perempuan yang tercatat dalam profesi ini di Kalurahan Pagerharjo. Pengusaha Kecil dan Menengah, terdapat sejumlah pengusaha berukuran kecil dan menengah, termasuk laki-laki sebanyak empat puluh orang dan perempuan sebanyak empat belas orang. Hal ini menunjukkan adanya pergolakan kewirausahaan di Kalurahan ini. Dukun Kampung Terlatih, terdapat sejumlah perempuan (3) yang menjalankan peran sebagai dukun kampung terlatih, yang mengindikasikan adanya kepercayaan serta praktik pengobatan tradisional di Kalurahan Pagerharjo. Layanan Pengobatan Alternatif hanya melibatkan sedikit pria (2) dalam bidang ini, yang menunjukkan bahwa sektor ini cukup kecil di Kalurahan Pagerharjo.

Pada lembaga pendidikan tinggi swasta, hanya terdapat satu pria yang bekerja sebagai dosen, yang menunjukkan bahwa pekerjaan di sektor ini tidak banyak menarik minat. Pengusaha besar, terdapat sejumlah kecil pengusaha besar (5 pria), mengindikasikan bahwa sektor bisnis besar belum maju di Kalurahan Pagerharjo. Dalam komunitas ini, hanya terdapat satu pria yang terdaftar sebagai seniman, menunjukkan bahwa seni mungkin bukan sektor yang penting dalam perekonomian daerah tersebut. Dalam Kalurahan Pagerharjo, jumlah karyawan di perusahaan swasta lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan pemerintah. Terdapat 185 karyawan laki-laki dan 108 karyawan perempuan di sektor swasta, sementara di sektor pemerintah jumlahnya terdiri dari 58 karyawan laki-laki dan 55 karyawan perempuan. Hal ini menunjukkan dominasi sektor swasta di daerah tersebut. TKI (Tenaga Kerja Indonesia) terdapat seorang pria yang berprofesi sebagai TKI, mencerminkan adanya emigrasi tenaga kerja dari Kalurahan Pagerharjo.

2) Fasilitas di Kalurahan Pagerharjo

a) Fasilitas Pendidikan

Tabel 3.8 Pendidikan Formal

No	Pendidikan Formal	Jumlah
1	Play Group/PAUD	7 unit
2	TK	5 unit
3	SD	5 unit
4	SMP	1 unit
5	SMA	1 unit
Jumlah		19 unit

Sumber: Data Sekunder RPJMKal Kalurahan Pagerharjo Tahun 2022-2027

Dari tabel di atas menunjukkan ketersediaan pendidikan formal di Kalurahan Pagerharjo melalui berbagai jenjang, diantaranya: Play Group/PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), terdapat 7unit yang menyediakan pendidikan untuk anak-anak usia dini. Unit-unit ini biasanya fokus pada pengembangan keterampilan dasar dan sosial emosional pada anak-anak sebelum memasuki sekolah dasar. TK (Taman Kanak-Kanak), ada 5unit TK yang melayani anak-anak usia prasekolah. TK berfungsi sebagai jembatan antara PAUD dan SD, memberikan dasar pendidikan awal serta persiapan untuk masuk ke tingkat pendidikan dasar. Di tingkat SD/Sederajat, terdapat 5 unit SD atau sekolah setara yang menawarkan pendidikan dasar bagi anak-anak usia sekolah dasar. SD berfungsi sebagai tempat di mana anak-anak memulai pendidikan formal mereka dan mempelajari berbagai mata pelajaran dasar.

SMP (Sekolah Menengah Pertama), ada 1 unit SMP yang menawarkan pendidikan untuk anak-anak usia remaja. SMP merupakan jenjang pendidikan lanjutan setelah SD dan mempersiapkan siswa untuk pendidikan menengah. SMA/Sederajat (Sekolah Menengah Atas), terdapat 1 unit SMA atau sekolah yang setara, yang melayani pendidikan menengah atas bagi siswa yang telah menyelesaikan SMP. SMA mempersiapkan siswa untuk pendidikan tinggi atau memasuki dunia kerja dengan berbagai mata pelajaran dan keterampilan. Secara keseluruhan,.

Tabel 3.9 Pendidikan Formal Keagamaan

No	Pendidikan Formal	Jumlah
1	Raudhatul Anfal	1 unit
2	Ibtidaiyah	2 unit
3	Sekolah minggu	2 unit
Jumlah		5 unit

Sumber: Data Sekunder RPJMKal Kalurahan Pagerharjo Tahun 2022-2027

Dari tabel di atas menunjukan di Kalurahan Pagerharjo pendidikan formal tersedia dalam bentuk lembaga-lembaga pendidikan agama dan keagamaan dengan rincian sebagai berikut: Raudhatul Anfal, terdapat 1 unit Raudhatul Anfal. Ini adalah lembaga pendidikan yang umumnya berfokus pada pengajaran agama Islam di tingkat anak-anak. Raudhatul Anfal berfungsi sebagai tempat untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan agama kepada anak-anak sejak usia dini. Ibtidaiyah, ada 2 unit Ibtidaiyah, yang merupakan lembaga pendidikan dasar Islam.

Ibtidaiyah biasanya menawarkan pendidikan pada tingkat dasar, setara dengan Sekolah Dasar (SD) dalam sistem pendidikan umum, dengan penekanan pada kurikulum agama Islam. Lembaga ini bertujuan untuk memberikan pendidikan agama yang mendalam serta keterampilan akademis dasar.

Sekolah Minggu, terdapat 2 unit Sekolah Minggu. Ini adalah lembaga pendidikan keagamaan Kristen yang menyelenggarakan kegiatan belajar bagi anak-anak, biasanya pada hari Minggu. Sekolah Minggu berfungsi untuk mengajarkan ajaran agama Kristen dan nilai-nilai moral kepada anak-anak. Secara keseluruhan, Kalurahan Pagerharjo menyediakan berbagai fasilitas pendidikan yang berfokus pada pembelajaran agama, dengan adanya lembaga pendidikan Islam dan Kristen yang melayani kebutuhan pendidikan keagamaan anak-anak di komunitas tersebut

b) Fasilitas ibadah

Tabel 3.10 Sarana Ibadah

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	28
2	Mushola	13
3	Gereja	1
4	GKJ	1
Jumlah		42

Sumber: Data Sekunder RPJMKal Kalurahan Pagerharjo Tahun 2022-2027

Berdasarkan tabel di atas Kalurahan Pagerharjo menunjukkan keragaman dalam sarana ibadah, mencerminkan komitmen dan kebutuhan religius dari berbagai komunitas di desa: Masjid dan Mushola, menyediakan banyak fasilitas ibadah untuk umat Muslim, mencakup berbagai area di desa dan memastikan akses yang mudah untuk praktik ibadah sehari-hari. Gereja, menyediakan tempat ibadah bagi komunitas Kristen, mendukung kegiatan keagamaan dan sosial bagi umat Kristen di desa. GKJ, menambah beragaman denominasi Kristen di desa, menawarkan layanan keagamaan bagi anggota Gereja Kristen Jawa. Dengan keberagaman sarana ibadah ini, Kalurahan Pagerharjo dapat mendukung praktik keagamaan yang beragam dan memberikan fasilitas yang memadai untuk kebutuhan spiritual masyarakatnya.

c) Fasilitas Kesehatan

Tabel 3.11 Sarana dan Prasarana Kesehatan

No	Sarana dan Prasarana Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas	1 unit
2	Pustu	1 unit
3	Posyandu	20 unit
4	Rumah praktek dokter	1 unit
5	Rawat inap	1 unit
Jumlah		24 unit

Sumber: Data Sekunder RPJMKal Kalurahan Pagerharjo Tahun 2022-2027

Dari tabel di atas menunjukkan di Kalurahan Pagerharjo, terdapat beragam fasilitas kesehatan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Tersedia Puskesmas sebagai pusat layanan kesehatan utama, yang diikuti oleh Pustu untuk layanan kesehatan tingkat lebih lanjut. Selain itu, ada banyak Posyandu yang berfokus pada kesehatan ibu dan anak. Untuk layanan konsultasi medis pribadi, terdapat rumah praktek dokter, dan fasilitas rawat inap juga tersedia untuk perawatan pasien yang memerlukan perhatian lebih intensif. Semua fasilitas ini bersama-sama memastikan akses yang luas dan komprehensif terhadap layanan kesehatan di Kalurahan ini.

d) Fasilitas Umum

Tabel 3.12 Sarana Olahraga

No	Sarana Olahraga	Jumlah
1	Lapangan Sepak Bola	1 unit
2	Lapangan Bulutangkis	1 unit
3	Lapangan Volybal	4 unit
4	Meja Pingpong	1 unit
Jumlah		7 unit

Sumber: Data Sekunder RPJMKal Kalurahan Pagerharjo Tahun 2022-2027

Berdasarkan tabel di atas di Kalurahan Pagerharjo, terdapat beberapa fasilitas olahraga yang mendukung aktivitas fisik dan rekreasi masyarakat. Fasilitas tersebut mencakup lapangan sepak bola, lapangan bulutangkis, lapangan voli, dan meja pingpong. Keberadaan fasilitas ini memungkinkan warga untuk berpartisipasi dalam berbagai jenis olahraga, baik secara individu maupun kelompok, serta mendukung kesehatan dan kebugaran komunitas.

Tabel 3.13 Prasarana Wisata

No	Sarana dan Prasarana Hiburan/Wisata	Jumlah
1	Kebun teh	1 tempat
2	Air Terjun	2 tempat
Jumlah		3 tempat

Sumber: Data Sekunder RPJMKal Kalurahan Pagerharjo Tahun 2022-2027

Berdasarkan tabel di atas di Kalurahan Pagerharjo, terdapat beberapa sarana dan prasarana yang menawarkan pengalaman hiburan dan wisata bagi masyarakat dan pendatang. Kebun teh, merupakan salah satu daya tarik utama yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar tentang pertanian, tetapi juga sebagai lokasi rekreasi yang menawarkan pemandangan hijau yang menenangkan dan udara segar. Kebun teh ini menawarkan pengunjung peluang untuk menikmati keindahan alam sekaligus mempelajari cara budidaya tanaman teh.

Selain itu, Kalurahan Pagerharjo juga memiliki dua tempat air terjun yang menambah daya tarik wisatawan. Air terjun ini menawarkan keindahan alam yang spektakuler dan menjadi lokasi ideal untuk bersantai, berfoto, atau menikmati suasana alam yang menyejukkan. Keduanya merupakan destinasi wisata yang populer, memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk terhubung dengan alam dan menikmati keindahan alam sekitar. Secara keseluruhan, fasilitas hiburan dan wisata di Kalurahan Pagerharjo menyediakan pengalaman yang memadukan keindahan alam dengan kesempatan untuk relaksasi dan rekreasi.

e) Fasilitas Ekonomi

Tabel 3.14 Lembaga Ekonomi

No	Lembaga Ekonomi dan Jasa	Jumlah
1	BumDes	1 tunit
2	LKD	1 unit
3	BMT	1 unit
4	CU	1 unit
5	Pasar desa	1 unit
6	Jumlah usaha toko/kios	46 unit
Jumlah		51 unit

Sumber: Data Sekunder RPJMKal Kalurahan Pagerharjo Tahun 2022-2027

Sesuai tabel di atas, di Kalurahan Pagerharjo, berbagai lembaga ekonomi dan jasa sangat berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) berfungsi untuk mengelola usaha-usaha desa dan menyediakan layanan ekonomi bagi warga.. LKD (Lembaga Keuangan Desa) dan BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) masing-masing berfungsi dalam menyediakan layanan keuangan, seperti kredit dan tabungan, untuk membantu perekonomian lokal. CU (Credit Union) juga hadir untuk menawarkan layanan keuangan berbasis koperasi kepada anggotanya, memfasilitasi pinjaman dan tabungan dengan tujuan memberdayakan masyarakat.

Pasar desa yang tersedia menyediakan tempat bagi pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi barang dan kebutuhan sehari-hari, berperan sebagai pusat aktivitas ekonomi lokal. Selain itu, terdapat 46

usaha toko dan kios yang menyuplai berbagai barang dan jasa kepada masyarakat, memperkuat ekonomi lokal dengan menyediakan kebutuhan sehari-hari. Secara keseluruhan, keberadaan lembaga-lembaga ekonomi dan jasa di Kalurahan Pagerharjo mendukung perekonomian lokal dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari.

B. Gambaran Program Inklusif Desa

1. Program Pembangunan Desa

Program/ kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kalurahan Pagerharjo selama 6 (enam) tahun kedepan adalah untuk mencapai visi dan misi Kalurahan. Program/ kegiatan pembangunan Kalurahan tersebut dibagi menjadi 4 (empat) Bidang yang menjadi kewenangan Kalurahan:

a) Gambaran Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- 1) Penyediaan Gaji Tetap dan Tunjangan untuk Kepala Desa
- 2) Penyediaan Pendapatan Tetap dan Tunjangan bagi Perangkat Desa.
- 3) Penyelenggaraan Jaminan Sosial untuk Kepala Desa dan Anggota Perangkat Desa
- 4) Penyelenggaraan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, peralatan kantor, pakaian
- 5) Pengalokasian Tunjangan Badan Pemberdayaan Desa
- 6) Penyediaan Operasional BPD (Rapat dan pertemuan termasuk ATK, konsumsi, perlengkapan kantor, seragam)
- 7) Penyediaan fasilitas (aset tetap) untuk kantor/pemerintahan.
- 8) Perawatan Bangunan/ Fasilitas Kantor Desa

- 9) Pembangunan, pemulihan, atau peningkatan gedung dan fasilitas kantor desa.
- 10) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar, Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga)
- 11) Pengumpulan/Pencatatan/Pembaruan Profil Desa (data demografi dan potensi desa)
- 12) Pengaturan administrasi dan penyimpanan arsip pemerintahan desa
- 13) Pendidikan dan Peningkatan Kesadaran Publik mengenai Populasi dan Pencatatan Sipil
- 14) Melakukan Pemetaan dan Analisis Kemiskinan di Desa dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat
- 15) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes)
- 16) Pelaksanaan Musyawarah Desa lainnya (musduk rembug warga dan aktivitas lain yang tidak berlangsung secara teratur)
- 17) Menyusun Dokumen Perencanaan Desa seperti RPJMDes, RKPDes, dan dokumen terkait lainnya.
- 18) Pembuatan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ Perubahan APB Desa/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumennya)
- 19) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
- 20) Penyusunan Kebijakan Desa (Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan dokumen lainnya - di luar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
- 21) Penyusunan Laporan oleh Kepala Desa/Pelaksanaan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan)

- 22) Pengembangan Sistem Informasi untuk Desa
 - 23) Dukungan terhadap pelaksanaan serta sosialisasi pemilihan Kepala Desa, penyaringan dan penjaringan perangkat desa, serta pemilihan.
 - 24) Penyelenggaraan kompetisi antar wilayah serta pengiriman delegasi untuk mengikuti Lomba Desa.
 - 25) Dukungan untuk Biaya Operasional dan Biaya Lainnya bagi Desa yang Sedang Dipersiapkan.
 - 26) Badan Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Penetapan Registrasi Dokumen Pertanahan)
 - 27) Memfasilitasi Proses Sertifikasi Tanah bagi Komunitas Berpenghasilan Rendah
 - 28) Penyelesaian Sengketa Tanah melalui Mediasi
 - 29) Pendidikan Agraria
 - 30) Administrasi Pajak atas Tanah dan Bangunan (PBB)
 - 31) Penetapan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa.
- b) Gambaran Program Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 1) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak/Taman Penitipan Anak/Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an/Taman Pendidikan Al-Qur'an/Madrasah Non-Formal yang dimiliki oleh Desa (Bantuan Honor Pengajar Berbasis Pemakaian).
 - 2) Dukungan untuk pelaksanaan PAUD (Alat Permainan Edukatif Sarana PAUD dan seterusnya)
 - 3) Pengajaran dan Pelatihan Pendidikan untuk Komunitas
 - 4) Perawatan Fasilitas dan Infrastruktur Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar yang Dimiliki oleh Desa

- 5) Pemeliharaan Fasilitas dan Infrastruktur PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal yang Dimiliki Desa.
- 6) Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, atau pengadaan sarana dan prasarana serta alat peraga edukatif untuk PAUD, TK, atau T.
- 7) Pembangunan, perbaikan, atau peningkatan fasilitas perpustakaan, taman bacaan desa, atau sanggar belajar.
- 8) Pengembangan dan Pembinaan Tempat Seni serta Pendidikan
- 9) Dukungan Akademis untuk Siswa yang Kurang Mampu atau Berprestasi Tinggi
- 10) Penyelenggaraan Posyandu (Pemberian Makanan Tambahan, Kelas untuk Ibu Hamil, Kelas untuk Lansia, Insentif bagi Kader Posyandu)
- 11) Penyuluhan serta Pelatihan di Sektor Kesehatan (untuk Komunitas Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lainnya)
- 12) Pendidikan tentang Kesehatan Desa Siaga
- 13) Pengasuhan Bersama atau Program Pengembangan Keluarga untuk Anak Usia Dini (BKB)
- 14) Perawatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
- 15) Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, pengadaan, sarana, dan prasarana untuk Posyandu, Polindes, serta PKD.
- 16) Pemeliharaan Jalan di Desa
- 17) Perawatan Bangunan/Fasilitas Balai Desa/Balai Komunitas

- 18) Perawatan Tempat Pemakaman yang Dimiliki oleh Desa/Situs Sejarah yang Dimiliki oleh Desa/Petilasan yang Dimiliki oleh Desa
- 19) Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung di tingkat Desa
- 20) Perawatan Monumen/Gapura/Perbatasan Desa
- 21) Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pengerasan jalan desa.
- 22) Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pengerasan jalan di lingkungan permukiman atau gang.
- 23) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Pertanian
- 24) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Kepemilikan Desa
- 25) Pembangunan, rehabilitasi, atau peningkatan fasilitas jalan desa (termasuk gorong-gorong, saluran box/slab culvert, dan drainase).
- 26) Konstruksi/ Perbaikan/ Peningkatan Gedung Desa/ Gedung Masyarakat
- 27) Pembangunan, perbaikan, atau peningkatan tempat pemakaman milik desa, situs bersejarah milik desa, atau lokasi petilasan.
- 28) Penyusunan/Pembaruan Peta Kawasan dan Sosial Desa
- 29) Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang Desa
- 30) Pembangunan/Pemulihan/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa

- 31) Dukungan dalam pelaksanaan program Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) oleh GAKIN.
- 32) Pengembangan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih yang Dimiliki oleh Desa (Mata Air/Tampungan Air Hujan)
- 33) Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Permukiman (Saluran Air, Parit, dan lain-lain di luar fasilitas jalan)
- 34) Pembangunan, Perbaikan, dan Peningkatan Sistem Penyambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (meliputi perpipaan dan lainnya)
- 35) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Pengelolaan Sampah di Desa/Permukiman (Penampungan Bank Sampah)
- 36) Pengembangan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Jamban Umum/MCK umum dan sejenisnya.
- 37) Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa
- 38) Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran mengenai Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 39) Pelaksanaan Informasi Publik Desa (Contoh: Pembuatan Poster/Baliho Informasi tentang penetapan/LPJ APB Desa)
- 40) Pengelolaan serta Pembuatan Jaringan atau Instalasi Komunikasi dan Informasi untuk Desa setempat.
- 41) Pemeliharaan Fasilitas dan Infrastruktur serta Transportasi Desa
- 42) Konstruksi/Perbaikan/Peningkatan/Pembelian Fasilitas dan Infrastruktur Transportasi Desa
- 43) Pemeliharaan Fasilitas dan Infrastruktur Pariwisata yang Dimiliki oleh Desa
- 44) Pengembangan Wisata di Tingkat Desa

45) Pembangunan, perbaikan, dan peningkatan fasilitas serta infrastruktur pariwisata yang dimiliki oleh desa.

c) Gambaran Program Pembinaan Kemasyarakatan

- 1) Pelaksanaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan tempat pengawasan untuk pelaksanaan jadwal ronda)
- 2) Penguatan dan Penambahan Kemampuan Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
- 3) Program Pelatihan tentang Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Bencana di Tingkat Desa
- 4) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana pada Tingkat Lokal di Desa
- 5) Pengembangan Kelompok Seni dan Budaya di Tingkat Desa
- 6) Pengiriman Kontingen Group Seni dan Budaya sebagai Perwakilan Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
- 7) Pelaksanaan Festival Seni Budaya dan Agama (peringatan hari kemerdekaan dan hari besar)
- 8) Perawatan Fasilitas dan Infrastruktur Budaya/Rumah Adat/Agama yang Dimiliki oleh Desa
- 9) Pembangunan, rehabilitasi, dan perbaikan sarana serta prasarana budaya, rumah adat, dan tempat ibadah yang dimiliki oleh desa.
- 10) Program Budaya Desa Mandiri
- 11) Pengiriman Kontingen Pemuda dan Olahraga sebagai Perwakilan Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
- 12) Penyelenggaraan pelatihan bagi pemuda (Pelatihan Penyadaran terhadap Wawasan Kebangsaan dan lainnya).

- 13) Pelaksanaan Festival atau Lomba Pemuda dan Olahraga di tingkat Desa
 - 14) Perawatan Fasilitas dan Infrastruktur Pemuda serta Olahraga yang Dimiliki oleh Desa
 - 15) Pembangunan, pemulihan, dan perbaikan fasilitas serta infrastruktur yang dimiliki desa untuk bidang kepemudaan dan olahraga.
 - 16) Pengembangan Karang Taruna/Klub Pemuda/Klub Olahraga
 - 17) Pengembangan Lembaga Adat
 - 18) Pengembangan LKMD/LPM/LPMD
 - 19) Pengembangan PKK
 - 20) Program Sertifikasi bagi Lembaga Kemanusiaan
- d) Gambaran Program Pemberdayaan Masyarakat
- 1) Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan kolam perikanan darat yang dimiliki oleh desa.
 - 2) Bantuan Sektor Perikanan (Benih/Pakan/dan lain-lain)
 - 3) Program Pelatihan/Pendidikan/Pengenalan Teknologi Tepat Guna bagi Perikanan Darat/Nelayan.
 - 4) Peningkatan Hasil Pertanian Pangan (Peralatan Produksi dan Pengolahan Pertanian, Penggilingan Padi atau Jagung)
 - 5) Peningkatan Hasil dari Sektor Peternakan (Peralatan Produksi dan Pengolahan Peternakan, Kandang, serta yang lainnya)
 - 6) Meningkatkan Ketahanan Pangan di Tingkat Desa (seperti Lumbung Desa dan lainnya) (persiapan untuk menghadapi bencana)
 - 7) Pemeliharaan Saluran Irigasi Kecil/Sederhana

- 8) Pendidikan/Workshop/Pengenalan Teknologi Yang Sesuai untuk Pertanian/Peternakan
- 9) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tingkat Tersier/Sederhana
- 10) Peningkatan kemampuan Kepala Desa
- 11) Penguatan kemampuan perangkat desa
- 12) Penguatan kemampuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- 13) Pelatihan dan Penyuluhan untuk Pemberdayaan Perempuan
- 14) Pelatihan dan Pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas.
- 15) Pendidikan mengenai Pengelolaan Koperasi KUD dan UMKM
- 16) Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur untuk UMKM serta Koperasi
- 17) Pengadaan Fasilitas yang Sesuai untuk Meningkatkan Ekonomi Desa Non-Pertanian
- 18) Pelatihan Manajemen BUM Desa (Pelatihan yang diselenggarakan oleh Desa)
- 19) Perawatan Pasar Desa/Kios yang dimiliki oleh Desa
- 20) Pembangunan, rehabilitasi, atau peningkatan pasar desa serta kios yang dimiliki oleh desa.
- 21) Peningkatan Industri Kecil Tingkat Desa
- 22) Penyelenggaraan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan bagi kelompok usaha ekonomi yang produktif.

Secara umum program pembangunan di Kalurahan Pagerharjo, seperti di banyak wilayah pedesaan di Indonesia, mencakup berbagai aspek untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Program-program ini melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat,

serta partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Berikut adalah beberapa jenis program pembangunan yang ada di Kalurahan Pagerharjo:

a) Pembangunan Infrastruktur

Peningkatan Jalan dan Jembatan. Program ini untuk memperbaiki dan membangun jalan serta jembatan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar desa dan ke pusat-pusat ekonomi. Pembangunan fasilitas umum, seperti pasar umum, gedung serbaguna, balai desa, balai pedukuhan, poskampling.

b) Program Pertanian

Peningkatan produksi pertanian yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui penyuluhan, pelatihan, kelompok tani, bantuan bibit, dan teknologi pertanian. Pengelolaan sumber daya air adalah program untuk meningkatkan sistem irigasi dan pengelolaan air untuk mendukung pertanian.

c) Pendidikan dan Kesehatan

Peningkatan fasilitas pendidikan dengan pembangunan dan perbaikan sekolah, penyediaan buku dan peralatan pendidikan, serta program pelatihan untuk tenaga pengajar. Fasilitas kesehatan dengan pelatihan kader serta peningkatan layanan kesehatan, dan program kesehatan masyarakat seperti imunisasi dan penyuluhan gizi.

d) Ekonomi dan Kesejahteraan

Program pemberdayaan ekonomi untuk mendukung usaha kecil dan mikro, pelatihan keterampilan, pembinaan, pengelompokan, dan pemberian akses ke modal usaha. Bantuan sosial adalah program bantuan untuk keluarga kurang mampu, seperti bantuan langsung tunai, subsidi pangan, dan bantuan sosial lainnya.

e) Pengembangan Pariwisata

Peningkatan infrastruktur pariwisata, membangun fasilitas yang mendukung pariwisata seperti homestay, pusat informasi wisata, dan jalur trekking. Promosi budaya dan wisata lokal, program ini untuk mempromosikan budaya lokal dan potensi wisata dengan tujuan untuk menarik pengunjung dan mendukung ekonomi lokal.

f) Pengelolaan Lingkungan

Konservasi lingkungan adalah program untuk menjaga kelestarian lingkungan, seperti penanaman pohon, pengelolaan sampah, dan perlindungan terhadap sumber daya alam.

g) Partisipasi Masyarakat

Musyawarah desa/Kalurahan adalah kegiatan musyawarah desa/Kalurahan untuk merencanakan dan memprioritaskan pembangunan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Serta program pemberdayaan masyarakat guna untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Sehingga kontribusi dari masyarakat benar-benar menjadi acuan dalam pembangunan di Kalurahan Pagerharjo.

2. Gambaran Umum Strategi Pembangunan Desa

Strategi dan kebijakan adalah rencana menyeluruh tentang bagaimana Pemerintah Kalurahan Pagerharjo dapat mencapai tujuan serta target RPJMKal Tahun 2022 – 2027 dengan cara yang tepat dan efisien. Dengan menerapkan pendekatan yang komprehensif, strategi dapat berperan sebagai sarana untuk melaksanakan perubahan, perbaikan, dan peningkatan kinerja dalam birokrasi. Perencanaan strategis tidak hanya bertujuan untuk mengatur kegiatan pembangunan,

tetapi juga mencakup semua program yang mendukung dan memfasilitasi pelayanan kepada masyarakat agar dapat dilaksanakan dengan baik.

Strategi adalah metode umum yang berkaitan dengan penerapan gagasan, perencanaan, dan pelaksanaan suatu aktivitas dalam periode waktu tertentu. Strategi merupakan kumpulan langkah-langkah yang meliputi rencana-rencana indikatif untuk mencapai tujuan serta cita-cita. Strategi harus dijadikan salah satu pedoman utama dalam merencanakan pembangunan Kalurahan. Strategi didefinisikan sebagai pernyataan yang menggambarkan metode untuk mencapai tujuan dan sasaran, dan kemudian dijelaskan melalui sekumpulan kebijakan yang terperinci.

Arah kebijakan adalah kumpulan prioritas yang berfungsi sebagai panduan dan dasar untuk rencana pelaksanaan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Panduan yang telah disusun bertujuan untuk membimbing strategi dan pelaksanaan pembangunan agar lebih terpadu dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan selama enam tahun yang akan datang. Oleh karena itu, diharapkan dapat memproduksi hasil dari pembangunan yang lebih baik. Penyusunan arah kebijakan bertujuan untuk merancang strategi yang efektif, sehingga memiliki fokus yang jelas dan sesuai dengan ketentuan pelaksanaannya.

Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan Visi dan Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan tahun 2022 – 2027 adalah sebagai berikut:

Misi I.

”Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan berbasis kedaulatan rakyat dengan mewujudkan aspirasi warga menjadi kebijakan Kalurahan Pagerharjo”

TUJUAN: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan. SASARAN: Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan berbasis kedaulatan rakyat. Memaksimalkan aspirasi warga, menjadi kebijakan Kalurahan Pagerharjo melalui musyawarah Kalurahan. Meningkatkan partisipasi aparat pemerintah Kalurahan dan masyarakat dalam pembangunan desa

STRATEGI: Meningkatkan kapasitas aparat pemerintah Kalurahan sesuai bidang tugasannya

ARAH KEBIJAKAN: Meningkatkan profesionalisme aparat dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan SOTK Pemerintah Kalurahan. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kalurahan melalui musyawarah Kalurahan. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan dengan system swakelola

Misi II.

“Meningkatkan kesejahteraan warga Pagerharjo melalui optimalisasi potensi, peluang dan tantangan yang dimilikinya”.

TUJUAN: Meningkatkan kesejahteraan warga Pagerharjo

SASARAN: Tercipta usaha/kegiatan ekonomi berbasis potensi sebagai sumber penghasilan tambahan warga pra Sejahtera. Berkurangnya angka kemiskinan di Kalurahan Pagerharjo berdasarkan data kemiskinan desa

STRATEGI: Memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk menciptakan sumber penghasilan tambahan warga

ARAH KEBIJAKAN:Memperbarui data potensi di Kalurahan Pagerharjo. Pemetaan dan pengelompokan potensi berdasarkan acuan tertentu.

Memperbarui data kemiskinan desa. Mempersiapkan instrument penilaian keberhasilan kegiatan. Merumuskan potensi kegiatan yang

berorientasi peningkatan ekonomi. Menciptakan peluang usaha.

Memaksimalkan pendampingan kepada kelompok masyarakat pra ejahtera. Melaksanakan evaluasi keberhasilan program kegiatan

Misi III.

“Meningkatkan keterampilan maupun kualitas sumberdaya manusia di Kalurahan Pagerharjo dengan memberdayakan organisasi kelembagan masyarakat yang ada di Kalurahan Pagerharjo”.

TUJUAN: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Kalurahan Pagerharjo

SASARAN: Meningkatkan kualitas SDM Lembaga Kalurahan dan Meningkatkan partisipasi lembaga dalam pembangunan desa.

STRATEGI: Mengaktifkan lembaga yang pasif, meningkatkan kualitas SDM Lembaga Kalurahan melalui pelatihan, pendampingan, serta memaksimalkan potensi SDM Lembaga Kalurahan dalam pembangunan desa.

ARAH KEBIJAKAN: Melaksanakan pendataan lembaga Kalurahan. Melakukan klasifikasi lembaga Kalurahan yang aktif dan tidak aktif. Meningkatkan kualitas SDM Lembaga Kalurahan melalui Pelatihan dan Pendampingan sesuai bidang tugasannya. Meningkatkan pelaksanaan pertemuan rutin untuk koordinasi dan evaluasi. Memaksimalkan Lembaga Kalurahan dalam rangkaian pembangunan desa baik dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Misi IV.

“Melaksanakan jejaring dengan multipihak baik swasta, pemerintah, perguruan Tinggi guna mendorong sinergitas dan kemampuan menghubungkan (menghubungkan) antara Pemerintah dan Warga Pagerharjo”.

TUJUAN: Meningkatkan lembaga multipihak guna mempercepat pembangunan Kalurahan.

SASARAN: Terjalannya minimal 10 (sepuluh) Lembaga dengan pemerintah, swasta, akademisi/ Lembaga Pendidikan.

STRATEGI: Memperbanyak koneksi dan pelaksanaan kerjasama di 5 (lima) bidang pembangunan desa dengan lembaga pemerintah, swasta, dan/atau perguruan tinggi.

ARAH KEBIJAKAN: Merumuskan system Lembaga melalui musyawarah mufakat dengan pihak-pihak terkait. Merumuskan rencana Lembaga di 5 (lima) bidang pembangunan desa. Melaksanakan minimal 3 kerjasama dengan lembaga pemerintah. Melaksanakan minimal 2 kerjasama dengan pihak swasta. Melaksanakan minimal 5 kerjasama dengan perguruan tinggi.

Misi V.

“Pelaksanaan pelayanan (*decision government*) berpihak kaum lemah (tak berdaya)”.

TUJUAN: Memberikan prioritas pelayanan pada masyarakat lemah/marginal/tak berdaya.

SASARAN: Terciptanya prioritas pelayanan kepada masyarakat lemah/marginal/tak berdaya dan terciptanya layanan yang baik kepada masyarakat umum .

STRATEGI: Meningkatkan kualitas pelayanan melalui pemaksimalan SDM di Pemerintahan Kalurahan Pagerharjo.

ARAH KEBIJAKAN: Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pemerintah Kalurahan Pagerharjo melalui pelatihan/ kegiatan peningkatan kapasitas untuk pelayanan prima. Merumuskan SOP pelayanan prima. Melaksanakan koordinasi dan evaluasi terkait pelayanan prima dan mengembangkan aplikasi pelayanan.

Secara umum strategi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kalurahan Pagerharjo melibatkan pendekatan yang holistik dan kolaboratif. Berikut adalah gambaran umum mengenai bagaimana kedua elemen ini berperan dalam pembangunan di Kalurahan Pagerharjo:

a) Strategi Pemerintah

Perencanaan dan Kebijakan, dalam rencana pembangunan jangka panjang pemerintah Kalurahan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan provinsi, menyusun rencana pembangunan jangka panjang yang mencakup berbagai bidang yaitu: infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Selanjutnya, disusun rencana kerja tahunan yang didasarkan pada prioritas yang telah ditentukan dalam rencana pembangunan jangka panjang. Hal ini mencakup estimasi keuangan, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, dan sasaran-sasaran yang perlu dicapai.

Pengaturan anggaran, dana desa dari pemerintah pusat melalui Undang-Undang desa menyediakan dana desa untuk mendukung pembangunan di Kalurahan. Dana ini dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pelaksanaan program sosial, serta kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat di Kalurahan Pagerharjo. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah anggaran yang disusun oleh pemerintah kabupaten atau kota, yang ditujukan untuk mendukung pembangunan di tingkat Kalurahan, mencakup proyek-proyek besar serta kegiatan-kegiatan khusus..

Program dan proyek pembangunan yang mencakup, pertama infrastruktur pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, fasilitas umum, dan sistem irigasi. Fokus pada peningkatan aksesibilitas dan konektivitas. Kedua pendidikan dan kesehatan, seperti pembangunan

sekolah, puskesmas, dan penyediaan layanan kesehatan serta pendidikan yang berkualitas. Ketiga ekonomi, seperti program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan dukungan untuk usaha kecil dan mikro.

b) Partisipasi Masyarakat

Musyawarah desa/Kalurahan yang meliputi pertama perencanaan partisipatif, masyarakat dilibatkan dalam musyawarah desa untuk merencanakan dan memprioritaskan kebutuhan pembangunan. Musyawarah ini membantu pemerintah memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kedua pengambilan Keputusan, Keputusan yang didasarkan pada kesepakatan bersama mengenai proyek dan program pembangunan desa, memastikan bahwa keputusan mencerminkan kebutuhan masyarakat. Ketiga pelibatan dalam pelaksanaan proyek seperti kegiatan gotong-royong masyarakat terlibat dalam pelaksanaan proyek pembangunan melalui kegiatan gotong royong, yang juga membantu mengurangi biaya dan meningkatkan rasa memiliki terhadap proyek. Keempat pemberdayaan komunitas, pelatihan dan pengembangan kapasitas masyarakat untuk mengelola dan memelihara fasilitas dan proyek yang telah dibangun.

Pengawasan dan evaluasi, partisipasi dalam pengawasan masyarakat dilibatkan dalam pengawasan proyek pembangunan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Ini biasa dilakukan melalui forum-forum pengawasan atau kelompok masyarakat. Kemudian evaluasi, masyarakat memberikan umpan balik mengenai pelaksanaan proyek dan program, yang digunakan untuk evaluasi dan perbaikan ke depan.

Program pemberdayaan dan edukasi, melalui pendidikan dan kesadaran dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka, cara berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan pentingnya keberlanjutan proyek. Serta pemberdayaan ekonomi dengan partisipasi yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan ekonomi seperti pelatihan keterampilan, pengembangan usaha, dan akses ke pasar.

Untuk mencapai hasil yang optimal, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama secara erat. Pemerintah menyediakan kebijakan, anggaran, dan regulasi, sementara masyarakat berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Kolaborasi ini memastikan bahwa pembangunan di Kalurahan Pagerharjo tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup.

BAB IV

STRATEGI PEMERINTAH KALURAHAN PAGERHARJO DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN

A. Analisis Strategi Pemerintah Kalurahan dalam Mendorong Pembangunan

Pada bagian ini akan dibahas strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Pagerharjo dalam mendorong pembangunan, yaitu:

1. Perumusan tujuan pembangunan Kalurahan

Menurut Kartono, D. T., & Nurcholis, H. (2016), inti dari pembangunan diarahkan pada tujuan mencapai keadilan sosial. Oleh karena itu, pengembangan memerlukan proses dan langkah-langkah yang terencana. Langkah-langkah tersebut harus mencakup berbagai aspek, yang pertama adalah ekonomi sebagai indikator kesejahteraan materi. Tahap yang kedua adalah kesejahteraan sosial. Tahap ketiga adalah keadilan sosial.

Pembangunan dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu pembangunan fisik dan non-fisik. Dalam konteks pembangunan, terdapat beberapa unsur penting seperti perubahan, tujuan, dan potensi. Unsur perubahan merujuk pada proses perbaikan dari keadaan yang kurang ideal menuju keadaan yang lebih baik. Unsur tujuan mencakup sasaran yang ingin dicapai manusia, seperti kelestarian, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Unsur potensi melibatkan sumber daya yang ada dalam masyarakat yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, agar unsur-unsur ini dapat

direalisasikan dengan efektif, diperlukan implementasi yang konkret dalam proses pembangunan.

Tujuan utama dari pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup. Oleh karena itu, pembangunan fisik dan non-fisik harus saling mendukung agar tujuan utama dapat tercapai. Pembangunan fisik mencakup fasilitas seperti jalan, gedung, pasar, serta infrastruktur pertanian dan peternakan. Disisi lain, pembangunan non-fisik meliputi aspek-aspek seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya, yang juga memerlukan infrastruktur yang memadai. Pembangunan non-fisik berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, yang menjadi dasar penting untuk melaksanakan pembangunan fisik.

Dengan demikian, pembangunan tidak bisa dipisahkan dari ruang. Pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan aspek lainnya bergerak dalam ruang yang memfasilitasi interaksi dan pengembangan. Tanpa adanya ruang, upaya pengembangan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembangunan. Pembangunan Kalurahan Pagerharjo melibatkan nilai yang mendalam terhadap berbagai aspek pembangunan, Ekonomi, Kesejahteraan masyarakat, dan Keadilan Sosial.

a) Bidang Ekonomi

Kalurahan Pagerharjo memiliki potensi besar dalam sektor agraris, peternakan dan kegiatan ekonomi kewirausahaan. Sektor agraris yang utama yang dihasilkan meliputi vanili, kopi, teh, kakao, dan cengkih.

“di Kalurahan ini, kami memiliki potensi alam yang kami manfaatkan sebagai penunjang sektor perekonomian masyarakat, Ya tentu kami menyediakan dan memfasilitasi masyarakat yang terlibat dalam usaha yang menjadi program bersama kami. DiKalurahan ini

kami mengembangkan Vanili, Kopi, Teh, Kakao, Cengkeh.”
(Wawancara dengan Pak Widayat, 20-07-2024).



1. Gambar Cengkeh



2. Gambar Kebun Kokoa



3. Gambar Kebun Teh



4. Gambar Kebun Vanili



5. Gambar Kebun Kopi

Gambar 4.1 Cengkeh, Kokoa, Teh, Vanili dan Kopi.

Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti Tahun 2024

Keterangan: Gambar di atas adalah potensi alam yang dimanfaatkan oleh masyarakat Pagerharjo dalam bidang perkebunan sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Dari pernyataan informan di atas menyebutkan bahwa potensi alam yang dimiliki oleh Kalurahan dimanfaatkan dalam sektor perekonomian dengan kolaborasi bersama warga dalam menciptakan perekonomian. Dalam usaha yang dilakukan pemerintah tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Selain memanfaatkan potensi alam Kalurahan juga memfokuskan pada sektor peternakan yang memfokuskan pada peternakan kambing dan ikan.

“Kami dalam memajukan perekonomian masyarakat menyediakan kelompok-kelompok untuk mengelola ternak atau ikan yang kita berikan. Ya kita berikan bibit juga pakan diawal untuk masyarakat yang mengelolanya, dan kita berikan tanggungjawab kepada masyarakat untuk merawat dan menjaganya”, (Wawancara dengan Pak Widayat, 20-07-2024).



1. Gambar Perumahan Gapoktan 2. Gambar Peternakan Kambing
Gambar 4.2 Gapoktan dan Ternak Kambing

Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti Tahun 2024

Keterangan: Gambar di atas adalah Perumahan gabungan kelompok tani dalam pemeliharaan ternak kambing.

Hal ini juga disampaikan Pak Agustinus Sosilo selaku petani kopi di Kalurahan Pagerharjo.

“saya merasa sangat terbantu sekali ya atas program pemerintah dalam memfasilitasi kami, terutama dalam sektor pertanian. Kami juga diberikan bantuan bibit yang berkualitas juga pupuk yang baik.

Sehingga hasilnya pun sesuai dengan harapan kami, selain itu juga pemerintah menyediakan bantuan alat dan mesin pertanian. Itu sangat membantu sekali, juga meningkatkan infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan menuju lahan pertanian, dan gudang penyimpanan hasil pertanian. Tidak hanya di bidang fisik ya, mereka juga menyelenggarakan seperti penyuluhan, pelatihan dan pembinaan, terutama untuk petani-petani yang pemula. Mereka juga menyediakan bantuan finansial atau kredit dengan bunga rendah untuk membeli kebutuhan pertanian atau memperbaiki fasilitas pertanian.

Dari pernyataan informan yang menyampaikan bahwa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat juga strategi pemerintah Kalurahan dalam meningkatkan ekonomi adalah dengan melibatkan masyarakat dan memberi kepercayaan kepada masyarakat untuk mengelola bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.

Sementara sektor kegiatan ekonomi dan kewirausahaan adanya kelompok usaha bersama dan koperasi membantu dalam produksi dan pemasaran. Pasar Sempulur berperan aktif dalam memasarkan hasil produk lokal ini dengan menerapkan konsep zero plastic dan mempromosikan produk-produk berkelanjutan yang juga sebagai arena untuk pemasaran produk-produk UMKM.



Gambar 4.3 Pasar Sempulur Kalurahan Pagerharjo

Sumber: Data Sekunder profil Kalurahan Pagerharjo tahun 2024

Keterangan: Gambar di atas adalah masyarakat yang sedang memasarkan produk umkm lokal mereka.

Mariati selaku pelaku UMKM di Kalurahan Pagerharjo yang menyampaikan bahwa:

Pemerintah Kalurahan dalam mengerjakan kami sebagai pelaku umkm biasanya dengan mengadakan kegiatan sosialisasi, pelatihan dan pembinaan. Jadi kami tu dibentuk kelompok-kelompok untuk Latihan, misalnya dalam membuat produk olahan makanan ringan seperti camilan dan lain sebagainya. Pemerintah Kalurahan juga menyiapkan tempat pemasaran untuk produk kami, seperti pasar sempulur dan rumah pajang. Untuk di media kami belum terlalu memanfaatkannya, ya palingan lewat fecebook, Instagram, Whatshap.



1. Gambar Rumah Pajang

2. Gambar hasil UMKM

Gambar 4.4 Rumah Pajang dan Hasil UMKM

Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti Tahun 2024

Keterangan: Gambar Rumah Pajang di atas adalah tempat untuk penampungan hasil umkm masyarakat untuk di jual dan.

Relevansi dengan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 15-03-2024, bertempat di Pancer Menoreh (Sosialisasi Pariwisata) yang menyebutkan:

Tabel 4.1 Data Observasi

No	Tanggal	Tempat/Kegiatan	Aspek yang diamati	Hasil Observasi	Keterangan
4	15-03-2024	Pancer Menoreh, sosialisasi pariwisata	Peningkatan kompetensi SDM pariwisata	15 peserta (termasuk lurah & BUMDes) ikuti sosialisasi pengembangan paket wisata seperti kopi, gula aren, Wedang Lenggèr	Fokus pada pelatihan promosi dan paket wisata desa

Observasi di atas menegaskan adanya sinergi antara pengembangan ekonomi berbasis wisata dengan potensi lokal. Pelatihan ini memperkuat sektor UMKM, memperluas pemasaran, dan mendorong keberlanjutan ekonomi desa.

b) Kesejahteraan Masyarakat

Kalurahan Pagerharjo dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat menyediakan layanan Kesehatan, pendidikan, infrastruktur sosial, dan program-program kesejahteraan sosial. Fasilitas kesehatan di Kalurahan Pagerharjo diantaranya ada Puskesmas 1 dan puskesmas pembantu 1 yang menyediakan pelayanan dasar.

“dalam menunjang kesahatan masyarakat Kalurahan kami juga turut berkontribusi dalam memfasilitasi kesehatan bagi warga kami, dengan mendukung program kesehatan dan turut mengidukasi kepada masyarakat dengan pentingya kesehatan. Kami juga

mengalokasikan anggaran untuk Stunting dan Kader Posyandu, kami rasa itu langkah awal kami dalam membantu masyarakat, juga kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi tentang kesehatan biasanya bergandengan dengan perguruan tinggi. Kan Kalurahan kita setiap tahunnya menerima mahasiswa KKN, nah biasanya ada program dari mereka berkaitan dengan kesehatan. Disitu kita kolaborasi dan juga memfasilitasi keperluan mereka, yaa demi kelancaran dalam menyampaikan kepada masyarakat” (Wawancara dengan Pak Widayat, 21-07-2024).



1. Gambar Puskesmas



2. Postu



3. Sosialisasi Kesehatan dari Puskesmas



4. Sosialisasi Kesehatan Mahasiswa KKN

Gambar 4.5 Puskesmas, Postu dan sosialisasi kesehatan dari puskesmas dan mahasiswa KKN

Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti dan data sekunder Tahun

2024 <https://www.beritajogja.com/news/184368717/kkn-mahasiswa-uad-sosialisasi-pencegahan-stunting-dengan-5-langkah-abcde-ini-yang-dimaksud?page=2>

Keterangan: Gambar 1 di atas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Pagerharjo, gambar 2 adalah Puskesmas pembantu (Postu), gambar 3 adalah kegiatan sosialisasi oleh bagian kesehatan dari puskesmas

Pagerharjo, dan gambar 4 adalah sosialisasi kesehatan oleh mahasiswa yang melakukan KKN di Pagerharjo.

Dari pernyataan informan bahwa dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, Kalurahan turut berkontribusi dalam pelayanan juga dalam anggaran untuk mengentaskan stunting di Kalurahan Pagerharjo. Selain fasilitas kesehatan juga fasilitas pendidikan di Kalurahan Pagerharjo terdapat Paud 6 unit TK 4 unit, Sekolah Dasar 5 unit, Sekolah Menengah Pertama 1 unit, dan Sekolah Menengah Kejuruan 1 unit.

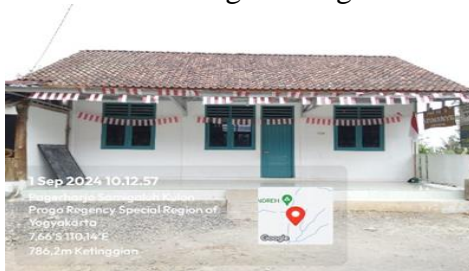
“dalam memfasilitasi pendidikan bagi warga kami, kami juga turut menyediakan sarana dan prasarana seperti Gedung paud dan honornya juga kami sediakan. Selain itu juga kami pernah menyediakan apresiasi untuk siswa yang memiliki prestasi dalam bidang akademik juga non akademik melalui media-media umum, misalnya dalam kegiatan kebudayaan kami selipkan moment untuk memberikan penghargaan bagi anak-anak kami yang berprestasi. Juga kami selalu memberikan arahan dan himbauan kepada orang tua siswa bahwa ada jam-jam tertentu yang sudah kami jadwalkan untuk memprioritaskan anak harus wajib belajar di luar waktu sekolah, misalnya menjelang petang atau malam, itu anak-anak wajib belajar di rumah, jadi orang tuanya memfasilitasi anaknya atau dengan kata lain jangan memberikan tugas rumahan kepada anak pada saat jam tersebut. Kami juga menyediakan prasarana lapangan olahraga (Gedung olahraga) untuk meningkatkan bakat serta minat anak-anak kami. Dengan demikian harapan kami ya mereka lebih terampil dan terlatih dengan baik,” (Wawancara dengan Pak Wakcit Cahyono, 21-07-2024).



1. Gambar Gedung Olahraga



2. Gambar Gedung PAUD



3. Gambar Gedung PAUD



4. Gedung PAUD

Gambar 4.6 Gedung Olahraga dan Gedung PAUD

Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti Tahun 2024

Keterangan: Gambar 1 di atas adalah Gedung olahraga yang ada di Kalurahan Pangerharjo dan Gedung ini sebagai wadah dalam menunjang bakat anak-anak, dan gambar 2,3 dan 4 adalah Gedung Pendidikan Anak Usia Dini ini.

Dari pernyataan informan, pihak Kalurahan dalam meningkatkan pendidikan masyarakatnya dengan cara menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang pendidikan, juga memberikan apresiasi kepada anak-anak yang berprestasi, baik dibidang akademik maupun non akademik.

Selain fasilitas pendidkan, Kalurahan juga menyediakan fasilitias infrastruktur sosial untuk menunjang kegiatan kemasyarakatan.

“ya kami dari pihak Kalurahan juga menyediakan meliputi tempat ibadah, balai Kalurahan, pasar Kalurahan, balai pedukuhan, BUMKAL 1, CUKATA 1, BNT, Rumah pajang pusat untuk UMKM, rumah kopi, rumah produksi susu, arena wisata, Pos ronda, Goor (Gedung olahraga), kantor kelembagaan (pkk. karang taruna.

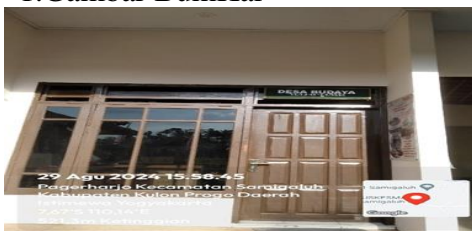
kampung siaga bencana, ruang kader, ruang Linmas)”, (Wawancara dengan Wakcit Cahyono, 21-072024).



1. Gambar BumKal



2. Gambar Koperasi Kredit Cukata



3. Kantor Kelembagaan
Gambar 4.7 Prasarana



4. Rumah Produksi Susu Kambing

Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti Tahun 2024

Keterangan: Gambar di atas adalah 1, Badan Usaha Milik Kalurahan yang beroperasi menjual wedang rempah lengger, susu kambing, kopi, gula aren dan kolang kaling. Gambar 2, Koperasi Kredit Cukata adalah koperasi simpan pinjam yang ada di Kalurahan Pagerharjo yang melayani pinjaman modal usaha atau konsumtif dengan besaran dan bunga tertentu. Gambar 3, Kantor Kelembagaan adalah wadah atau tempat Lembaga kebudayaan Kalurahan dalam melestarikan budaya lokal. Gambar 4, Rumah Produksi Susu Kambing adalah sebagai tempat pusat pengelolaan susu kambing lokal.

Dari data yang disampaikan informan bahwa peran pemerintah Kalurahan dalam infrastruktur pembangunan guna untuk mendukung program dan kebutuhan masyarakat di Lingkup Kalurahan Pagerharjo sangat aktif perannya dalam membantu masyarakat.

Relevansi dengan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 12-03-2024, Balai Kalurahan (Sosialisasi Peternakan) yang menyebutkan:

Tabel 4.2 Data Observasi

No	Tanggal	Tempat/Kegiatan	Aspek yang diamati	Hasil Observasi	Keterangan
6	12-03-2024	Balai Kalurahan	Pelibatan Masyarakat	Sosialisasi program pelatihan peternakan dilakukan secara terbuka kepada warga.	Antusiasme masyarakat cukup tinggi

Observasi di atas memperlihatkan peran aktif pemerintah Kalurahan dalam peningkatan kapasitas SDM di sektor peternakan, yang selaras dengan kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan.

c) Keadilan Sosial

Kalurahan Pagerharjo dalam bidang keadilan sosial mencakup penilaian berbagai upaya untuk memastikan distribusi dan sumber daya kesempatan yang adil diseluruh lapisan masyarakat, yaitu: Pertama keterjangkauan dan akses terhadap layanan dasar seperti layanan kesehatan puskesmas dan klinik harus merata bagi semua lapisan masyarakat. Begitu halnya dalam bidang pendidikan, sekolah dasar dan menengah harus tersedia dan dapat diakses oleh seluruh anak-anak, termasuk anak-anak yang dari keluarga kurang mampu.

Aksi yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan adalah memberikan bantuan bagi kelompok yang kurang mampu, seperti beasiswa atau subsidi obat. Pemerintah Kalurahan juga menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan diberbagai lokasi, termasuk daerah yang lebih

terpencil. Kedua kesejahteraan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Kalurahan Pagerharjo melalui bantuan sosial seperti bantuan BLT dan subsidi untuk keluarga kurang mampu dengan tujuan mengurangi beban keluarga yang kurang mampu. Selain bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat, Kalurahan juga memberikan program-program pelatihan keterampilan dan dukungan kepada usaha-usaha kecil untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Ketiga partisipasi masyarakat dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat yang disediakan oleh Pemerintah Kalurahan adanya forum-forum dan kelompok diskusi yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan, seperti Musduk dan Musrenbangdes.

Selain menyediakan ruang partisipasi masyarakat, Kalurahan dalam hal anggaran juga sangat transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat yang meliputi RAB juga alokasi anggaran yang dipajang di kawasan Kalurahan dengan volume yang terperinci. Sehingga memudahkan masyarakat dalam mengetahui saluran anggaran yang digunakan. Kalurahan juga terbuka dalam pelaporan kegiatan pembangunan. Keempat pengentasan diskriminasi dan kesetaraan gender. Pemerintah Kalurahan melakukan upaya-upaya untuk memastikan semua kelompok, termasuk Wanita dan minoritas memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Program-program yang dilakukan diantaranya adalah penyuluhan yang meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan dan hak asasi manusia.

“dalam hal ini kami tentu mengupayakan keadilan yang sama kepada masyarakat kami, kami juga menggandeng pihak akademisi dan pihak kemandirian untuk selalu mengingatkan kepada masyarakat kami tentang kesadaran dalam hak dan tanggungjawab serta kesetaraan

satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat”, (Wawancara dengan Pak Widayat, 22-07-2024).



1. Gambar Sosialisasi

2. Bantuan Langsung Tunai

Gambar 4.8 Sosialisasi Bhabinkamtibmas dan Penyerahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kalurahan Pagerharjo.

Sumber: Data sekunder profil Kalurahan Pagerharjo 2024

Keterangan: Gambar di atas adalah 1, Sosialisasi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas tentang Pemahaman Perundungan Bullying yang dilaksanakan di SD Kalirejo Pagerharjo. Gambar 2 adalah penyerahan Bantuan Langsung Tunai yang diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kategori masyarakat kurang mampu (MISKIN).

Hal ini juga disampaikan oleh Pak Wacit Cahyono selaku ulu-ulu Kalurahan Pagerharjo

“Kami juga dalam melayani pasti kami memperlakukan masyarakat kami dengan baik dan merata, kemudian bagi mereka yang mempunyai keterbatasan akan kami bina untuk bisa mendapatkan pelayanan kami yang baik”, (Wawancara dengan Pak Wacit Cahyono, 22-07-2024).

Menurut Hefifah, partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam berbagai peran selama tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan yang berdampak langsung kepada kehidupan mereka. Langkah ini dapat dilakukan secara perorangan maupun dalam kelompok sosial dan organisasi.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kalurahan Pagerharjo bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan mempercepat proses pembangunan. Kepedulian masyarakat terhadap pembangunan memiliki peranan yang signifikan, karena dapat mempengaruhi tahap-tahap berikutnya dalam pelaksanaan proyek pembangunan dan berkontribusi pada pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

Pembangunan partisipasi yang juga melibatkan seluruh elemen masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat. Perencanaan ini dilakukan untuk mengembangkan program dari tingkat bawah hingga ke tingkat atas. Dalam pembangunan partisipatif, setiap tahap, mulai dari identifikasi masalah dan perumusan kebutuhan, hingga perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan, merupakan hasil kesepakatan bersama antara semua pihak yang terlibat. Proses perencanaan pembangunan juga berfungsi sebagai proses pembelajaran bagi semua peserta masyarakat. Partisipasi warga dilakukan melalui berbagai proses, mekanisme, dan tahapan untuk menggali dan menjangkau aspirasi dari tingkat RT, RW, Dusun/Padukuhan, melibatkan seluruh elemen masyarakat.

“ya kami juga mendengar dan mencermati apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat, terutama dalam hal pembangunan. Sehingga nantinya dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat juga terlibat aktif untuk mensukseskan program. Ini mungkin menjadi strategi kami untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan, karena yang dibangun adalah berdasarkan kepentingan masyarakat”, (Wawancara dengan Pak Widayat, 23-07-2024)



Gambar 4.9 Rapat Pedukuhan (Sosialisasi dan Perencanaan Pembangunan)

Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti Tahun 2024

Keterangan: Gambar di atas adalah rapat sosialisasi perencanaan pembangunan jalan antar pedukuhan di Kalurahan Pagerharjo

Musrenbangdes adalah forum di tingkat desa untuk membahas masalah-masalah yang ada di desa. Agar Musrenbangdes dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas, persiapan yang matang serta mengikuti mekanisme dan prosedur yang benar, serta komitmen dari pemerintah desa, sangat diperlukan.

“sebelum Musrenbangdes dilaksanakan, kami sebagai pemerintah desa juga menyiapkan berbagai kebutuhan untuk terselenggaranya acara tersebut. Mulai dari persiapan yang melibatkan perangkat desa dan lembaga desa, dengan pembagian tugas masing-masing. Tugasnya untuk mengatur segala aspek Musrenbangdes, memastikan bahwa partisipasi masyarakat berjalan dengan baik dan hasil dari musyawarah dapat diterapkan secara efektif”, (Wawancara dengan Pak Widayat, 23-07-2024).

Berdasarkan informasi yang disampaikan informan, peneliti menyimpulkan bahwa persiapan Musrenbangdes di Kalurahan telah dilakukan dengan cermat dan direncanakan dengan matang sejak tahap awal. Pemerintah Kalurahan telah mempersiapkan dan mengatur segala kebutuhan untuk pelaksanaan Musrenbangdes, memastikan bahwa masyarakat yang hadir dapat berpartisipasi dengan baik.

Musrenbangdes merupakan tingkatan akhir dalam perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur dalam pelaksanaannya.

“Musrenbangdes merupakan tahap akhir dari serangkaian musyawarah warga yang dimulai dengan Musduk di tingkat Padukuhan, yang melibatkan unsur-unsur RT, RW, tokoh masyarakat, pemuda/karang taruna, dan PKK yang mewakili masyarakat. Hasil dari Musduk kemudian dilanjutkan ke Musdes (Musyawarah Desa), dan setelah disepakati, akan dibawa ke Musrenbangdes. Di Musrenbangdes, program pembangunan-baik fisik maupun non-fisik-yang diusulkan oleh masyarakat akan direncanakan. Semua usulan ini bertujuan untuk memotivasi masyarakat, dengan dukungan dan fasilitasi dari pemerintah. Selain itu, BPD menyelenggarakan beberapa rapat, termasuk Musyawarah Internal BPD, Musyawarah BPD dengan Pemerintah untuk koordinasi dan evaluasi, serta Musyawarah Desa. Partisipasi dalam rapat-rapat tersebut di Kalurahan Pagerharjo sudah sangat baik”, (Wawancara dengan Pak H. Tri Samurdji 24-07-2024).



Gambar 4.10 Musrenbangdes Kalurahan Pagerharjo 2024

Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti Tahun 2024

Keterangan: Gambar di atas adalah pelaksanaan kegiatan Musyawarah Kalurahan Pagerharjo.

Berdasarkan informasi yang diberikan, diketahui bahwa Musrenbangdes di Kalurahan Pagerharjo telah dilaksanakan dengan mengundang perwakilan dari setiap Padukuhan, lembaga desa, BPD, dan perangkat desa. Ini berarti bahwa semua unsur dari setiap Padukuhan serta lembaga desa telah dilibatkan untuk mengumpulkan

dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang telah dikumpulkan melalui musyawarah perencanaan di tingkat Padukuhan.

Dalam pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan bersama-sama, masyarakat dalam hal ini juga turut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. Pemerintah Kalurahan Pagerharjo dalam pelaksanaan pembangunan membentuk tim-tim kerja, sehingga memudahkan dalam melihat bagaimana kontribusi masyarakat.

“dalam pelaksanaan tentu diberikan kepada bidang masing-masing, kemudian kasi-kasi membentuk tim pelaksanaan kegiatan yang diambil dari masyarakat. Ada Lembaga yang membidangi seperti LPMKal yang membidangi pembangunan. Dalam pelaksanaan kasi bertugas sebagai penanggungjawab kegiatan. Kemudian masyarakat yang sudah dibentuk dalam tim kerja kemudian kami berikan arahan dan sejenis sosialisasi tentang program yang akan dikerjakan”, (Wawancara dengan Pak Widayat, 24-07-2024).

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan sudah di bentuk tim-tim kerja. Sebelum kegiatan atau program berjalan, pihak Kalurahan sendiri mensosialisasikan tujuan daripada pembangunan yang akan dikerjakan.

Dari informasi yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa Musrenbangdes di Kalurahan Pagerharjo telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pemerintah Kalurahan telah secara resmi mengundang semua unsur terkait, termasuk perwakilan dari padukuhan (RT, RW), lembaga-lembaga desa (Budaya, KWT, PKK, LPMKal, BPKal), tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Undangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan Musrenbangdes berjalan dengan partisipatif, sehingga perencanaan pembangunan benar-benar mencerminkan prioritas kebutuhan masyarakat.

Relevansi dengan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 16-02-2024, Rumah Pak Dukuh (Musyawarah Gotong Royong) yang menyebutkan:

Tabel 4.3 Data observasi

No	Tanggal	Tempat/Kegiatan	Aspek yang diamati	Hasil Observasi	Keterangan
1	16-02-2024	Rumah Pak Dukuh	Musyawarah perencanaan pelaksanaan gotong-royong bangun jalan	Kegiatan dihadiri oleh Lurah, dukuh, rt dan warga setempat	Keterlibatan warga cukup tinggi

Observasi di atas menerangkan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah menunjukkan penerapan prinsip keadilan sosial melalui pendekatan partisipatif sejak perencanaan awal

Tujuan (*purpose*) adalah hal dasar dalam suatu pemerintah yang menjadi acuan untuk bertindak. Tujuan terdapat dua sub indikator, misi dan kemampuan dalam menjalankan misi itu sendiri (Kodrianingsih, 2023). Misi merujuk pada tujuan yang ingin dicapai dalam suatu program atau kegiatan. Sementara itu, kemampuan untuk melaksanakan misi adalah metode yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan Kalurahan Pagerharjo tertuang dalam visi terwujudnya Kalurahan yang jujur, tanggap, dan berbudaya guna mewujudkan pelayanan warga yang berkualitas dan kesejahteraan warga Pagerharjo. Visi dan misi Kalurahan ditetapkan menjadi acuan dalam pembangunan Kalurahan dalam kurun waktu 6 tahun masa jabatan Pemerintah Kalurahan.

“ya kami dalam menjalankan pemerintahan kami juga merujuk visi dan misi yang membawa kami terpilih dalam pilkades, visi misi itu kan hasil dari aspirasi masyarakat yang kemudian kami bawa sebagai pedoman kami dalam program-program Kalurahan. Kami tidak bisa melaksanakan kegiatan yang diluar koridor RPJMDes, kemudian turunanya RKP lalu APBDes”, (Wawancara dengan Pak Widayat, 25-07-2024).

Berdasarkan informasi yang disampaikan informan bahwa dalam roda pemerintahan, pemerintah Kalurahan dalam menjalankan program mengacu pada visi dan misi. Program-program pemerintah adalah hasil dari kesepakatan bersama dengan masyarakat melalui rapat warga, musdus dan musrenbangdes.

Kemampuan pemerintah Kalurahan Pagerharjo dalam menjalankan misi, yaitu dengan menggunakan strategi yang mencakup aspek-aspek seperti keterbukaan, kedekatan antara pemerintah desa dan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta melibatkan aspirasi masyarakat dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembangunan desa.

“kami dari pemerintah Kalurahan harus tau permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, ya dengan cara pendekatan secara emosional tentu akan membuat kami lebih nyaman dalam menyerap aspirasi dari masyarakat. Kan ruang untuk komunikasi secara resmi itu terbatas, jadi setiap ada kegiatan di rt/rw, pedukuhan kami usahakan untuk hadir, ya itu untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Ketika kami bertemu masyarakat lagi ronda malam, kerja bakti, dan kegiatan lainnya, kami bincang-bincang sedikit dengan masyarakat misalnya ada keluhan kesah yang ingin masyarakat sampaikan. Selain itu juga kami dalam perencanaan program juga hasil daripada aspirasi masyarakat itu sendiri. Nah ketika dalam pelaksanaan juga kami melibatkan partisipasi masyarakat untuk mensukseskan program”, (Wawancara dengan Pak Widayat, 25-07-2024).

Berdasarkan informasi yang di sampaikan informan, peneliti menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan, masyarakat turut berpartisipasi dalam agenda yang diselenggarakan oleh pemerintah Kalurahan. Selain partisipasi, masyarakat juga turut aktif dalam menyampaikan ide dan gagasan yang menjadi tujuan dalam program Kalurahan.

“kemudian berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kami juga sering melakukan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat kami, misalnya dalam peternakan, pertanian, Perkebunan, perikan dan lain sebagainya. Lalu kami juga transparansi dengan anggaran dan pelaporan, itu sebagai bentuk untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kalurahan. (Wawancara dengan Pak Supanto, 26-07-2024).



Gambar 4.11 Penyuluhan sistem pengembangan pertanian tradisional.

Sumber: Data sekunder profil Kalurahan Pagerharjo 2024

Keterangan: Gambar di atas adalah sosialisasi dari Dinas Pertanian Kulon Progo dalam pengembangan sistem pertanian tradisional yang dilaksanakan di Kalurahan Pagerharjo.

Pernyataan informan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa dalam menjalankan misi, pemerintah Kalurahan memiliki sikap terbuka kepada masyarakat. Baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga evaluasi kegiatan.

Hasil temuan peneliti konsisten dengan temuan penelitian yang dikemukakan oleh Kiyato, et. al (2024) tentang Strategi Pemerintah

Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Program Pembangunan yang dilakukan di Desa Tepisari, yang menunjukkan bahwa Kemampuan menjalankan misi dengan menggunakan beberapa strategi seperti keterbukaan, kedekatan pemerintah dengan masyarakat, peningkatan sumber daya manusia, dan melibatkan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembangunan desa. Namun, penelitian ini memperluas pemahaman tentang mekanisme dan tindakan strategi pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat setempat.

Temuan ini selaras dengan hasil penelitian Kodrianingsih, at. al (2023) tentang Strategi Pemerintah Terhadap Pembangunan yang dilakukan di Desa Aikmal yang menemukan bahwa Strategi pemerintah dalam mencapai tujuan didasarkan pada misi pemerintah desa, namun penelitian ini melibatkan teknis yang lebih luas yaitu dengan melakukan sosialisasi, pelatihan dan pembinaan terhadap masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan.

Hasil temuan ini konsisiten dengan temuan yang dikemukakan oleh Hyronimus (2021), menunjukkan bahwa pemerintah desa perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam forum musyawarah desa dan dusun, sehingga terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan warga. Selain itu, pemerintah desa harus menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran mereka dalam pembangunan desa serta menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan bersama dalam proses pembangunan desa.

Implikasi dari temuan ini menekankan perlunya pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam strategi pemerintah Kalurahan untuk mendorong pembangunan. Ini melibatkan keterbukaan, komunikasi yang baik, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan adaptasi terhadap kebutuhan lokal untuk mencapai hasil pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi dan membandingkan efektivitas berbagai strategi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dengan metode berbagai keterlibatan masyarakat seperti rapat warga, musyawarah desa, dan program pelatihan serta pembinaan.

2. Perumusan pemahaman pemerintah Kalurahan terhadap kondisi lingkungan

Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Kalurahan mempertimbangkan kapasitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kalurahan Pagerharjo. Menurut Kodrianingsih dalam melihat potensi lingkungan didasarkan pada sub indikator, kondisi alam dan manusia. Pemerintah Kalurahan Pagerharjo dalam perencanaan program dan kebijakan mempertimbangkan potensi alam yang dan sumber daya manusia.

“dalam melihat situasi dan kondisi secara fisik di Kalurahan kami ini, kami sadar bahwa banyak potensi alam yang kami miliki dan kami harus benar-benar bisa memanfaatkannya. Kami punya lahan pertanian yang cukup luas, perkebunan dan hutan, yaa walaupun tidak seluas daerah lain, tetapi cukuplah untuk menghidupi masyarakat kami. Potensi ini tentu banyak dampak untuk masayarakat kami, terutama dalam sektor pertanian. Dengan lahan yang subur dan cukup memadai, dibantu lagi dengan teknologi sekarang, itu semakin maksimal hasilnya. Peran kami juga tidak hanya semata-mata memainkan potensi ini, tetapi juga pengembangan pengetahuan kepada petani, biar bagaimanapun semakin majunya teknologi juga kita harus mempersiapkan sdm yang berkualitas, melakukan penyuluhan, sosialisasi, pembinaan dan lain sebagainya. Selain itu

juga kami menyiapkan irigasi untuk pertanian. Kelompok-kelompok perternakan, kelompok perikan, wisata itu juga kami bina. Budaya juga masih kita jalankan disini, kan Kalurahan kita “mandiri budaya” jadi potensi yang ada kami kembangkan dengan maksimal”, (Wawancara dengan Pak Widayat, 28-07-2024).



Gambar 4.12 Sawah

Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti 2024

Keterangan: Gambar di atas adalah bentangan sawah yang ada di Kalurahan Pagerharjo

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh informan Kalurahan Pagerharjo dengan potensi alam yang dimiliki berupa lahan pertanian dan perkebunan yang cukup luas. Sungai dan aliran air yang dimanfaatkan menjadi irigasi pertanian dan air tanah untuk kebutuhan domestik serta pertanian. Hutan lindung dan hutan produksi yang dapat diolah untuk kebutuhan masyarakat. Tanah liat untuk kerajinan lokal. Pengembangan alam untuk ekowisata dan budaya lokal untuk pengembangan dan pelestarian budaya. Dalam pengambilan kebijakan tentu ada kaitannya dengan potensi alam yang dimiliki, sehingga antara kebijakan, program dan implementasi memiliki korelasi yang maksimal.

Selain melihat potensi alam, Kalurahan Pagerharjo dalam mengambil kebijakan juga melihat potensi sumber daya manusia yang dimiliki. Karena kaitan erat dengan pelaksanaan program-program yang menjadi tujuan utama pembangunan. Kalurahan Pagerharjo dalam

pengembangan kapasitas sumber daya manusia dengan melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan. Sosialisasi biasa dilakukan untuk masyarakat ketahui berkaitan dengan program-program Kalurahan. Sementara pelatihan dan pembinaan dilakukan untuk kelompok-kelompok diantaranya; kelompok tani, kelompok ternak, kelompok ikan, kelompok perkebunan, karang taruna, lembaga budaya, masyarakat rentan, kader kesehatan, umkm serta pkk.

“kami juga harus mempertimbangkan kondisi dan situasi dalam pengambilan kebijakan. Selain itu kami juga melihat potensi alam dan sumber daya manusia yang kami miliki seperti apa, sehingga kebijakan yang kami ambil tidak salah. Setelah kebijakan yang kami buat, kami juga harus melihat bagaimana proses kedepannya. Misalnya dalam pelaksanaan kegiatan masih ada kendala tentu kami akan bina serta melakukan evaluasi dan pelatihan yang berkelanjutan. Dengan sumber daya manusia yang terbilang masih rendah ya dalam segi pendidikan, tentu kami mengupayakan dan mensiasati dengan langkah-langkah tepat untuk memberikann pemahaman kepada mereka. Kan kalau kita kayak anak kecil itu ngak mungkin, merekapun ngak mau, ya kita harus pandai-pandai aja masuk di waktu yang tepat, supaya yang kita sampaikan itu dapat mereka serap. Misalnya dalam pertemuan-pertemuan di rt/rw, nah disitulah kita selipkan sedikit arahan dan sosialisasinya, atau pas ada kegiatan adari mahasiswa knn itu juga bisa kita masuk disitu”, (Wawancara dengan Pak Widayat, 28-07-2024).

Berdasarkan informasi yang disampaikan dari informan, peneliti menyimpulkan bahwa dalam pengambilan kebijakan pemerintah di Kalurahan Pagerharjo sangat mempertimbangkan lingkungan seperti potensi alam dan manusia. Sehingga dalam pelaksanaan kebijakn besar kemungkinan adakan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembangunan yang ada di Kalurahan Pagerharjo.

Relevansi dengan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 19-02-2024, kegiatan gotong royong pembangunan jalan antar pedukuhan yang menyebutkan:

Tabel 4.4 Data Observasi

No	Tanggal	Tempat/Kegiatan	Aspek yang diamati	Hasil Observasi	Keterangan
2	19-02-2024	Jalan antar Pedukuhan	Keterlibatan warga dalam kegiatan gotong royong	Kegiatan dilaksanakan dari pagi hingga siang. Warga, pamong Kalurahan dan dukuh ikut terlibat dalam kegiatan tersebut	Keterlibat warga sangat tinggi

Data observasi di atas menunjukkan tingkat keterlibatan warga sangat tinggi, termasuk partisipasi aktif dari pamong Kalurahan dan dukuh. Kegiatan yang dilaksanakan dari pagi hingga siang ini mencerminkan kesadaran kolektif pemerintah dan masyarakat dalam memanfaatkan potensi lokal serta menunjukkan bagaimana kebijakan pembangunan dilandasi oleh pemahaman terhadap kekuatan sosial dan sumber daya manusia di Kalurahan Pagerharjo.

Hasil temuan peneliti selaras dengan temuan yang dikemukakan oleh Kiyato, et. al (2024) tentang Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pembangunan yang dilakukan di Desa Tepisari, bahwa dalam mengambil suatu keputusan pemerintah Desa mempertimbangkan potensi alam dan kondisi sumber daya manusia. Namun, penelitian ini memperluas

pemahaman tentang langkah-langkah dalam mengambil kebijakan untuk menciptakan tujuan yang baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta melakukan strategi yang maksimal.

Implikasi dari temuan ini menekankan pentingnya integrasi aspek lingkungan dalam setiap fase perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Dengan memanfaatkan potensi lokal, meningkatkan kapasitas SDM, melakukan evaluasi berkelanjutan, dan melakukan koordinasi yang efektif antara berbagai pihak, pemerintah desa dapat mencapai hasil pembangunan yang lebih optimal dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga mendukung pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat desa.

Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi potensi alam seperti lahan pertanian, hutan, dan sumber daya air dimanfaatkan dalam kebijakan dan program pembangunan dengan analisis potensi alam dan penerapan dalam kebijakan. Ini termasuk menganalisis metode spesifik yang digunakan untuk mengintegrasikan potensi lingkungan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan, serta mengevaluasi efektivitas penggunaan potensi alam dalam mencapai hasil pembangunan yang diinginkan.

3. Perumusan Visi dan Arah Strategis

Pengarahan adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan untuk mencapai tujuan dan hasil pembangunan yang optimal, baik kepada pamong Kalurahan maupun masyarakat. Menurut Kodrianingsih, pengarahan melibatkan empat sub indikator utama: koordinasi, motivasi, komunikasi, dan perintah.

Proses koordinasi pemerintah dilakukan secara terstruktur dan berjenjang untuk memastikan penyampaian instruksi dan informasi berjalan dengan efektif. Setiap kali ada instruksi atau arahan dari pemerintah pusat

atau pemerintah daerah, pemerintah Kalurahan Pagerharjo segera mengadakan pertemuan internal. Pertemuan ini melibatkan seluruh pamong Kalurahan, kepala dukuh, anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), serta lembaga-lembaga terkait.

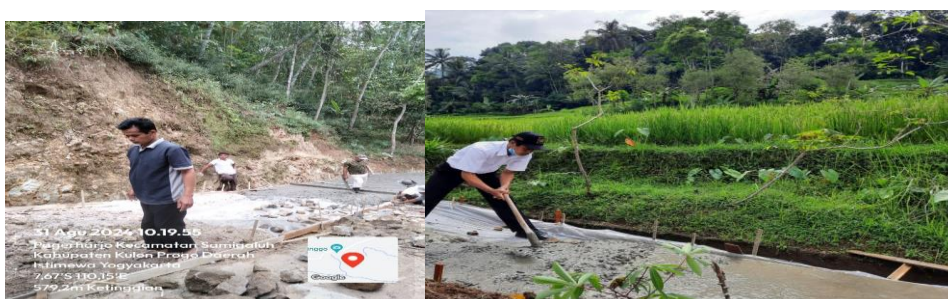
Selama pertemuan ini, semua pihak membahas dan mencapai kesepakatan mengenai isi dan pelaksanaan instruksi yang diterima. Tujuannya adalah memastikan bahwa instruksi tersebut dipahami dengan jelas dan dapat diterjemahkan dalam bentuk tindakan yang konkret. Setelah kesepakatan tercapai, informasi mengenai instruksi tersebut diumumkan kepada masyarakat. Kepala dukuh bertugas untuk menyebarkan informasi ini kepada warga di tingkat pedukuhan.

Kepala dukuh kemudian menyampaikan instruksi tersebut kepada RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga) yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua warga menerima dan memahami informasi tersebut. Dengan pendekatan ini, Kalurahan Pagerharjo dapat memastikan bahwa setiap instruksi dari tingkat yang lebih tinggi diterima dan dilaksanakan dengan baik, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Proses ini menunjukkan komitmen pemerintah Kalurahan untuk menjaga keteraturan, transparansi, dan efektivitas dalam penyampaian kebijakan dan instruksi.

Motivasi merupakan dorongan untuk masyarakat agar aktif terlibat dalam kegiatan yang diadakan pemerintah dengan tujuan tertentu. Pemerintah Kalurahan Pagerharjo memotivasi masyarakat dengan menjalin kedekatan, seperti Lurah yang langsung terlibat dan membantu dalam berbagai kegiatan di tingkat Kalurahan, pedukuhan, RT, dan RW. Sehingga melalui pendekatan tersebut menjadi sebuah kebanggaan masyarakat melihat pemimpin yang mau terlibat dalam kegiatan masyarakat. Pamong Kalurahan

juga menjadi acuan dalam memotivasi masyarakat dengan ikut ambil bagian dalam kegiatan gotong royong dan kerja bakti lainnya. Sementara kepala dukuh, RT, dan RW memberikan contoh dengan berpartisipasi langsung dalam setiap program yang diadakan.

“menjadi pemimpin kita harus sabar dan tidak boleh sombong, kita harus bermasyarakat, dekat dengan masyarakat, mau terlibat dalam kegiatan masyarakat. karena dasarnya kita adalah pelayan. Saya sendiri biasa ikut kerja bakti dengan masyarakat, berkumpul dan ngopi-ngopi bersama masyarakat, biasa beli beli produk dari masyarakat. Nah ini menjadi penilaian sendiri dari masyarakat dan ini juga dapat menumbuhkan mindset dari masyarakat itu sendiri. Setelah melalui fase ini, maka masyarakat akan secara sendirinya terbiasa memiliki kedekatan dengan kita, nah nantinya dia akan merasa nyaman sama kita dan kita juga mudah untuk mengayominya. Tanpa kita sadari kebiasaan yang kita jalani itu membuahkan motivasi kepada masyarakat. Setiap ada kegiatan di pedukuhan atau di rt saya usahakan datang dalam kegiatan itu. Paling tidak kita mengetahui apa yang dibahas dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di masyarakat. ini juga menurut saya menjadi point penting untuk menunjukkan kepedulian kita terhadap masyarakat”, (Wawancara dengan Pak Widayat, 28-07-2024).



Gambar 4.13 Pak lurah turun tangan kerja bakti

Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti 2024

Keterangan: Gambar di atas adalah keterlibatan Pemerintah Kalurahan dalam eksekusi program pembangunan, yaitu Pak Lurah yang langsung turun tangan dalam pelaksanaan kegiatan pembuatan jalan dan irigasi.

Hal sama juga disampaikan oleh Pak Wacit Cahyono selaku ulu-ulu Kalurahan Pagerharjo:

“kami sebagai koordinator kegiatan dalam berbagai program pembangunan tentu kami akan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, yaa dengan cara terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan. Dan kita tidak hanya jadi penonton tetapi ambil bagian dalam kerja nyata. Misalnya dalam pembuatan jalan antar pedukuhan jembatan dan lain sebagainya, yaa kita ambil bagian dalam pelaksanaannya sesuai kemampuan kita. Sehingga masyarakat yang melihat kita turun langsung dan ikut mereka bekerja, mereka akan merasa termotivasi dan lebih giat dari kita untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan”, (Wawancara dengan Pak Wacit Cahyono, 28-07-2024).



Gambar 4.14 Kerja bakti jalan pedukuhan

Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti Tahun 2024

Keterangan: Gambar di atas adalah kerja bakti Kalurahan Pagerharjo dalam pembangunan jalan antar pedukuhan.

Pak Aji selaku anggota masyarakat biasa asli penduduk Kalurahan Pagerharjo menjelaskan hal-hal yang dirasakan selama menjadi masyarakat.

“kalau yang kami rasakan ya untuk di Kalurahan Pagerharjo ini baik dari Kalurahan, pedukuhan hingga tingkat rt/rw memang sangat mengayomi kami, terlebih mereka yang sangat bermasyarakat. Bisa kami katakana tidak ada batasanlah antara pihak pemerintah dengan kami masyarakat, yaa seperti masyarakat biasa juga. Kalau ketemu kita saling tegur sapa, mendengarkan keluhan kesah kita, dan biasa ikut

kita dalam kerja bakti. Itu yang menjadi motivasi bagi kami, terkadang kami mikirnya “gimana kita masyarakat yang mau malas-malas, sementara dari pihak Kalurahan sangat semangat membangun kita” nah ini yang menjadi pendorong kami untuk aktif dalam program yang kami ajukan bersama untuk merealisasikan dengan baik”, (Wawancara dengan Pak Aji, 30-07-2024).

Bu Maria Sumarni selaku pelaku umkm masyarakat biasa asli Kalurahan Pagerharjo menjelaskan kebiasaan baik yang dilakukan oleh pamong Kalurahan dalam memotivasi masyarakat.

“yang saya bangga sama pak Lurah tu, beliau tu ngomong sesuai dengan realitas. Beliau biasanya berbicara mengenai umkm, dan beliau tu benar-benar apa yang diomongkan sesuai dengan tindakannya. Beliau sering belanja hasil umkm, kami jadi sangat bangga karena produk kami laris. Tidak seperti misalnya ingin mendorong umkm tapi ngak pernah beli produk lokal, kan sama aja. Nah kalau beliau beda, dia utamakan produk lokal, tidak perlu gensi-gensi katanya, kita harus mencintai produk lokal kita”, (Wawancara dengan Pak Subarkah 30-07-2024).



1. Gambar Hasil UMKM

2. Gambar Budidaya dan Produksi

Gambar 4.15 Budidaya dan Produksi UMKM

Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti dan data sekunder profil Kalurahan Pagerharjo Tahun 2024

Keterangan: Gambar di atas adalah, 1 hasil umkm masyarakat Pagerhajo dan gambar 2 adalah tempat budidaya dan produksi umkm.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh informan, peneliti menyimpulkan bahwa strategi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kalurahan Pagerharjo untuk meningkatkan rasa kepedulian masyarakat

dengan terlibat langsung dalam berbagai kegiatan masyarakat. Selain membangun motivasi masyarakat strategi ini juga menciptakan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan yang ada di Kalurahan Pagerharjo.

Komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara individu dalam kelompok untuk mencapai tindakan bersama. Di Kalurahan Pagerharjo proses komunikasi dilakukan melalui berbagai cara, termasuk interaksi langsung, pemanfaatan media sosial Kalurahan, pedukuhan, rt, rw, penggunaan fasilitas Kalurahan, dan penyampaian informasi melalui infografis. Infografis biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai anggaran APBDes. Komunikasi diupayakan sebaik mungkin untuk menghindari kesalahpahaman antara pemerintah Kalurahan dan masyarakat. Ketika terjadi miskomunikasi, maka secepatnya informasi yang jelas akan diberikan untuk memastikan pemahaman yang benar di kalangan masyarakat, dengan tujuan untuk membangun kepercayaan terhadap pemerintah Kalurahan.

“komunikasi kami cukup baik, terutama di era sekarang yaa, kan udah ada Wa tu, jadi kami manfaatkan wa untuk menjalin komunikasi satu sama lain. Mungkin kalau interaksi secara langsung kayaknya terbatas. Kalaupun kita sama-sama di kantor tentu punya kesibukan masing-masing. Untuk memudahkan komunikasi dengan pamong kalurahan, pedukuhan, rt/rw hingga masyarakat kami ada grup. Kan kami Kalurahan ada grup, kemudian di pedukuhan ada grup juga, kemudian rt/rw ada grup juga bersama warganya. Sehingga ketika menyampaikan informasi yang kami sangat mudah. Dan bisa dipastikan informasi itu tersampaikan ke masyarakat. kami juga tidak membatasi komunikasi dengan masyarakat, baik secara offline mau online. Sejauh ini komunikasi yang kami lakukan sangat baik”, (Wawancara dengan Pak Widayat 28-07-2024).



Gambar 4.16 Anggaran infrastruktur pembangunan jalan

Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti Tahun 2024

Keterangan: Gambar di atas adalah infografis tentang anggaran untuk pembangunan infrastruktur.

Hal ini juga dijelaskan Pak Hendi Masaleh selaku kepala Dukuh di Kalurahan Pagerharjo:

“kami selaku perpanjangan tangan dari Kalurahan kami juga selalu menjalani komunikasi yang baik terhadap masyarakat. Ibaratnya kami ini perantara antara pemerintah dan masyarakat. Apa yang disampaikan pihak Kalurahan itulah yang kami sampaikan kepada masyarakat. Sejauh ini komunikasi kami sangat baik, kami dan pihak rt/rw juga menjalani komunikasi dengan baik”. (Wawancara dengan Pak Hendi Saleh 28-07-2024)

Selanjutnya dijelaskan oleh Pak Paulus Prio Subtano yang juga kepala dukuh di Kalurahan Pagerharjo menjelaskan bahwa:

“ada banyak hal yang memang terhimpun dalam komunikasi, terutama dalam menyapaikan pesan yang dibawa dari pemerintah Kalurahan untuk masyarakat. Jadi ya kami harus melakukannya dengan bijak dan tidak menambah atau mengurangi, ini juga menjadi suatu nilai tambah ya ketika kami menyampaikan informasi yang factual. Masyarakat juga merasa terbantu atas informasi yang kami sampaikan. Kalau untuk komunikasi kami sangat baik dengan masyarakat, selain offline juga kami lewat online, kan satu dukuh tu kami punya grup dengan rt/rw juga dengan masyarakat. Kami juga nyaman melakukan koordinasi dengan mereka”, (Wawancara dengan Pak Paulus Prio Subtano, 28-07-2024).

Verifikasi yang disampaikan oleh Pak Yatino selaku masyarakat biasa Kalurahan Pagerharjo menjelaskan bahwa:

“kami masyarakat mungkin memiliki keberuntungan ya punya pemimpin yang sangat terbuka, apalagi di saat kami membutuhkan mereka. Kami juga nyaman dalam berkomunikasi dengan pihak pemerintah Kalurahan, tidak harus dalam bentuk formal. Misalnya lewat wa pun tetap di respon sama mereka, di tempat-tempat tongkrongan, tempat ngopi, pas saat kerja bakti. Intinya komunikasi yang nyamanlah dengan pihak pemerintah Kalurahan”, (Wawancara dengan Pak Yatino, 30-08-2024)

Berdasarkan informasi yang diberikan informan, peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi antar Kalurahan dan masyarakat berjalan dengan sangat baik.

Kemudian perintah, merupakan proses dimana pemerintah memberikan petunjuk dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Tujuan dari pemberian perintah ini adalah untuk memberikan arahan yang jelas agar program dapat berjalan dengan efektif dan mencapai hasil yang diinginkan. Di Pemerintah Kalurahan Pagerharjo, saat ada program atau kegiatan baru, arahan dan petunjuk disampaikan melalui kepala pedukuhan. Kepala dukuh bertindak sebagai perantara antara pemerintah Kalurahan dan masyarakat, memastikan bahwa instruksi yang diberikan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak yang terlibat.

“setiap ada kebijakan dan program yang akan kita laksanakan, pasti kita mensosialisasikan kepada masyarakat. Namun karena jumlah masyarakat lebih banyak dari kita, maka kita menyampaikannya lewat pedukuhan, kemudian pedukuhan menyampaikan ke rt/rw dan mereka akan menyampaikan ke pada masyarakatnya. Sehingga apa yang menjadi program kami bersama dapat terlaksana dengan baik. Ya kami harus memberikan arahan dan bimbingan, misalnya bagi masyarakat yang belum paham, mungkin lewat pertemuan-pertemuan pedukuhan sembari kami memberikan pelatihan dan bimbingan”, (Wawancara dengan Pak Widayat, 2-08-2024).



Gambar 4.17 Sosialisasi program pembangunan

Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti Tahun 2024

Keterangan: Gambar di atas adalah kegiatan sosialisasi program pembangunan Kalurahan yang dilaksanakan di Balai Kalurahan Pagerharjo oleh Pamong Kalurahan.

Berdasarkan data yang diberikan oleh informan, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa berbagai metode yang diterapkan oleh pemerintah Kalurahan Pagerharjo untuk memberikan panduan kepada masyarakat, diharapkan dapat membuat program yang dilaksanakan berlangsung sesuai rencana dan mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Relevansi dengan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 12-06-2024, kegiatan Musyawarah perencanaan pelaksanaan gotong-royong bangun jalan menyebutkan:

Tabel 4.5 Data observasi

No	Tanggal	Tempat/Kegiatan	Aspek yang diamati	Hasil Observasi	Keterangan
1	16-02-2024	Rumah Pak Dukuh	Musyawarah perencanaan pelaksanaan gotong-royong bangun jalan	Kegiatan dihadiri oleh Lurah, dukuh, rt dan warga setempat	Keterlibatan warga cukup tinggi

Data observasi di atas menunjukkan koordinasi dan komunikasi yang efektif ketika dilakukan musyawarah perencanaan kegiatan gotong royong pembangunan jalan di rumah salah satu dukuh. Musyawarah tersebut dihadiri oleh Lurah, dukuh, RT, serta warga setempat, dan menunjukkan keterlibatan warga yang cukup tinggi. Ini menandakan bahwa proses pengarahan pemerintah tidak berjalan satu arah, melainkan melalui forum diskusi yang partisipatif. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa koordinasi antar lini pemerintahan dan masyarakat berjalan efektif, sejalan dengan visi pemerintah Kalurahan dalam mendorong pembangunan berbasis keterlibatan langsung warga.

Hasil temuan peneliti konsisten dengan temuan penelitian yang dikemukakan oleh Kodrianingsih, et. al (2023) tentang Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pembangunan yang dilakukan di Desa Aikmal yang menemukan bahwa Strategi pemerintah dalam mencapai tujuan didasarkan pada pengarahan yang jelas dengan sub koordinasi, motivasi, komunikasi, dan perintah. Namun, penelitian ini lebih memberikan pemahaman yang luas berkaitan dengan koordinasi, motivasi, komunikasi dan perintah yang ditemukan dalam pelaksanaan strategi yang ada di Kalurahan Pagerharjo.

Temuan ini selaras dengan temuan yang dikemukakan oleh Handayani, (2022) tentang Strategi kepemimpinan Kepala Desa Kedungjaran dalam meningkatkan pembangunan desa mencakup beberapa aspek. Pertama, beliau menerapkan musyawarah desa yang efektif untuk merumuskan program pembangunan. Selain itu, beliau juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kepala Desa Kedungjaran berupaya memberikan motivasi dan inspirasi kepada bawahannya serta masyarakat, sehingga menciptakan keterlibatan yang lebih aktif dalam proses

pembangunan desa, namun penelitian ini lebih memberikan wawasan yang luas tentang upaya dan usaha pemerintah dalam mendorong pembangunan masyarakat melalui berbagai pendekatan yang relevan.

Implikasi temuan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang holistik dan integratif dalam pengarahannya untuk menciptakan partisipasi masyarakat yang lebih aktif dan hasil pembangunan yang lebih baik. Pendekatan ini tidak hanya mempermudah pelaksanaan kebijakan tetapi juga mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, mendukung pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian lebih lanjut dapat menganalisis Dampak Keterlibatan Pemimpin terhadap Motivasi Masyarakat dengan fokus penelitian menganalisis seberapa besar keterlibatan langsung pemimpin desa dalam kegiatan komunitas mempengaruhi motivasi dan partisipasi masyarakat dengan tujuan untuk menilai perbedaan motivasi antara desa dengan tingkat keterlibatan pemimpin yang berbeda.

4. Perumusan tindakan strategis pemerintah Kalurahan

Tindakan merupakan langkah konkret yang diambil oleh pemerintah Kalurahan untuk mencapai program yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan strategi yang telah direncanakan (Permatasari, 2024). Kodriangsih menetapkan tiga sub indikator dalam tindakan, pertama situasi masyarakat, kedua kegiatan yang digunakan, dan yang ketiga pengambilan Keputusan.

Situasi masyarakat adalah pemerintah dalam membuat suatu program perlu mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Mayoritas pekerjaan masyarakat Kalurahan Pagerharjo buruh tani dan petani. Untuk menunjang kegiatan pertanian masyarakat di Kalurahan Pagerharjo, pemerintah Kalurahan mengambil berbagai tindakan strategis. Melakukan

penyuluhan pertanian, menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan kepada petani mengenai teknik pertanian modern, penggunaan pupuk dan pestisida yang efisien, serta cara-cara meningkatkan hasil panen.

“Kami dari pihak pemerintah tentu sangat fokus untuk mendukung sektor pertanian sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah. Kami juga memahami pentingnya pertanian dalam kehidupan masyarakat lokal dan kami berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan hasil produksi melalui penyuluhan, pelatihan, dan teknik-teknik pertanian modern yang bisa kami berikan kepada masyarakat kami” (Wawancara dengan Pak Widayat, 3-08-2024).



1. Gambar Mesin Kopi

2. Gambar Edukasi Petani Kopi

Gambar 4.18 Mesin kopi dan kegiatan edukasi petani kopi

Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti Tahun 2024

Keterangan: Gambar di atas adalah 1, Mesin Penggiling Kopi guna untuk mempercepat proses pengolahan kopi. Gambar 2 adalah kegiatan edukasi oleh petani kopi kepada warga.

Penyediaan infrastruktur, membangun atau memperbaiki infrastruktur yang mendukung pertanian, seperti irigasi, jalan penghubung, dan fasilitas penyimpanan hasil pertanian. Pemberian bantuan sarana dan prasarana, memberikan bantuan berupa alat pertanian, bibit unggul, pupuk, dan pestisida kepada petani. Penyediaan kredit dan bantuan keuangan, menyediakan akses ke kredit pertanian dengan bunga rendah atau bantuan keuangan untuk mendukung kegiatan pertanian. Pemasaran hasil pertanian, membantu petani dalam memasarkan hasil pertanian mereka melalui pasar

lokal atau jaringan distribusi yang lebih luas, serta mendukung pengembangan produk olahan. Kolaborasi dengan pihak ketiga, melaksanakan kerja sama dengan lembaga penelitian, universitas, dan organisasi non-pemerintah guna mendapatkan teknologi terbaru dan dukungan tambahan. Dengan melaksanakan tindakan-tindakan ini, diharapkan kegiatan pertanian di Kalurahan Pagerharjo dapat berkembang dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat setempat.

Hasil ini disampaikan oleh Pak Agustio selaku petani kopi Kalurahan Pagerharjo.

"Perbaikan infrastruktur, terutama sistem irigasi, sangat membantu kami dalam mengelola kebutuhan air untuk tanaman. Jalan penghubung yang lebih baik juga mempermudah akses kami ke pasar dan pengiriman hasil panen. Bantuan alat pertanian dan bibit unggul sangat berharga bagi kami. Alat yang lebih modern membantu kami bekerja lebih efisien, dan bibit unggul serta pupuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Akses ke kredit pertanian sangat membantu kami dalam membeli sarana dan prasarana yang diperlukan. Dukungan dalam pemasaran hasil pertanian sangat penting bagi kami. Kami merasa lebih mudah menjual produk kami di pasar lokal dan jaringan distribusi yang lebih luas. Pengembangan produk olahan juga membantu meningkatkan nilai jual hasil panen kami. " (Wawancara dengan Pak Agustio 04-08-2024).

Berdasarkan informamasi yang disampaikan informan, peneliti menyimpulkan kelompok tani di Kalurahan Pagerharjo merasa bahwa langkah-langkah yang diambil pemerintah sangat bermanfaat dan mendukung perkembangan pertanian di daerah mereka. Namun, mereka juga menunjukkan adanya beberapa area yang perlu diperbaiki, seperti distribusi bantuan yang lebih merata, kemudahan akses kredit, dan dukungan dalam pemasaran produk.

Kemudian kegiatan yang digunakan, yaitu menentukan jenis kegiatan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Banyak strategi yang digunakan pemerintah Kalurahan Pagerharjo untuk mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam program pembangunan Kalurahan. Seperti, keterbukaan, menciptakan komunikasi yang baik dengan masyarakat, menjalin kedekatan antara pemerintah Kalurahan dengan masyarakat, melibatkan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap program pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kalurahan Pagerharjo menerapkan beberapa strategi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, yaitu: pertama Instruksi pemerintah Kalurahan, ke dua Rapat koordinasi, dan ke tiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Pertama Instruksi Pemerintah Kalurahan, Pemerintah Kalurahan Pagerharjo memberikan instruksi langsung kepada masyarakat. Ini mencerminkan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dan warga, serta penerapan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Setiap kegiatan pembangunan memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat, dan instruksi tersebut membantu memastikan bahwa prinsip tersebut terlaksana. Instruksi memastikan adanya komunikasi yang jelas dan terbuka antara pemerintah Kalurahan dan warga. Melalui pengumuman resmi, surat edaran, atau pertemuan langsung, masyarakat diberi tahu mengenai rencana, tujuan, dan jadwal kegiatan pembangunan. Instruksi mencerminkan prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Pemerintah Kalurahan berusaha untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dalam setiap tahap kegiatan pembangunan, memastikan bahwa semua pihak terlibat dan informasi disampaikan dengan jelas. Setelah instruksi diberikan, pemerintah

Kalurahan juga melakukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa masyarakat mengikuti arahan tersebut. Evaluasi berkala dilakukan untuk menilai efektivitas instruksi dan menyesuaikannya jika diperlukan.

Martono selaku ketua LPMKL Pagerharjo menjelaskan terkait intruksi yang diberikan pemerintah Kalurahan.

"Instruksi dari pemerintah Kalurahan sangat penting untuk memastikan semua pihak terlibat dalam proses pembangunan. Instruksi yang jelas membantu kami dalam menyampaikan informasi yang tepat kepada masyarakat. Keterbukaan informasi melalui pengumuman resmi dan surat edaran memungkinkan kami untuk memastikan bahwa masyarakat memahami rencana dan tujuan pembangunan. Namun, kami juga menghadapi tantangan dalam hal penyampaian instruksi secara tepat waktu dan merata, terutama di daerah-daerah yang lebih terpencil", (Wawancara dengan Pak Martono, 04-08-2024).

Relevansi dengan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal **19-02-2024**, kegiatan gotong royong pembangunan jalan yang menyebutkan:

Tabel 4.6 Data observasi

No	Tanggal	Tempat/Kegiatan	Aspek yang diamati	Hasil Observasi	Keterangan
2	19-02-2024	Jalan antar Pedukuhan	Keterlibatan warga dalam kegiatan gotong royong	Kegiatan dilaksanakan dari pagi hingga siang. Warga, pamong Kalurahan dan dukuh ikut terlibat dalam kegiatan tersebut	Keterlibat warga sangat tinggi

Berdasarkan hasil observasi pada 19 Februari 2024 yang dilakukan di jalan antar pedukuhan, tampak bahwa kegiatan gotong royong pembangunan jalan dilaksanakan secara massal sejak pagi hingga siang hari. Dalam kegiatan tersebut, warga, pamong Kalurahan, dan dukuh terlibat langsung dalam proses pelaksanaan.

Tingginya keterlibatan masyarakat menunjukkan bahwa instruksi dari pemerintah Kalurahan diterima dan dijalankan dengan baik oleh warga. Ini menjadi indikasi bahwa komunikasi dan koordinasi yang telah dibangun selama ini efektif dalam mendorong semangat kolektif, serta memperkuat nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong. Fakta ini juga menguatkan bahwa strategi pembangunan yang diterapkan tidak hanya berbasis kebijakan formal, tetapi juga berakar kuat pada budaya partisipatif masyarakat desa.

Hal ini disampaikan juga oleh Bu Nisa ketua PKK Kalurahan Pagerharjo yang menyatakan bahwa:

"Instruksi merupakan bagian krusial dalam memastikan partisipasi masyarakat. Kami mengadakan pertemuan langsung untuk menjelaskan instruksi dan mendapatkan umpan balik dari masyarakat. Proses ini mencerminkan prinsip good governance dengan menjaga transparansi dan akuntabilitas. Kami terus memantau pelaksanaan instruksi dan melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa arahan diikuti dengan baik", (Wawancara dengan Bu Nisa 02-09-2024)

Kedua Rapat Koordinasi, Pemerintah Kalurahan Pagerharjo juga mengadakan rapat koordinasi untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan desa. Rapat ini bertujuan untuk mendiskusikan dan merencanakan berbagai aspek pembangunan, serta memastikan bahwa partisipasi masyarakat menjadi bagian integral dari setiap kegiatan. Rapat bersama melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan masyarakat, tokoh

masyarakat, dan anggota pemerintah Kalurahan. Tujuannya adalah untuk merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembangunan secara terstruktur, sehingga setiap pihak memahami perannya dan tanggung jawabnya. Dalam rapat koordinasi, masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, mengajukan pertanyaan, dan menyampaikan kekhawatiran mereka. Ini membantu memastikan bahwa kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Rapat juga berfungsi untuk menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan dan membagi tugas kepada pihak-pihak terkait. Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan kegiatan pembangunan dapat berjalan lancar dan tepat waktu.

Hal ini juga dijelaskan oleh ketua LMPK Pak Supanto Kalurahan Pagerharjo yang menyatakan bahwa:

"Rapat koordinasi sangat efektif dalam menyusun rencana pembangunan yang melibatkan semua pihak terkait. Ini memberikan kesempatan bagi perwakilan masyarakat untuk menyampaikan masukan dan memastikan bahwa kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Rapat ini juga membantu kami dalam merencanakan jadwal dan tugas, serta dalam membangun konsensus di antara semua pihak", (Wawancara dengan Pak Supanto, 06-08-2024).



Gambar 4.19 Musyawarah Kalurahan Pagerharjo Bahas Penyusunan RKP

Sumber: Data sekunder profil Kalurahan Pagerharjo Tahun 2024

Keterangan: Gambar di atas adalah kegiatan musyawarah Kalurahan Pagerharjo dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP)

Bu Nisa selaku Ketua PKK juga menyampaikan hal yang sama terkait koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Pagerharjo:

"Rapat koordinasi membantu memastikan bahwa setiap elemen dari program pembangunan terintegrasi dengan baik. Diskusi yang terbuka dan partisipasi aktif dari masyarakat memungkinkan kami untuk mengidentifikasi potensi masalah lebih awal dan menyesuaikan rencana sesuai dengan kebutuhan. Kami merasa bahwa koordinasi yang baik mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pembangunan secara signifikan", (Wawancara dengan Pak PKK, 04-08-2024)

Ketiga RPJM Kalurahan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan adalah pedoman utama dalam pelaksanaan program kerja. RPJM Kalurahan ini berfungsi sebagai acuan dalam merancang dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan dan mendorong kemajuan desa. Dokumen ini mencakup tujuan jangka menengah, prioritas pembangunan, dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai sasaran tersebut. Penyusunan RPJM melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, melalui forum konsultasi dan diskusi, masyarakat dapat memberikan masukan tentang prioritas pembangunan dan kebutuhan desa. Hal ini memastikan bahwa RPJM mencerminkan aspirasi dan kebutuhan nyata masyarakat. RPJM juga mencakup mekanisme untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. Pemerintah Kalurahan melakukan evaluasi berkala untuk menilai kemajuan pelaksanaan RPJM, mengidentifikasi tantangan, dan membuat penyesuaian jika diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal. Dengan mengikuti RPJM, maka pembangunan di Pagerharjo lebih terencana dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan strategi-strategi ini,

Pemerintah Kalurahan Pagerharjo berupaya untuk menciptakan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap langkah pembangunan, sehingga hasil yang dicapai dapat lebih maksimal dan sesuai dengan kebutuhan warga.

Hal ini disampaikan oleh ketua LMPKal Kalurahan Pagerharjo Bapak Supanto:

"RPJM merupakan pedoman utama yang membantu kami merancang dan melaksanakan program pembangunan secara sistematis. Proses penyusunan RPJM yang melibatkan forum konsultasi dan diskusi dengan masyarakat memastikan bahwa prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan mereka. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala memungkinkan kami untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal", (Wawancara dengan Pak Supanto, 06-08-2024).



Gambar 4.20 Rapat Evaluasi Kegiatan

Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti Tahun 2024

Keterangan: gambar di atas adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat.

Bu Nisa ketua PKK Kalurahan Pagerharjo menyapaikan bahwa:

"RPJM memberikan kerangka kerja yang jelas untuk perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RPJM memungkinkan kami untuk merespons kebutuhan nyata dan prioritas lokal. Kami terus memantau pelaksanaan RPJM dan melakukan evaluasi untuk mengatasi tantangan dan memastikan pencapaian sasaran pembangunan. Dengan RPJM, pembangunan di Kalurahan Pagerharjo menjadi lebih terencana dan terarah", (Wawancara dengan Ketua PKK.06-08-2024).

Berdasarkan informasi yang di sampaikan informan, peneliti menyimpulkan bahwa instruksi yang jelas membantu dalam penyampaian informasi, rapat koordinasi memastikan keterlibatan semua pihak, dan RPJM memberikan panduan yang terstruktur untuk pelaksanaan proyek. Meskipun strategi ini efektif, masih ada tantangan dalam hal penyampaian informasi, koordinasi, dan penyesuaian RPJM yang perlu diatasi untuk meningkatkan hasil pembangunan di desa.

Pengambilan keputusan merupakan proses akhir dari perencanaan suatu program pemerintah yang akan ditetapkan. Pemerintah Kalurahan Pagerharjo dalam pengambilan keputusan melibatkan masyarakat melalui beberapa tingkatan musyawarah. Hasil penelitian di Kalurahan Pagerharjo menunjukkan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) memiliki peran penting. Di Kalurahan Pagerharjo, mekanisme yang diterapkan meliputi: musyawarah di tingkat dusun, partisipasi lembaga kemasyarakatan, musyawarah di tingkat Kalurahan, pengambilan keputusan, serta tahap implementasi dan evaluasi.

Musyawarah tingkat dusun/pedukuhan, musrenbang dimulai dengan musyawarah di tingkat pedukuhan. Di sini, warga pedukuhan berkumpul untuk membahas dan merumuskan usulan pembangunan yang dianggap prioritas. Musyawarah ini melibatkan perwakilan dari setiap RT (Rukun Tetangga), tokoh masyarakat, serta anggota lembaga kemasyarakatan seperti Karang Taruna, PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Dalam musyawarah ini, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi, kebutuhan, dan masalah yang mereka hadapi. Setiap usulan dicatat dan diprioritaskan berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Usulan-usulan yang dikumpulkan kemudian didiskusikan untuk mendapatkan kesepakatan

bersama. Proses ini memastikan bahwa semua suara didengar dan setiap usulan dipertimbangkan dengan matang.

Kepala Lurah Pagerharjo Pak. Widayat menyampaikan bahwa:

"Musyawarah tingkat dusun merupakan langkah awal yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Di sini, masyarakat menyampaikan usulan dan aspirasi mereka yang kemudian dikumpulkan dan diprioritaskan. Kami memastikan bahwa semua suara didengar, baik dari RT, tokoh masyarakat, maupun lembaga kemasyarakatan seperti PKK dan Karang Taruna. Proses ini membantu kami memahami kebutuhan mendasar di setiap pedukuhan dan memastikan bahwa perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan nyata masyarakat", (Wawancara dengan Pak Widayat, 08-08-2024).

Wackid Cahyono selaku ulu-ulu Kalurahan Pagerharjo juga menjelaskan peran penting musyawarah pedukuhan dalam menentukan pembangunan:

"Musyawarah tingkat dusun sangat krusial karena inilah saat di mana masyarakat dapat secara langsung menyampaikan masalah dan usulan mereka. Proses ini memberikan ruang bagi setiap pihak untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam merumuskan rencana pembangunan yang relevan dengan kebutuhan mereka. Kami sebagai Ulu-ulu juga berperan dalam memfasilitasi diskusi dan mengumpulkan informasi yang diperlukan", (Wawancara dengan Pak Wackid Cahyono 06-08-2024)

Pak Subardi juga menjelaskan tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah pedukuhan.

"Musyawarah tingkat dusun sangat penting bagi kami karena memberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan masalah yang kami hadapi. Kami merasa lebih terlibat dan didengarkan dalam proses ini. Usulan kami didiskusikan secara terbuka, dan itu membuat kami merasa bahwa pembangunan yang direncanakan lebih sesuai dengan kebutuhan kami", (Wawancara dengan Pak Subardi, 28-07-2024).

Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan, peran lembaga kemasyarakatan seperti PKK, Karang Taruna, dan organisasi lokal lainnya memainkan peran penting dalam Musrenbang. Mereka membantu memfasilitasi diskusi, mengumpulkan data, dan mengelola informasi terkait usulan pembangunan. Kerja sama antara pemerintah Kalurahan dan lembaga kemasyarakatan memastikan bahwa proses perencanaan lebih inklusif dan partisipatif. Lembaga kemasyarakatan berfungsi untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam proses perencanaan.

Ketua PKK dan Pak. Aji masyarakat Kalurahan Pagerharjo menjelaskan bahwa:

"Kami membantu memfasilitasi diskusi di tingkat pedukuhan dengan mengumpulkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, kami juga berperan dalam menyebarluaskan informasi tentang proses Musrenbang kepada anggota dan masyarakat luas. Melalui kegiatan PKK, kami memastikan bahwa semua usulan pembangunan yang diusulkan mencakup kebutuhan masyarakat secara menyeluruh", (Wawancara dengan Ketua PKK, 06-08-2024)

"Keterlibatan lembaga kemasyarakatan seperti PKK dan Karang Taruna sangat membantu. Mereka sering mengadakan pertemuan untuk menjelaskan tentang Musrenbang dan membantu kami dalam menyampaikan usulan. Dengan adanya mereka, kami merasa lebih mudah untuk memberikan masukan dan memahami bagaimana proses perencanaan berjalan. Keterlibatan ini membuat kami merasa bahwa suara kami didengar dan dipertimbangkan dalam proses perencanaan pembangunan", (Wawancara dengan Pak Aji 08-08-2024).



Gambar 4.21 Pertemuan menggali aspirasi masyarakat

Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti Tahun 2024

Keterangan: Gambar di atas adalah pertemuan ibu PKK dalam rangka menggali aspirasi masyarakat yang dilaksanakan di Balai Kalurahan Pagerharjo.

Musyawarah Tingkat Kalurahan, setelah musyawarah di tingkat pedukuhan, hasilnya disampaikan ke musyawarah tingkat Kalurahan. Di tingkat ini, semua usulan dari berbagai pedukuhan digabungkan dan dirumuskan menjadi rancangan pembangunan Kalurahan. Pada tahap ini, usulan yang telah diterima akan diverifikasi dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang telah ditentukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM).

Pak Widayat selaku kepala Lurah Pagerharjo menjelaskan bahwa:

"Musyawarah tingkat Kalurahan adalah tahap di mana semua usulan dari pedukuhan digabungkan dan disinkronkan dengan prioritas yang ada dalam RPJM. Proses ini memungkinkan kami untuk memverifikasi dan menyusun rencana pembangunan yang menyeluruh. Kami juga memastikan bahwa rancangan pembangunan mencerminkan visi dan misi Kalurahan", (Wawancara dengan Pak Widayat, 10-08-2024)

Bapak Subarkah selaku masyarakat asli Kalurahan Pagerharjo menyampaikan bahwa:

"Musyawarah tingkat Kalurahan membantu kami melihat gambaran besar dari rencana pembangunan. Kami merasa bahwa semua usulan yang kami ajukan di tingkat pedukuhan diperhitungkan dengan baik dalam perencanaan. Ini membuat kami yakin bahwa rencana pembangunan Kalurahan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi semua masyarakat", (Wawancara dengan Pak Subarkah 08-08-2024).

Pengambilan Keputusan, dalam penyusunan rencana pembangunan didasarkan pada hasil musyawarah, pemerintah Kalurahan menyusun dokumen rencana pembangunan yang mencakup detail mengenai proyek-proyek yang akan dilaksanakan. Dokumen ini meliputi daftar kegiatan, anggaran yang dibutuhkan, dan jadwal pelaksanaan. Rancangan pembangunan yang telah disusun kemudian dibahas dan disetujui dalam rapat final bersama pemerintah Kalurahan dan perwakilan masyarakat. Proses ini memastikan bahwa rencana pembangunan yang disetujui merupakan hasil konsensus dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pak Widayat selaku pemangku jabatan tertinggi di Kalurahan Pagerharjo menyampaikan bahwa:

"Setelah semua usulan disusun dalam rancangan pembangunan, kami mengadakan rapat final untuk membahas dan menyetujui dokumen tersebut. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan konsensus antara pemerintah Kalurahan dan perwakilan masyarakat. Implementasi dilakukan sesuai jadwal dan anggaran yang telah ditetapkan, dengan koordinasi ketat dengan pihak terkait. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana dan untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan", (Wawancara dengan Pak Widayat 10-08-2024)

Implementasi dan Evaluasi, setelah rencana pembangunan disetujui, pemerintah Kalurahan melaksanakan proyek-proyek berjalan dengan ketentuan jadwal dan anggaran yang sudah ditetapkan. Implementasi ini melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak dan lembaga terkait untuk

memastikan pelaksanaan berjalan lancar. Selama dan setelah pelaksanaan, pemerintah Kalurahan melakukan monitoring dan evaluasi untuk menilai kemajuan proyek dan hasil yang dicapai. Evaluasi ini membantu dalam mengidentifikasi kendala dan melakukan penyesuaian baik itu kegunaan dan anggaran.

Pak Tri Sarmudji selaku Sekretaris BPKal Kalurahan Pagerharjo menyampaikan bahwa:

"Proses implementasi biasanya berjalan sesuai rencana, dan kami melihat bahwa proyek-proyek pembangunan dilakukan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang telah ditetapkan. Evaluasi berkala yang dilakukan pemerintah juga membantu kami mengetahui kemajuan dan menangani masalah jika ada. Kami merasa lebih terlibat dan mendapatkan manfaat dari hasil pembangunan", (Wawancara dengan Pak Tri Sarmudji 10-08-2024).

NOMOR : 600/3309

Sehubungan dengan rencana pembangunan Peningkatan Jalan Pasar Plono- Kebun Teh Nglinggo yang akan dilaksanakan di kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Provinsi Yogyakarta. Bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

- Maksud dan tujuan rencana pembangunan :
Peningkatan Jalan pasar Plono- Kebun Teh Nglinggo sepanjang 3,43 Km, Pembangunan jembatan dengan bentang 54 m dan jalan pendekat 227 m
- Letak tanah dan luas yang dibutuhkan:
Jl. Pasar Plono – Kebun Teh Nglinggo Samigaluh dengan jumlah bidang 96 luas 48.721 m
- Tahapan pelaksanaan pengadaan tanah : tahun 2023 sampai dengan 2024
- Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah : 1 (satu) tahun anggaran 2023 sampai 2024
- Perkiraan jangka waktu perkiraan pembangunan : 1 (satu) tahun 2024

Demikian pemberitahuan ini disampaikan,

Wates, 8 September 2023

Sekretaris Daerah
Selaku
Ketua Tim Persiapan,



RULOTRIPRO, SIP., M.Si. *lu*
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19661115 199603 1 002

Gambar 4.22 Rencana Pembangunan Jalan Plono - Kebun Teh Nglinggo

Sumber: Data sekunder profil Kalurahan Pagerharjo Tahun 2023

Keterangan: Gambar di atas adalah surat pemberitahuan kepada Pemerintah Kalurahan Pagerharjo dalam rangka pembangunan peningkatan jalan pasar plano.

Ini juga disampaikan oleh Pak. Wackid Cahyono selaku ulu-ulu Kalurahan Pagerharjo yang menjelaskan bahwa:

"Implementasi dilakukan dengan mengikuti jadwal dan anggaran yang telah disetujui. Kami melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pelaksanaan berjalan lancar. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai kemajuan proyek dan mengidentifikasi kendala. Proses ini membantu kami untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian agar hasil pembangunan sesuai dengan yang diharapkan" (Wawancara dengan Pak Wackid Cahyono 11-08-2024).

Akhir dari proses Musrenbang adalah tersusunnya rancangan pembangunan yang komprehensif. Rencana ini mencakup apa saja yang akan dibangun, termasuk infrastruktur, fasilitas umum, dan program-program sosial, serta cara pelaksanaannya dalam jangka waktu enam tahun pemerintahan. Proses Musrenbang yang melibatkan masyarakat secara aktif meningkatkan partisipasi dan kepemilikan masyarakat terhadap proyek-proyek pembangunan. Ini berkontribusi pada keberhasilan pelaksanaan dan keberlanjutan hasil pembangunan.

Berdasarkan wawancara tersebut, tampak bahwa Musrenbang di Kalurahan Pagerharjo berfungsi sebagai mekanisme yang efektif untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi semua pihak dalam musyawarah di tingkat dusun, peran lembaga kemasyarakatan, musyawarah di tingkat Kalurahan, serta proses pengambilan keputusan dan implementasi sangat penting untuk memastikan bahwa rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Evaluasi secara berkala juga dianggap sebagai elemen vital dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan serta melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Hasil temuan peneliti konsisten dengan temuan penelitian yang dikemukakan oleh Adiwidjaja, et. al (2019) tentang Strategi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan, yang menunjukkan bahwa dalam meningkatkan pembangunan perlu adanya tindakan atau pendekatan kepada masyarakat melalui pembinaan yang lebih intensif kepada masyarakat. Namun, penelitian ini memperluas pemahaman tentang mekanisme dan tindakan strategi pemerintah dalam mendorong pembangunan dengan pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat melalui penyuluhan, pembinaan, koordinasi dan bantuan-bantuan lainnya.

Temuan ini selaras dengan hasil penelitian Gustiman, Y (2021) membahas tentang strategi yang diterapkan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan di Desa Jaya Kopah, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi yang menemukan bahwa Strategi pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan pembinaan kepada masyarakat, namun penelitian ini melibatkan stakeholder teknis yang lebih luas dengan melakukan pembinaan, pengarahan, tindakan dan bimbingan terhadap masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah Kalurahan Pagerharjo efektif dalam menerapkan strategi pembangunan melalui pendekatan yang melibatkan masyarakat secara aktif. Langkah-langkah seperti penyuluhan pertanian, pelatihan, dan bantuan sarana prasarana, serta komunikasi terbuka dan transparansi, berperan penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dan mencapai hasil yang optimal. Proses perencanaan yang melibatkan musyawarah tingkat pedukuhan dan Kalurahan, serta penggunaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM), memastikan bahwa kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dikelola secara akuntabel. Evaluasi berkala dan kolaborasi dengan lembaga eksternal juga mendukung efektivitas program. Temuan ini menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat, perencanaan yang matang, dan komunikasi yang jelas dalam pelaksanaan pembangunan desa yang sukses. Penelitian lebih lanjut dapat memperdalam pemahaman tentang bagaimana strategi-strategi ini berfungsi dalam berbagai konteks dan bagaimana mereka dapat disesuaikan untuk menghadapi tantangan spesifik di desa-desa lain.

5. Perumusan pembelajaran strategis pemerintah Kalurahan

Menurut Suhaenda, et. al dalam (Kiyato, et. al 2024) Pembelajaran merupakan proses yang melibatkan pemahaman tentang seberapa jauh suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah telah berhasil atau tidak. Kodrianingsih, et. al, (2023) menyebutkan terdapat dua sub indikator dalam pembelajaran yaitu, metode perbandingan dan identifikasi.

Metode perbandingan adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk menilai dan merancang pembangunan dengan membandingkan berbagai pilihan atau praktik yang tersedia. Dalam konteks Kalurahan Pagerharjo, metode ini diterapkan dengan melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan serta pengawasan pembangunan. Di Kalurahan Pagerharjo, masyarakat dan pemerintah desa secara aktif melakukan perbandingan terhadap berbagai opsi pembangunan infrastruktur, seperti pemilihan antara pembangunan jalan atau perbaikan jembatan yang sudah ada. Melalui musyawarah desa, masyarakat dapat mengemukakan ide dan preferensi mereka berdasarkan pengalaman dan kebutuhan lokal. Jika ada dua pilihan proyek: pembangunan jalan menuju area pertanian yang sangat produktif atau perbaikan jembatan yang menghubungkan dua desa tetangga,

masyarakat dan pengawas dari Kalurahan Pagerharjo dapat membandingkan manfaat jangka panjang dari masing-masing opsi. Melalui proses ini, keputusan akhir diambil berdasarkan pertimbangan yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan desa, memastikan bahwa investasi pembangunan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat.

Relevan dengan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 16-02-2024, musyawarah perencanaan pelaksanaan gotong royong pembangunan jalan, yang menyebutkan:

Tabel 4.7 Data observasi

No	Tanggal	Tempat/Kegiatan	Aspek yang diamati	Hasil Observasi	Keterangan
1	16-02-2024	Rumah Pak Dukuh	Musyawarah perencanaan pelaksanaan gotong-royong bangun jalan	Kegiatan dihadiri oleh Lurah, dukuh, rt dan warga setempat	Keterlibatan warga cukup tinggi

Hasil observasi pada 16 Februari 2024 di rumah Pak Dukuh menunjukkan bahwa musyawarah perencanaan pelaksanaan gotong royong pembangunan jalan dihadiri oleh Lurah, dukuh, RT, dan warga setempat. Kegiatan ini mencerminkan tingginya keterlibatan warga dalam proses perencanaan pembangunan secara langsung. Keterlibatan aktif berbagai elemen masyarakat dalam musyawarah ini memperkuat proses pembelajaran strategis yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Pagerharjo, khususnya dalam metode perbandingan dan identifikasi. Musyawarah ini menjadi wadah bagi warga untuk memberikan masukan, melakukan evaluasi terhadap opsi pembangunan, serta memastikan bahwa keputusan yang

diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal.

Pak Widayat selaku kepala lurah menjelaskan bahwa:

"Ya perbandingan mungkin menjadi bagian penting dalam proses perencanaan kami. Misalnya, ketika kami harus memilih antara pembangunan jalan baru atau perbaikan jembatan, kami menggunakan metode ini untuk mengevaluasi berbagai opsi yang ada. Kami mengadakan musyawarah desa untuk membahas opsi-opsi tersebut dan mengumpulkan pendapat dari masyarakat. Melalui diskusi ini, kami mempertimbangkan manfaat jangka panjang dari masing-masing opsi berdasarkan pengalaman dan kebutuhan lokal. Dengan cara ini, kami dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan sesuai dengan kepentingan masyarakat", (Wawancara dengan Pak Widayat, 11-08-2024).



Gambar 4.23 Pembangunan jalan pertanian

Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti Tahun 2024

Keterangan: Gambar di atas adalah kegiatan masyarakat dalam membangun jalan pertanian di Kalurahan Pagerharo.

Wackid Cahyono dalam hal ini menjelaskan bahwa metode perbandingan sangat relevan dalam mengambil keputusan dalam pembangunan.

"dengan cara ini sangat efektif karena memungkinkan kami untuk mengevaluasi berbagai alternatif sebelum mengambil keputusan. Kami sering membandingkan beberapa opsi proyek berdasarkan data yang kami kumpulkan dan input dari masyarakat. Misalnya, kami

bisa membandingkan manfaat pembangunan jalan baru dengan perbaikan jembatan yang sudah ada. Diskusi ini dilakukan secara transparan dalam musyawarah desa, sehingga semua pihak terlibat dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan", (Wawancara dengan Pak Wackid Cahyono, 12-08-2024)

Subarkah selaku warga Kalurahan Pagerharjo yang dalam hal ini menjelaskan bahwa:

"dengan adanya perbandingan membuat kami merasa lebih terlibat dalam perencanaan. Ketika ada beberapa opsi proyek, seperti antara pembangunan jalan baru atau perbaikan jembatan, kami dapat memberikan masukan dan memilih opsi yang paling sesuai dengan kebutuhan kami. Metode ini membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan berbagai aspek dan kepentingan masyarakat" (Wawancara dengan Pak Subarkah 12-08-2024)

Identifikasi adalah proses yang melibatkan penilaian sejauh mana program dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, serta evaluasi terhadap program tersebut. Kalurahan Pagerharjo, proses identifikasi ini melibatkan pemahaman mendalam tentang kondisi lokal dan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Di Kalurahan Pagerharjo, proses identifikasi dilakukan dengan cara pemerintah desa dan tim perencana turun langsung ke lapangan untuk menilai kondisi nyata di lapangan. Misalnya, saat merencanakan pembangunan fasilitas jalan seperti jalan pedukuhan atau jalan pertanian, pemerintah desa tidak hanya mengandalkan data sekunder, tetapi juga melakukan kunjungan langsung untuk memahami kondisi jalan yang akan diperbaiki atau dibangun. Selain itu, masyarakat desa diundang untuk berpartisipasi dalam forum musyawarah, di mana mereka dapat menyampaikan aspirasi dan kekhawatiran mereka mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan. Ketika masyarakat mengidentifikasi adanya kekurangan dalam infrastruktur

jalan, mereka bisa mengajukan usulan untuk membangun jalan yang mereka anggap perlu di lokasi tersebut. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses identifikasi ini, pembangunan yang dilakukan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan identitas lokal. Oleh karena itu, hasilnya akan lebih relevan dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

Pak Widayat juga menjelaskan bagaimana identifikasi dilakukan di Kalurahan Pagerharjo dengan identifikasi melibatkan penilaian kondisi nyata di lapangan dan partisipasi aktif masyarakat.

“Kami turun langsung ke lokasi untuk menilai kondisi dan memahami kebutuhan spesifik masyarakat. Misalnya, saat merencanakan pembangunan jalan antar dusun, kami tidak hanya mengandalkan data sekunder tetapi juga melakukan kunjungan lapangan. Kami juga mengundang masyarakat untuk berpartisipasi dalam forum musyawarah agar mereka dapat menyampaikan aspirasi mereka. Ini membantu kami memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal”, (Wawancara dengan Pak Widayat 15-08-2024)

Pak ulu-ulu dalam hal ini juga menyampaikan bahwa:

"bagi kami proses idetifikasi sangat penting untuk memastikan bahwa proyek pembangunan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Kami melakukan kunjungan lapangan untuk melihat kondisi secara langsung dan mengumpulkan masukan dari masyarakat. Peran kami dalam hal ini adalah memfasilitasi proses ini dan memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat. Misalnya, saat merencanakan pembangunan jalan, kami mengumpulkan data tentang kondisi kerusakan jalan di daerah daerah tertentu dan sesuai kebutuhan masayarkat. Hal ini memungkinkan kami untuk merancang proyek yang benar-benar bermanfaat", (Wawancara dengan Pak Wackid Cahyono 15-08-2024).



Gambar 4.24 Pembangunan Jalan Usaha Tani Nglinggo Timur Pagerharjo

Sumber: Data sekunder profil Kalurahan Pagerharjo Tahun 2024

Keterangan: Gambar di atas adalah kegiatan masyarakat membangun jalan usaha tani di Pedukuhan Nglinggo Timur Kalurahan Pagerharjo.

Pak Aji selaku warga Kalurahan pagerharjo dalam hal ini menjelaskan manfaat atau dampak penggunaan metode perbandingan dan identifikasi yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Pagerharjo.

"Proses identifikasi sangat membantu kami, karena memungkinkan kami untuk menyampaikan kebutuhan dan masalah yang kami hadapi. Dengan adanya kunjungan langsung dari pemerintah desa dan forum musyawarah, kami dapat memberikan masukan yang relevan tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan di komunitas kami. Ini membuat pembangunan yang dilakukan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata kami dan lebih efektif dalam memberikan manfaat", (Wawancara dengan Pak Aji 14-2024).

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh informan, peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan metode perbandingan dan identifikasi secara efektif, Kalurahan Pagerharjo dapat memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada hasil yang optimal tetapi juga berakar pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Pendekatan ini memperkuat partisipasi masyarakat dan meningkatkan keberhasilan proyek pembangunan melalui pemahaman yang lebih baik tentang kondisi lokal dan prioritas masyarakat.

Hasil temuan peneliti konsisten dengan temuan penelitian yang dikemukakan oleh Djawa et. al (2022) tentang Strategi Pemerintah Desa Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Mewujudkan Pembangunan Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang, yang menunjukkan masyarakat selalu terlibat dalam kegiatan pembangunan desa dan ikut serta secara langsung dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Pemerintah bersama Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat saling berkerja sama dalam membangun desa, namun penelitian ini memberikan wawasan yang luas dalam memprioritaskan pembangunan juga keterlibatan semua elemen masyarakat juga pemerintah yang aktif dalam mengelola pembangunan desa.

Temuan ini selaras dengan hasil penelitian Kodrianingsih, et. al (2023) tentang Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pembangunan yang dilakukan di Desa Aikmal yang menemukan bahwa dalam belajar menggunakan cara perbandingan dan identifikasi yang menunjukkan pengawasan serta masyarakat dapat memberikan ide untuk perkembangan sesuai dengan keadaan desa karena yang lebih memahami kondisi daerahnya adalah orang-orang yang tinggal di sana serta proses identifikasi dilakukan dengan cara pemerintah langsung melihat keadaan lokasi yang akan dibangun dan masyarakat juga ikut ambil bagian, keterlibatan masyarakat ini adalah salah satu cara untuk membandingkan dalam kegiatan pembangunan karena masyarakat yang merasakan hasil dari proyek itu dan tujuannya adalah masyarakat, namun dalam penelitian ini penelitian lebih luas memberikan wawasan terkait metode perbandingan dan identifikasi dalam pembangunan di Kalurahan Pagerharjo yang melibatkan semua elemen masyarakat dalam merencanakan, pelaksanaan dan evaluasi

pembangunan serta pemerintah sangat melibatkan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sangat penting untuk memastikan proyek-proyek yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal. Dengan mengadopsi metode perbandingan dan identifikasi, keputusan pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan berbasis data, meningkatkan efektivitas dan relevansi hasil pembangunan. Pendekatan ini juga memperkuat kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, serta memperbaiki transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, temuan ini menekankan bahwa strategi yang berhasil di satu tempat dapat disesuaikan untuk konteks lokal lainnya, memungkinkan penerapan praktik pembangunan yang lebih efisien dan sesuai dengan kondisi setempat.

Secara keseluruhan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Pagerharjo sangat baik dalam mendorong pembangunan, dengan berbagai cara yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Pagerharjo, diantaranya:

1. Pemahaman Kebutuhan dan Aspirasi Masyarakat
2. Penyuluhan Edukasi
3. Pembentukan Kelompok Kerja Masyarakat
4. Transparansi dan Akuntabilitas
5. Fasilitas dan Dukungan Pemerintah
6. Peningkatan pembinaan terhadap masyarakat:
 - 1) Pembinaan Masyarakat Di bidang pendidikan
 - 2) Pembinaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan
 - 3) Pembinaan Bidang Hukum
 - 4) Pembinaan Bidang Ekonomi

5) Pembinaan Bidang Agama

6) Pembinaan Bidang Sosial

B. Pembahasan

Kajian penelitian mengenai strategi yang diterapkan oleh pemerintah desa, telah dilakukan berbagai penelitian sebelumnya yang mengkaji berbagai aspek dan pendekatan berbeda. Literatur yang ada menunjukkan bahwa para peneliti menggunakan berbagai teori untuk menganalisis strategi pemerintah Kalurahan, dari teori manajemen dan organisasi hingga teori pembangunan.

Penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada bagaimana strategi pemerintah desa dapat mempengaruhi masyarakat dalam proses pembangunan, serta bagaimana pendekatan-pendekatan strategis yang berbeda dapat berdampak pada efektivitas dan efisiensi implementasi kebijakan. Namun, meskipun ada banyak teori yang digunakan, belum ada konsensus yang jelas mengenai teori yang paling tepat untuk menggambarkan dan mengoptimalkan strategi pemerintah desa.

Dalam konteks ini, peneliti mengevaluasi relevansi teori strategi yang dikembangkan oleh Geoff Mulgan. Geoff Mulgan, seorang pemikir terkemuka dalam bidang inovasi sosial dan strategi pemerintahan, mengemukakan teori yang menekankan pentingnya inovasi, kolaborasi, dan partisipasi dalam merumuskan dan melaksanakan strategi pembangunan. Teori Mulgan berfokus pada bagaimana strategi dapat dirancang untuk mendorong keterlibatan aktif dari berbagai kalangan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian ini mengkaji bagaimana teori strategi Mulgan dapat diterapkan dalam konteks khusus pemerintah Kalurahan Pagerharjo, yang merupakan salah satu Kalurahan yang ada di Indonesia. Kalurahan

Pagerharjo telah berusaha untuk meningkatkan pembangunan melalui berbagai inisiatif dan strategi. Dengan menganalisis bagaimana pendekatan yang diusulkan oleh Mulgan berkaitan dengan kebijakan dan praktik yang diterapkan di Pagerharjo, peneliti berupaya untuk mengidentifikasi apakah ada kesesuaian antara teori Mulgan dan realitas di lapangan.

Kajian ini melibatkan analisis mendalam terhadap strategi yang diterapkan oleh pemerintah Kalurahan Pagerharjo, termasuk mekanisme partisipasi masyarakat, peran pemangku kepentingan lokal, dan hasil yang dicapai dari berbagai inisiatif pembangunan. Peneliti menerapkan metode kualitatif untuk mengumpulkan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara langsung di lokasi.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana teori strategi Geoff Mulgan relevan dan aplikatif dalam konteks pemerintah Kalurahan seperti Pagerharjo. Peneliti ingin mengetahui apakah prinsip-prinsip Mulgan, seperti pentingnya inovasi sosial dan kolaborasi, benar-benar mencerminkan dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kalurahan dalam mendorong pembangunan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana teori strategi dapat diadaptasi dan diterapkan dalam konteks lokal, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah Kalurahan lainnya yang menghadapi tantangan serupa.

Dengan mengaitkan teori Mulgan dengan praktik nyata di Pagerharjo, penelitian berusaha untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan pengembangan strategi pemerintah Kalurahan yang lebih efektif dalam mendorong pembangunan, juga memberikan gambaran dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif di masa depan.

C. Kebaruan

Peneliti tentang strategi pembangunan memang sudah banyak dilakukan dilakukan. Begitu juga penelitian terkait pembangunan Kalurahan juga sudah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu. Akan tetapi penelitian yang mengangkat isu Strategi Pemerintah Kalurahan Pagerharjo dalam Pembangunan dan mengkonfirmasinya dengan Teori Geoff Mulgan yaitu; *purpose, environment, direction, actions* dan *learning* sebagai pisau analisis berdasarkan penelusuran literatur baru dalam penelitian ini. Penelitian ini juga dapat menambah wawasan pengaplikasian teori Strategi dari Geoff Mulgan karena berdasarkan hasil penelitian, strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Pagerharjo dalam mendorong pembangunan dapat dianalisis dengan teori Geoff Mulgan tersebut. Dengan demikian peneliti optimis bahwa penelitian ini layak dilakukan dan merupakan kebaruan dalam khasanah penelitian tentang Strategi Pemerintah Kalurahan Pagerharjo dalam Mendorong Pembangunan yang dilakukan di Kalurahan Pagerharjo.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyajian data dan analisis yang telah dilakukan di Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, peneliti menghasilkan kesimpulan bahwa strategi pembangunan yang diterapkan oleh Pemerintah Kalurahan Pagerharjo mengacu pada konsep strategi menurut Geoff Mulgan, yaitu: (1), perumusan tujuan pembangunan Kalurahan, pemerintah Kalurahan Pagerharjo telah merumuskan tujuan pembangunan dengan pendekatan yang partisipatif dan berorientasi pada kebaikan bersama. Strategi yang digunakan menekankan kolaborasi aktif dengan masyarakat serta memperhatikan kebutuhan warga, baik di bidang infrastruktur, ekonomi, sosial, maupun tata kelola pemerintahan. Hal ini sesuai dengan prinsip pembangunan menurut Geoff Mulgan yang mengedepankan inovasi sosial dan pemberdayaan sebagai fondasi kebijakan strategis. (2), perumusan pemahaman pemerintahan Kalurahan terhadap lingkungan, strategi pembangunan yang diterapkan menunjukkan adanya pemahaman yang baik dari pemerintah Kalurahan terhadap kondisi lingkungan internal (seperti kapasitas sumber daya manusia, struktur organisasi, dan potensi lokal) dan eksternal (dinamika kebijakan daerah, partisipasi mitra pembangunan, serta tantangan sosial-ekonomi yang dihadapi masyarakat). Strategi ini disesuaikan dengan konteks lokal dan fleksibel terhadap perubahan lingkungan strategis yang terjadi. (3), perumusan visi dan arah strategis, pemerintah Kalurahan memiliki visi jangka panjang yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan resmi, seperti RPJM Kalurahan dan RKP Tahunan. Visi ini dijalankan secara konsisten

melalui arah kebijakan dan instruksi teknis yang menyeluruh, mencerminkan adanya komitmen dalam menjaga kesinambungan pembangunan. Keberadaan visi ini menjadi pedoman dalam penyusunan program strategis serta dalam pengambilan keputusan pembangunan. (4), perumusan strategi pemerintah Kalurahan, pemerintah Kalurahan Pagerharjo telah melaksanakan sejumlah tindakan strategis melalui berbagai program konkret, diantaranya: pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan lokal, penguatan ekonomi produktif berbasis potensi desa, dan pengembangan kapasitas masyarakat melalui pelatihan serta pemberdayaan. Selain itu, penguatan tata kelola yang akuntabel dan transparan juga menjadi bagian dari strategi utama, memastikan bahwa pembangunan bersifat inklusif dan berkeadilan. Dan (5), perumusan pembelajaran strategis pemerintah Kalurahan, salah satu kekuatan utama strategi pembangunan di Kalurahan Pagerharjo adalah penerapan evaluasi berkala sebagai alat reflektif dan dasar inovasi kebijakan. Pemerintah Kalurahan secara aktif melakukan peninjauan terhadap capaian, tantangan, dan efektivitas program. Hasil evaluasi digunakan untuk penyesuaian strategi dan pengembangan program yang lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Proses ini mencerminkan siklus pembelajaran strategis yang adaptif dan berkelanjutan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pelatihan bagi pamong Kalurahan dan masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam manajemen dan partisipasi. Fokus pada peningkatan pendidikan dasar dan penyuluhan

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran mereka dalam pembangunan.

2. Pengelolaan Anggaran yang Lebih Baik

Rencanakan dan alokasikan anggaran dengan lebih efisien untuk memastikan bahwa dana digunakan secara optimal untuk program yang memberikan dampak terbesar. Transparansi dalam pengelolaan anggaran desa agar masyarakat merasa lebih percaya dan mau terlibat aktif.

3. Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat

Tingkatkan partisipasi masyarakat dengan melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

C. Keterbatasan Penelitian

Peneliti dalam melakukan penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi pada hasil analisis, yaitu:

1. Peneliti memiliki keterbatasan dalam hal kemampuan juga memahami konteks pemerintah Kelurahan secara detail.
2. Keterbatasan data dan literatur, sehingga mengakibatkan penelitian ini memiliki banyak kelemahan dalam hal analisis maupun dari segi hasil penelitian
3. Peneliti memiliki keterbatasan pengetahuan dalam membuat dan menyusun karya ilmiah sehingga perlu dikaji kembali untuk para peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Fiantika, F., Wasil, M., Jumiyati, S. R. I., Honesti, L., Wahyuni, S. R. I., Mouw, E., ... & Ambarwati, K. (2022). Metodologi penelitian kualitatif. *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Rake Sarasin (Issue March)*. Surabaya: PT. Pustaka Pelajar. <https://scholar.google.com/citations>.
- Kartono, D. T., & Nurcholis, H. (2016). Konsep dan Teori Pembangunan. *Jakarta: Pustaka Pelajar*.
- Miles, B. Matthew dan A. Michael Huberman (2009). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta. Universitas Indonesia (UI-Press).
- Supardal (2019). *Dinamika Pemerintah Daerah dan Desa*. Baskara Media. Yogyakarta.
- Wardani, N. H. R., Trop, M. K., Nurhayati, S., Afni, A. C. N., Anggraini, N. Y., Kep, M., ... & Raharyani, A. E. (2023). *Kebutuhan Dasar Manusia*. Rizmedia Pustaka Indonesia.

JURNAL:

- Adiwidjaja, I. (2019). STRATEGI PEMERINTAH DESA MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA TORONGREJO KOTA BATU. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8(2), 88-92.
- Ariadi, A. (2019). Perencanaan pembangunan desa. *Meraja journal*, 2(2), 135-147.

- Kasmira, K., Alyas, A., & Sudarmi, S. (2020). Strategi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(3), 818-833.
- Riani, N. K. (2021). Strategi peningkatan pelayanan publik. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(11), 2443-2452.
- Djawa, A. M. B., Hardianto, W. T., & Firdausi, F. (2022). *Strategi Pemerintah Desa Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Mewujudkan Pembangunan Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang* (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Universitas Tribhuwana Tungga Dewi Malang).
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Geoff Mulgan (2009) Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kejahteraan Masyarakat Melalui Program Bank Sampah Larahan Makmur Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.
- Gustiman, Y. (2021). Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. *Juhanperak*, 2(3), 913-934.
- Handayani, S. (2022). Strategi Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan dan Partisipasi Masyarakat Desa. *Sawala*, 2(2), 61-73.
- Kaharuddin, K. (2021). Kualitatif: ciri dan karakter sebagai metodologi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 9(1), 1-8.

- Kiyato, P. L., Purwanto, D., & Budiati, A. C. (2024). Tepisari Village Government Strategies in Increasing Community Participation in Development Programs. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 8(1), 384-392.
- Kodrianingsih, W. L., Rispawati, R., & Alqadri, B. (2023). Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan di Desa Aikmel. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(7), 5384-5391.
- Lahagu, O. (2018). Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Sitolubanua Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara).
- Mono, A., & Samaloisa, R. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman. *TheJournalish: Social and Government*, 3(2), 113-121.
- Nippi, A. T. (2019). Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani. *Meraja journal*, 2(1).
- Permatasari, I., Mulyawan, R., & Taryana, A. (2024). Strategi Pemerintah Kabupaten Bandung Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Aplikasi E-Office (Studi Pada Kecamatan Cicalengka Tahun 2022). *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 4(1), 114-121.
- Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95.
- Se, H., Mea, M. H. C. D., & Sedi, M. E. (2021). Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Di Desa Sobo Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 11(1), 37-52.

TESIS:

Mono, A., (2022). *Strategi Pemerintah Desa Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kalurahan Condongcatur Kapenewon Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Tugas Akhir Program Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”.

PERATURAN PERUNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

PERMENDAGRI No. 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014.

WEBSITE

Visi-Misi. Dikutif dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-visi-misi/> diakses tanggal 30 Juli 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Ijin Penelitian

		SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta, Telp (0274) 561971, Fax. (0274) 515989, Website: www.stip.apmd.ac.id AKREDITASI-B SK No. 4640/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017
Nomor	: 394/S-2/VII/2024	16 Juli 2024
Lampiran	: 1 bendel	
Perihal	: Permohonan Ijin Penelitian	
 Kepada Yth, Lurah Pagerharjo Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta di Pagerharjo		
 Dalam rangka menyelesaikan studi di Program studi Magister Ilmu Pemerintahan mahasiswa di bawah ini mengharapkan bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan ijin dan kesempatan untuk melakukan penelitian guna menulis tesis yang berjudul STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN (Studi di Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan Dosen Pembimbing : Dr. Supardal, M.Si. Adapun identitas mahasiswa tersebut adalah :		
Nama	: Abdul Heri	
Nomor Mahasiswa	: 23610005	
Jenjang	: Magister	
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan	
Tahun Akademik	: 2024/2025	
Waktu Penelitian	: 4 bulan	
 Demikian permohonan ini dan atas bantuan serta kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.		
		 Direktur  Dr. Sugiyanto, S.Sos, MM. NIY 170 230 210

2. Surat Keterangan telah melakukan penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KAPANEWON
SAMIGALUH
PEMERINTAH KALURAHAN PAGERHARJO

Alamat: Ngemplak Pagerharjo Samigaluh Kulon Progo Kode Pos 55673

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140/183

Bersama ini saya Lurah Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan surat keterangan kegiatan di Kalurahan Pagerharjo kepada yang bersangkutan atas nama:

Nama : Abdul Heri
NIM : 23610005
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta
Keperluan : Penelitian Tesis
Lokasi : Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian dengan judul "**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN**". Penelitian dilaksanakan di Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sesuai dengan keperluan yang bersangkutan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Pagerharjo, 01 Oktober 2024



3. Panduan Wawancara

Identitas Informan Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

Hari/Tanggal/pukul :

Daftar Pertanyaan Untuk Kepala Kalurahan Pagerharjo

1. Kapan perencanaan pembangunan desa dilakukan?
2. Siapa saja yang dilibatkan dalam perencanaan tersebut?
3. Apakah perencanaan pembangunan melibatkan masyarakat?
4. Perencanaan apa saja yang melibatkan masyarakat?
5. Apakah Masyarakat ikut rapat/diskusi dalam perencanaan pembangunan?
6. Siapa saja yang dilibatkan dalam perencanaan pembangunan desa?
7. Apakah Masyarakat ikut mengusulkan /mengajukan ide mengenai pembangunan desa?
8. Apakah masyarakat ikut dilibatkan dalam memutuskan pembangunan yang dilaksanakan di desa?
9. Bagaimana keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa?
10. Apa saja bentuk partisipasi dari masyarakat dalam pembangunan?
11. Apakah ada ruang yang disediakan oleh desa untuk menampung aspirasi dari masyarakat?
12. Apakah masyarakat terlibat aktif dalam merumuskan rencana pembangunan?
13. Bagaimana menyikapi setiap usulan dari masyarakat?

14. Apa yang memengaruhi minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa?
15. Faktor apa saja yang menjadikan masyarakat kurang berminat dalam perencanaan pembangunan desa?
16. Bagaimana cara menghadapi kendala masyarakat yang kurang berperan aktif?
17. Strategi apa saja yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat?
18. Strategi apa yang dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa?
19. Apakah ada Langkah-langkah yang sudah disiapkan oleh pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat?
20. Apakah ada media tersendiri agar memudahkan masyarakat dalam berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa?
21. Apakah akan ada program atau cara lain dalam kedepannya agar masyarakat menjadi lebih berperan aktif dalam suatu perencanaan pembangunan desa?

Identitas Informan Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

Hari/Tanggal/pukul :

Daftar Pertanyaan Untuk Ulu-ulu

1. Kapan perencanaan pembangunan desa dilakukan?
2. Siapa saja yang dilibatkan dalam perencanaan tersebut?
3. Apakah perencanaan pembangunan melibatkan masyarakat?

4. Perencanaan apa saja yang melibatkan masyarakat?
5. Apakah Masyarakat ikut rapat/diskusi dalam perencanaan pembangunan?
6. Apakah ada kendala dalam partisipasi masyarakat?
7. Apa yang faktor pendukung dan penghambat dalam strategi pembangunan?

Identitas Informan Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

Hari/Tanggal/pukul :

Daftar Pertanyaan Untuk BPKal

1. Kapan perencanaan pembangunan desa dilakukan?
2. Siapa saja yang dilibatkan dalam perencanaan tersebut?
3. Apakah perencanaan pembangunan melibatkan masyarakat?
4. Perencanaan apa saja yang melibatkan masyarakat?
5. Apakah Masyarakat ikut rapat/diskusi dalam perencanaan pembangunan?
6. Siapa saja yang dilibatkan dalam perencanaan pembangunan desa?
7. Apakah Masyarakat ikut mengusulkan /mengajukan ide mengenai pembangunan desa?
8. Apakah masyarakat ikut dilibatkan dalam memutuskan pembangunan yang dilaksanakan di desa?
9. Bagaimana keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa?
10. Apa saja bentuk partisipasi dari masyarakat dalam pembangunan?

11. Apakah ada ruang yang disiapkan oleh desa untuk menampung aspirasi dari masyarakat?
12. Apakah masyarakat terlibat aktif dalam merumuskan rencana pembangunan?
13. Bagaimana menyikapi setiap usulan dari masyarakat?
14. Apa yang memengaruhi minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa?
15. Faktor apa saja yang menjadikan masyarakat kurang berminat dalam perencanaan pembangunan desa?

Identitas Informan Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

Hari/Tanggal/pukul :

Daftar Pertanyaan Untuk LPMKal

1. Apa strategi pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan?
2. Apakah ada kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kelurahan dalam menyiapkan dan juga implementasi berkaitan dengan strategi yang akan digunakan untuk mendorong partisipasi masyarakat?
3. Faktor apa yang sering dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan strategi?
4. Apakah ada faktor eksternal dan internal dalam merumuskan strategi sampai pada implementasi?
5. Apakah ada strategi yang sudah disiapkan tetapi tidak terlaksana?

Identitas Informan Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

Hari/Tanggal/pukul :

Daftar Pertanyaan Untuk Kamituwa

1. Bagaimana Anda melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di padukuhan?
2. Apa metode yang Anda gunakan untuk memastikan bahwa suara semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok minoritas, didengar dalam musyawarah padukuhan?
3. Bagaimana Anda menentukan prioritas pembangunan di padukuhan?
4. Apa langkah-langkah yang diambil untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan proyek pembangunan dengan kebutuhan tersebut?
5. Bagaimana Anda memastikan bahwa kelompok rentan, seperti difabel, wanita, dan lansia, terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan?
6. Apa kendala dalam mendorong partisipasi masyarakat?
7. Apa langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan?

Identitas Informan Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

Hari/Tanggal/pukul :

Daftar Pertanyaan Untuk Kepala Dukuh

1. Apa peran utama Anda sebagai Dukuh dalam mendukung strategi pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan?
2. Bagaimana Anda memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab Anda sejalan dengan tujuan partisipasi masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah desa?
3. Apa langkah-langkah yang Anda ambil untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan di dusun Anda?
4. Bagaimana Anda mengidentifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk memastikan bahwa proyek pembangunan sesuai dengan keinginan mereka?
5. Metode apa yang digunakan untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat mengenai proyek pembangunan?
6. Bagaimana Anda mengatasi tantangan dalam melibatkan masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang mungkin kurang terdengar suaranya?
7. Bagaimana Anda menyampaikan informasi mengenai proyek pembangunan dan kesempatan partisipasi kepada masyarakat di dusun Anda?
8. Apa cara yang Anda gunakan untuk memastikan transparansi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan?
9. Apa faktor pendukung dan penghambat pemerintah dalam melaksanakan strategi pembangunan untuk mendorong partisipasi masyarakat?

Identitas Informan Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

Hari/Tanggal/pukul :

Daftar Pertanyaan Untuk Ketua Lembaga Budaya di Kalurahan Pagerharjo

1. Apa peran utama Anda sebagai Ketua Lembaga Budaya dalam mendukung strategi pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan?
2. Bagaimana lembaga budaya berkontribusi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan di Kalurahan?
3. Bagaimana lembaga budaya memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam proyek pembangunan dan inisiatif budaya?
4. Apa cara yang digunakan lembaga budaya untuk mengumpulkan dan mempertimbangkan masukan dari masyarakat terkait dengan pembangunan dan kegiatan budaya?
5. Apa faktor pendukung dan penghambat strategi pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat?

Identitas Informan Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

Hari/Tanggal/pukul :

Daftar Pertanyaan Untuk Kelompok Tani

1. Apa peran kelompok tani dalam mendukung strategi pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan?

2. Bagaimana kelompok tani berkontribusi dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan di desa?
3. Bagaimana kelompok tani melibatkan anggotanya dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek pembangunan yang berdampak pada pertanian?
4. Apa langkah-langkah yang diambil kelompok tani untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi petani diperhatikan dalam proyek pembangunan?
5. Jenis dukungan atau sumber daya apa yang diterima kelompok tani dari pemerintah desa untuk mendukung partisipasi dalam pembangunan?
6. Bagaimana kelompok tani memanfaatkan dukungan atau sumber daya tersebut untuk meningkatkan keterlibatan dalam proyek pembangunan?
7. Apa faktor pendukung dan penghambat strategi pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat?

Identitas Informan Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

Hari/Tanggal/pukul :

Daftar Pertanyaan Untuk PKK

1. Apa peran PKK dalam mendukung strategi pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan?
2. Bagaimana PKK berkontribusi dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan di desa?
3. Bagaimana PKK melibatkan anggotanya dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait proyek pembangunan?

4. Apa metode yang digunakan PKK untuk memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan keluarga di desa diperhatikan dalam proyek pembangunan?
5. Metode apa yang diterapkan oleh PKK untuk mengumpulkan umpan balik dari anggota mengenai inisiatif pembangunan?
6. Bagaimana PKK menyosialisasikan informasi tentang proyek pembangunan kepada masyarakat dan anggota keluarga?
7. Jenis dukungan atau sumber daya apa yang diterima PKK dari pemerintah desa untuk mendukung partisipasi dalam pembangunan?
8. Bagaimana PKK memanfaatkan dukungan atau sumber daya tersebut untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proyek pembangunan?

Identitas Informan Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

Hari/Tanggal/pukul :

Daftar Pertanyaan Untuk Kelompok Peternak

1. Apa peran utama kelompok ternak dalam mendukung strategi pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan?
2. Bagaimana kelompok ternak berkontribusi dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan yang berhubungan dengan sektor peternakan di desa?
3. Bagaimana kelompok ternak melibatkan anggotanya dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek pembangunan?
4. Apa langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi peternak diperhatikan dalam proyek pembangunan desa?

5. Metode apa yang digunakan kelompok ternak untuk mengumpulkan umpan balik dari anggotanya mengenai inisiatif pembangunan?
6. Bagaimana kelompok ternak memastikan bahwa informasi mengenai proyek pembangunan disampaikan secara efektif kepada seluruh anggota?
7. Jenis dukungan atau sumber daya apa yang kelompok ternak terima dari pemerintah desa untuk mendukung partisipasi dalam pembangunan?
8. Bagaimana kelompok ternak memanfaatkan dukungan atau sumber daya tersebut untuk meningkatkan keterlibatan anggotanya dalam proyek pembangunan?
9. Apa faktor pendukung dan penghambat strategi pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat?

Identitas Informan Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

Hari/Tanggal/pukul :

Daftar Pertanyaan Untuk UMKM

1. Apakah Anda merasa mendapatkan dukungan yang memadai dari pemerintah desa untuk usaha Anda?
2. Jenis dukungan apa yang paling Anda butuhkan dari pemerintah desa saat ini?
3. Sejauh mana dukungan pemerintah desa membantu dalam pengembangan usaha Anda?
4. Pertanyaan tentang Partisipasi Masyarakat
5. Bagaimana cara pemerintah desa melibatkan pelaku UMKM dalam proses perencanaan dan pembangunan desa?

6. Apakah Anda merasa terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi usaha Anda?
7. Apa cara terbaik bagi pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi pelaku UMKM dalam pembangunan desa?

Identitas Informan Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

Hari/Tanggal/pukul :

Daftar Pertanyaan Untuk Masyarakat

1. Sebagai masyarakat umum apakah saudara mengetahui setiap perencanaan pembangunan desa yang dilakukan pemerintah desa?
2. Bagaimana tanggapan saudara mengenai cara pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa?
3. Apa saran yang dapat anda berikan untuk masyarakat lain agar lebih berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa?
4. Apa saran yang dapat anda berikan untuk Pemerintah desa agar lebih melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa?
5. Apakah aspirasi yang saudara sampaikan diterima dengan positif oleh pemerintah desa?

4. Daftar Dokumen

1. Profile Desa
2. RPJMKal
3. Rekap Data Penduduk
4. Perdes
5. APBDesa
6. RKP




5. Daftar Observasi


No	Uraian Pengamatan	Ada	Tidak	Keterangan
1.	Kantor Kalurahan	✓		
2.	Kepala Desa (Lurah)	✓		
3.	Struktur Organisasi Desa	✓		
4.	RPJMDesa	✓		
5.	APBDesa	✓		
6.	Pengurus Difabel	✓		
7.	Struktur Organisasi BPD	✓		
8.	Kantor Lembaga Budaya	✓		
9	Kantor BPD	✓		
10	Pengurus PKK	✓		
11	Pengurus Pokdarwis	✓		
12	GAPOKTAN Gabungan Kelompok Tani	✓		
13	Kelompok Ternak	✓		
14	Karang Taruna	✓		
15	POKDARWIS Pokok Pengelola Wisata	✓		
16	KSB: Kelompok Sadar Budaya	✓		
17	Poskamling	✓		
18	Badan Usaha Milik Desa	✓		
19	Credit Union (Koperasi Simpan Pinjam	✓		
20	LKD Lembaga Kemasyarakatan Desa	✓		
21	BMT Baitul Maal wat Tamwil (Koperasi Syariah)	✓		
22	Pasar Desa	✓		
23	Linmas	✓		
24	Babinkamtibmas	✓		
25	Gedung Olahraga	✓		
26	Gedung Sekolah	✓		
27	Puskesmas	✓		
28	Wisata Kebun Teh	✓		
29	Wisata Air Terjun	✓		
30	Embung	✓		
31	Pam Desa/Kelompok	✓		
32	Bendungan	✓		
33	Jaringan Irigasi/Jides	✓		

6. Foto Wawancara Bersama Informan

No	Dokumentasi Hasil Penelitian	Deskripsi
1	<p>A photograph showing two men sitting on a green sofa. The man on the left is wearing a dark blue uniform, and the man on the right is wearing a white t-shirt. They are in a room with a white wall and a blue circular clock. A text overlay on the image reads: "26 Jul 2024 13.11.55", "Pagerharjo Kecamatan Samigaluh", "Kabupaten Kulon Progo Daerah", "Istimewa Yogyakarta", "7,68°S 110,13°E", "578,3m Ketinggian". There is also a small red location pin icon with the text "@Pengita Kalirejo" below it.</p>	Wawancara bersama pak Widayat (Lurah Pagerharjo)
2	<p>A photograph showing two men sitting on a pink sofa. The man on the left is wearing a black shirt, and the man on the right is wearing a white shirt. They are in a room with a wooden cabinet in the background. A green bag is on the sofa between them.</p>	Wawancara bersama pak Martono (Ketua LPMKal)
3	<p>A photograph showing two men sitting at a wooden desk. The man on the left is wearing a blue shirt, and the man on the right is wearing a patterned shirt. They are in a room with a wooden cabinet and a purple poster on the wall.</p>	Wawancara bersama pak Subardi (Ketua Lembaga Budaya)

4		Wawancara bersama Pak (Kamituwa) Supanto
5		Wawancara bersama Pak (Masyarakat) Subarkah
6		Wawancara bersama Pak Agustinus Sosilo (Petani kopi)
7		Wawancara bersama Pak Aji (Masyarakat)

8	 <p>29 Agu 2024 18.08.44 Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta 7,67°S 110,14°E 546,1m Ketinggian</p>	Wawancara bersama Pak Budiyo (Kelompok ternak)
9	 <p>29 Agu 2024 21.04.58 Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta 7,68°S 110,13°E 618,5m Ketinggian</p>	Wawancara bersama Bu Mariati (Pelaku UMKM)
10		Wawancara bersama Pak Wackid Cahyono (Ulu-ulu)

11		Wawancara bersama Pak Martono (Ketua LPMKal)
12		Wawancara bersama Pak Wackid Cahyono (Ulu-ulu)
13		Wawancara bersama Pak Hendi Masaleh (Dukuh)

14	 <p>31 Agu 2024 11.28.04 Pagerharjo Kecamatan Samialuh Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta 7,67°S 110,15°E 588,2m Ketinggian</p>	Wawancara bersama Pak Mujiarjo (Ketua Rt)
15		Wawancara bersama Pak Widayat (Lurah)
16		Wawancara bersama Pak Supanto (Kamituwa)
17		Wawancara bersama Pak Paulus Prio Sabtano (Dukuh)

18	 <p>30 Agu 2024 10.10.01 Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta 7,67°S 110,14°E 521,9m Ketinggian</p>	Wawancara bersama Bu Heri Yulianti (Kasi pelayanan)
19	 <p>2 Sep 2024 13.05.52 Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta 7,67°S 110,14°E 544,8m Ketinggian</p>	Wawancara dengan Bu Nila Multi (Ketua PKK)
20		Wawancara bersama Pak Subardi (Ketua Lembaga Budaya)

21		Wawancara bersama Pak Yatino (Masyarakat)
22		Wawancara bersama Bu Yohana Suyati (Anggota PKK)
23		Wawancara bersama Pak Tri Samurdji (Sekretaris BPKal)

7. Publikasi Jurnal



ARUS JURNAL SOSIAL DAN HUMANIORA

Ditulis oleh: **E-ISSN: 2808-1307**
P-ISSN: 2808-1447

Home Tarkin Arsip Tentang Jurnal Ini Sistem Publikasi Pengumuman Tentang Kami KONTAK Kantor
Q Cari

Beranda / Arsip / Vol 4 No 3: Desember (2024) / Artikel

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Abdul Heri
 Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APKMD"

Supardal
 Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa

DOI: <https://doi.org/10.57230/ajsh.v4i3.685>

Kata Kunci: Partisipasi, Pembangunan, Desa

Abstrak

Penelitian ini di latar belakang oleh pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendorong kemajuan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan di Kelurahan Pagerharjo, Kabupaten Kulon Progo. Fokus utama penelitian ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi pembangunan, serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam partisipasi masyarakat. Data dikumpulkan melalui berbagai metode, termasuk observasi dan wawancara. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Pagerharjo sudah cukup optimal. Hal ini terlihat dari keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan, yang mencerminkan kesadaran dan komitmen mereka terhadap kemajuan Kalurahanannya. Masyarakat tidak hanya terlibat dalam tahap perencanaan, tetapi juga aktif dalam pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dan hambatan yang perlu diatasi agar partisipasi masyarakat dapat lebih maksimal. Faktor-faktor seperti kurangnya Sumber Daya Manusia dan keterbatasan Anggaran yang memadai dapat menghambat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, upaya



ARUS JURNAL SOSIAL DAN HUMANIORA (AJSH)

Volume 4
Issue 3
Tahun 2024

4.3.22/AJSH

Diterbitkan
2024-12-21

Cara Mengutip
 Heri, A., & Supardal. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora. 4(3), 1275-1288.
<https://doi.org/10.57230/ajsh.v4i3.685>

Format Sitasi Lainnya *

Diterbitkan
Vol 4 No 3: Desember (2024)

OJS

OPEN JOURNAL SYSTEMS

Akreditasi Sinta:



CARA REGISTRASI

REGISTRASI

LOGIN



Article Template

CARA MENGIRIM ARTIKEL

↑ SUBMIT YOUR PAPER

ADDITIONAL MENU

FOCUS AND SCOPE

EDITORIAL TEAM

8. TOEFL



SPEAKING PARTNER
by KAMPUSKUYA INSTITUTE

Jl Brawijaya No 13A , Singgahan, Pelem, Kec Pare, Kab Kediri
E-mail : mail@speakingpartner.id | Telepon : +6281215163896

SK DINAS NO 421.9/7409/418.20/2022

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

2878.169997/1317/IX/2024

This is to certify that

ABDUL HERI

has achieved the following scores on the

TOEFL TEST PROGRAM

at Speaking Partner

SECTION	SCORE
Listening Comprehension	58
Structure & Written Expression	37
Reading Comprehension	53
TOTAL	493

Scan Here for Validation



Kediri, 29 Sep 2024



Krishna Ardhy Sunu
CEO of SPEAKING PARTNER

This Certificate is Acceptable Until
September 29th, 2026

TOEFL® is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS).
No affiliation between ETS and Speaking Partner is applied.

9. TANDA CEK PLAGIASI



Lumbung Desa STPMD "APMD"
Perpustakaan Sekolah Tinggi Pembinaan Masyarakat Desa "APMD"
Jl. Timoho-317 Gondokusuman Yogyakarta 55225
Email: perpustakaan@gmail.com telp/WA 0851-7320-3177

TANDA TERIMA CEK PLAGIASI

Tanda terima ini menyatakan bahwa Lumbung Desa Perpustakaan STPMD "APMD" telah menerima makalah anda dan telah memeriksanya melalui perangkat lunak Turnitin dengan rangkuman berikut:

Penulis Makalah : Abdul Heri
Judul Makalah: STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENDORONG
PEMBANGUNAN DI KALURAHAN PAGERHARJO
Tanggal pemeriksaan: 4 Agustus 2025
Persentase plagiasi: 5%



Petugas: Checked By:

I. Prabowo

